



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1094, 2018

KEMHAN. Renstra Tahun 2015-2019. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 08 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan perubahan program dan kegiatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi, serta Matrik Kinerja dan Pendanaan Rencana Strategi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2015-2019, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 08 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2015-2019, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 08 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2015-2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
 8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 08 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1149);

9. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1922);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 08 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 2015-2019.

Pasal I

Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 08 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1149) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2018

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 08 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA TAHUN 2015-2019

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 2015-2019

BAB I
PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum.

a. Pembangunan Pertahanan Negara.

Negara Indonesia yang terbentuk dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan, kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Upaya pencapaian tujuan ini dilaksanakan pemerintah melalui pembangunan nasional yang dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.

Pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Usaha ini menjadi salah satu fungsi pemerintahan dalam mewujudkan suatu kesatuan pertahanan guna mencapai tujuan nasional. Untuk merealisasikan usaha tersebut maka pengelolaan sistem pertahanan negara senantiasa berpedoman pada Visi, Misi, dan Nawa Cita Kabinet Kerja Pemerintahan yang

dirumuskan dalam kebijakan dan rencana strategis pertahanan negara Kementerian Pertahanan. Pembangunan pertahanan negara tetap berorientasi pada keterpaduan antara pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter sebagai wujud kesemestaan dalam sistem pertahanan negara.

Sistem pertahanan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 yaitu pertahanan bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Untuk mewujudkan pertahanan yang bersifat semesta, pemerintah dalam hal ini Kemhan merumuskan Rencana Strategis Kemhan dan TNI sebagai produk kebijakan strategis pembangunan pertahanan negara dalam rangka mewujudkan kemampuan dan kekuatan pertahanan negara yang tangguh. Peningkatan kemampuan dan kekuatan pertahanan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi stabilitas politik dan keamanan. Semakin kuatnya pertahanan Indonesia ditunjukkan dengan meningkatnya kekuatan Alutsista pada seluruh matra. Dengan peningkatan tersebut, dituntut kesiapan Alutsista untuk operasional dan tempur serta peningkatan profesionalisme prajurit sebagai elemen utama kekuatan pertahanan.

b. Capaian Kinerja Kemhan.

Pembangunan bidang pertahanan dalam periode tahun 2010-2014 secara umum telah berhasil meningkatkan kemampuan pertahanan negara dan terpeliharanya pelaksanaan pembangunan nasional. Peningkatan kemampuan pertahanan tersebut dapat diindikasikan dengan semakin banyaknya negara yang berminat untuk melakukan kerja sama pertahanan/militer dengan Indonesia. Hal ini ditunjukkan pula dengan meningkatnya kepercayaan dunia internasional untuk melaksanakan sejumlah kegiatan berskala internasional di Indonesia. Keberhasilan pembangunan pada periode 2010-2014 tersebut salah satunya karena sebagian pemenuhan postur TNI pada skala Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force/MEF*) telah dapat ditunjang melalui industri pertahanan dalam negeri. Sebagai implikasinya, Kemhan/TNI telah berhasil

mendatangkan dan membangun sejumlah Alutsista yang modern dan memiliki daya penggentar tinggi. Sementara itu untuk Alutsista strategis yang belum dapat dibuat oleh industri pertahanan dalam negeri, Alutsista tersebut didatangkan dari industri pertahanan luar negeri.

Pada awal tahun 2015, sejumlah peralatan militer modern yang telah diterima oleh TNI akan menambah kelengkapan Alutsista TNI. Konsekuensi dengan adanya peningkatan kekuatan militer dan kesiapan operasional maka kebutuhan penyediaan anggaran untuk pemeliharaan, perawatan dan perbaikan Alutsista, dukungan Bahan Bakar Minyak, maupun amunisi akan semakin meningkat. Sehubungan dengan mayoritas pemenuhan MEF masih bersumber dari industri pertahanan luar negeri karena masih terbatasnya kemampuan teknologi industri pertahanan dalam negeri, maka dalam rangka mengantisipasi keterbatasan itu, *master plan* Komite Kebijakan Industri Pertahanan tahun 2015-2019 akan memfokuskan pada pencapaian postur dan mengupayakan masa transisi kepada industri pertahanan yang mencakup kemampuan untuk mendukung terpenuhinya MEF, meningkatkan kemampuan kerja sama produksi, serta meningkatkan pengembangan produk baru untuk Alutsista yang masih belum dapat diproduksi sendiri. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, industri pertahanan akan dilibatkan mulai dari tahap produksi, operasional, perawatan, dan *upgrade* melalui imbal dagang/*offset*, penyertaan kandungan lokal, maupun alih teknologi.

Sementara itu, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia bidang pertahanan yang dibentuk melalui serangkaian pelatihan dan penugasan operasi, baik militer maupun nonmiliter, secara signifikan telah mampu meningkatkan persepsi internasional terhadap kemampuan militer Indonesia, sehingga menjadikan Indonesia semakin diperhatikan dalam kancah politik internasional. Keberhasilan itu ditunjukkan dengan meningkatnya permintaan akan peran Indonesia dalam misi perdamaian dunia dalam operasi militer, seperti yang saat ini telah beroperasi di Lebanon, Haiti, Kongo, Sudan, dan Darfur, termasuk juga operasi pembebasan sandera terhadap pembajakan kapal MV Sinar Kudus milik Indonesia diperairan Somalia. Sedangkan dalam kegiatan operasi nonmiliter yaitu untuk membantu evakuasi warga Indonesia yang mengalami

persoalan keamanan di luar negeri seperti dari Mesir, Arab Saudi, dan Malaysia. Upaya lain peningkatan profesionalisme sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dengan pemberian tunjangan kinerja yang diberikan sejak tahun 2010, walaupun belum memadai namun terus diupayakan agar di masa mendatang prajurit TNI semakin profesional dalam menjalankan tugasnya.

Untuk mewujudkan kemampuan militer Indonesia yang disegani maka pembangunan pertahanan tidak hanya diarahkan pada pembangunan secara fisik seperti pembangunan Alutsista dan profesionalitas sumber daya manusia bidang pertahanan, tetapi juga pembangunan yang bersifat nonfisik, yaitu pembangunan yang lebih ditujukan pada pembangunan mental cinta tanah air melalui pembinaan kesadaran bela negara sesuai dengan yang dijabarkan dalam agenda Trisakti dan Nawacita sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan pertahanan negara kedepan.

c. Isu Strategis.

Selama periode 2010-2014, pembangunan pertahanan telah diupayakan dan berlangsung secara optimal. Upaya tersebut masih terus ditingkatkan dalam rangka mencapai kemampuan pertahanan negara yang tangguh dan disegani di kawasan. Untuk itu dalam rangka penguatan sistem pertahanan periode 2015-2019, sesuai RPJMN 2015-2019 Kemhan memiliki sasaran yang ingin diwujudkan yaitu peningkatan kapasitas pertahanan nasional melalui pembentukan TNI yang profesional dengan memenuhi kebutuhan Alutsista, peningkatan kesejahteraan prajurit dan peningkatan anggaran pertahanan hingga mengarah pemenuhan 1,5 % (satu koma lima persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) sehingga pembangunan kekuatan pertahanan tidak hanya untuk memenuhi MEF, tetapi juga ditujukan untuk membangun TNI sebagai kekuatan maritim regional yang disegani di kawasan Asia Timur. Dengan adanya pemikiran strategis tersebut maka dalam periode 5 (lima) tahun ke depan, Kemhan akan mengusung 2 (dua) isu strategis yaitu peningkatan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional. Adapun sub-sub isu strategis yang menjadi prioritas yaitu:

- 1) Permasalahan alutsista TNI dan pemberdayaan industri pertahanan.

- 2) Kesejahteraan dan profesionalisme prajurit.
- 3) Intelijen dan kontra intelijen.
- 4) Gangguan dan pelanggaran hukum di laut, udara, dan wilayah perbatasan darat.
- 5) Sistem keamanan nasional yang integratif.

Berdasarkan isu strategis dan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan serta konteks strategis objektif yang selalu berubah, maka pembangunan pertahanan diharapkan dapat menghasilkan suatu kekuatan pertahanan yang mampu menyokong visi Indonesia di masa mendatang, yaitu sebagai kekuatan poros maritim dunia dan sebagai kekuatan maritim regional di kawasan Asia Timur sebagaimana visi yang diamanatkan dalam Nawa Cita.

2. Potensi dan Permasalahan

a. Dinamika perkembangan lingkungan dan konteks strategis.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan pembangunan pertahanan akan dihadapkan pada ancaman dan tantangan sebagai akibat dari terjadinya perubahan lingkungan dan konteks strategis baik internal maupun eksternal secara terus menerus. Dalam dimensi global, populasi dunia pada awal tahun 2015 mencapai 7,2 (tujuh koma dua) miliar dan akan mencapai 8,1 (delapan koma satu) milyar pada tahun 2025. Pertumbuhan ini memiliki distribusi yang tidak merata yaitu 60 % (enam puluh persen) di Asia dan 15 % (lima belas persen) di Afrika tetapi jumlah penduduk Afrika berkembang lebih dari 2 (dua) kali percepatan pertumbuhan penduduk Asia. Semakin besarnya pertumbuhan penduduk dunia akan terjadi peningkatan kebutuhan terhadap penggunaan sumber daya alam yang semakin besar yang berarti peningkatan akan energi, air dan makanan, dan lain-lain kebutuhan yang diperlukan manusia. Akibatnya dapat terjadi perebutan kepentingan yang asimetris setiap bangsa dan negara sehingga menimbulkan gesekan, konflik, dan bahkan perang.

Hal ini merupakan fakta empiris bahwa situasi ketidakamanan dunia cenderung meningkat. Isu global yang berpengaruh diantaranya adalah: kompetisi Amerika Serikat dan Tiongkok; menipisnya energi fosil dan meningkatnya penemuan energi *shale oil/gas* seiring dengan penemuan teknologi *fracking* untuk mengeluarkan energi tersebut; keamanan non tradisional seperti penyelundupan narkoba, manusia, dan persenjataan;

persoalan keamanan lingkungan yang terutama ditandai perubahan iklim dunia; terorisme internasional seperti terbentuknya Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS) yang berniat membangun sebuah kekhalifahan; radikalisme yang berkembang di Nigeria oleh organisasi teroris Boko Haram; konflik di Yaman yang memperluas pertentangan Sunni-Syiah; konflik antara Palestina-Israel; perkembangan senjata pemusnah massal; demokratisasi seperti *Arab Spring* yang justru menimbulkan kekacauan kehidupan sosial politik seperti di Mesir, Libya, Yaman, dan Suriah serta ancaman non konvensional seperti serangan siber dalam konteks global yang dapat dirasakan secara umum sejalan dengan kemajuan perkembangan teknologi dan informasi.

Dalam dimensi regional, dengan bergesernya geoekonomi dan geopolitik ke Asia, maka kawasan Asia Pasifik, khususnya di Asia Timur, semakin mengalami peningkatan bobot strategis. Dari sisi pertahanan, di kawasan Asia Pasifik terdapat kekuatan militer terbesar seperti Tiongkok, Korea Utara, dan India, maupun kekuatan militer termmodern seperti Amerika Serikat (AS), Jepang, Korea Selatan dan Singapura. Demikian juga di wilayah ini memiliki potensi masa depan konflik yang berdampak global seperti Laut Tiongkok Selatan (LTS). Dari sekilas pandangan tersebut, sejumlah perkembangan yang akan berpengaruh pada stabilitas keamanan di kawasan dan bahkan dunia yaitu kebijakan penyeimbangan kembali (*rebalancing policy*) AS ke Asia yang berakibat pada revitalisasi kerja sama pertahanan di sejumlah negara Asia Tenggara, Australia, maupun India.

Kebijakan AS tersebut diimplementasikan dengan adanya pergeseran aset militer strategis ke Asia dengan rasio 60:40 (enam puluh berbanding empat puluh) yaitu 60 % (enam puluh persen) di Asia dan 40 % (empat puluh persen) di wilayah lain di dunia. Dalam kaitan tersebut, Australia telah mengizinkan AS untuk menempatkan 2.500 (dua ribu lima ratus) pasukan marinir hingga tahun 2017 di Darwin dan sejumlah aset militer strategis laut dan udara di Darwin, Cocos Island, dan wilayah lain di Australia bagian utara. Kebijakan tersebut, Tiongkok menganggap bahwa kebijakan AS tersebut justru telah mengakibatkan memburuknya situasi keamanan di kawasan. Di sisi lain, kebijakan

penyeimbangan AS dipicu karena kebangkitan ekonomi dan militer Tiongkok yang dicerminkan dengan peningkatan presensi dan penegasan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan seperti adanya reklamasi di pulau-pulau yang dipersengketakan, pembangunan fasilitas militer dan sarana pendukungnya, serta penerapan kebijakan tertentu yang menimbulkan kontroversi bagi negara-negara yang juga memiliki klaim yang sama terhadap kepulauan Spratly dan Paracel.

Di Laut Tiongkok Timur terjadi eskalasi ketegangan di antara Tiongkok dengan Jepang karena persoalan pulau Senkaku dan penerapan *Air Defence Identification Zone* (ADIZ) secara unilateral oleh Tiongkok. Implikasi dengan peningkatan ekonomi Tiongkok telah membuat kemajuan yang pesat dalam industri pertahanan/militer yang ditandai dengan pembangunan kapal induk kedua, rudal hipersonik, pesawat tempur siluman dan pesawat tempur generasi terkini, serta pengembangan kemampuan *Anti-Access/Area Denial* (A2/AD) dan pemanfaatan ruang angkasa untuk kepentingan militer. Kemampuan militer Tiongkok dikaitkan dengan konflik di Laut Tiongkok Selatan berakibat pada situasi yang kurang kondusif di masa mendatang. Sementara itu, di kawasan Asia Tenggara masih terjadi permasalahan perbatasan negara, persoalan demokratisasi, ataupun persoalan separatisme. Perkembangan *Association of South East Asia Nations* (ASEAN) yang akan menjadi sebuah komunitas ASEAN khususnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 berpengaruh langsung terhadap Indonesia dihadapkan pada tantangan keamanan di Asia Tenggara.

Dalam konteks nasional, sebagaimana yang diatur/dimuat dalam Dekrit atau Deklarasi Juanda tahun 1957 yang menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan, dimana konstelasi geografi yang berada pada persilangan 2 (dua) benua menjadikan perairan Indonesia sebagai jalur navigasi dan transportasi laut dan udara bagi dunia internasional. Wilayah laut yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim. Dengan adanya visi Indonesia sebagai poros maritim dunia dan Indonesia sebagai kekuatan maritim di Asia Timur, menjadikan pemikiran geostrategi dan geopolitik Indonesia menemukan kembali relevansinya karena

Indonesia menjadi wilayah interaksi dalam aspek politik, ekonomi, dan bahkan militer yang berarti menjadi ajang pertemuan berbagai arus kepentingan negara-negara yang hadir di kawasan.

Dalam aspek pertahanan, kondisi tersebut mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi terbuka dan sebagai perlintasan sehingga tidak hanya memberikan kekuatan dan bobot strategis tetapi juga rawan terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Indonesia memiliki perbatasan darat dengan 3 (tiga) negara dan berbatasan laut dengan 10 (sepuluh) negara, menjadikan Indonesia rentan terhadap sengketa perbatasan dengan negara tetangga dan ancaman keamanan yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan dalam negeri dan di kawasan.

Sejumlah persoalan dalam dinamika sosial masih terjadi yaitu degradasi ideologi Pancasila, pergeseran nilai sosial dan budaya, situasi rawan narkoba karena saat ini di Indonesia terdapat lebih dari 4 (empat) juta pengguna (pecandu), tantangan politik nasional, pelemahan ekonomi dan pencurian sumber daya alam, potensi konflik horisontal dan vertikal karena berbagai persoalan diantaranya seperti kesenjangan ekonomi antara pendatang dan penduduk lokal, tanah adat/ulayat dihadapkan pada kepentingan negara atau swasta, kesenjangan daerah dan pusat, besarnya potensi bencana alam akibat salah kelola lingkungan, penyalahgunaan teknologi yang dapat mengancam eksistensi dan mengganggu kepentingan negara seperti serangan siber.

Selain itu, sejumlah daerah di Indonesia masih memiliki kerawanan dalam ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme seperti di wilayah Poso di Sulawesi Tengah yang dijadikan wilayah persembunyian dan latihan teroris. Dengan semakin berkembang potensi konflik, dapat dirasakan bahwa situasi pertahanan dan keamanan dalam negeri juga sangat dipengaruhi oleh perubahan situasi keamanan global dan regional. Disadari pula bahwa efek globalisasi yang terjadi dalam konteks ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Dengan adanya pengaruh globalisasi bersifat mengikis prinsip batas teritorial suatu negara, bagi Indonesia dapat menimbulkan hakikat ancaman dan tantangan tersendiri yang menjadi landasan

pemikiran bagi pembangunan pertahanan 5 (lima) tahun ke depan.

b. Hakikat Ancaman.

Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman merupakan faktor utama yang menjadi dasar dalam penyusunan desain sistem pertahanan negara, dalam rangka mencegah dan mengatasi ancaman baik yang bersifat aktual dan potensial. Selanjutnya berdasarkan identifikasi terhadap hakikat ancaman yang sangat dinamis, maka ancaman dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida.

1) Ancaman Militer. Merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi serta dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer antara lain dapat berupa ancaman militer agresi dan ancaman militer berbentuk bukan agresi.

a) Ancaman Militer Agresi. Ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata oleh negara lain untuk melakukan aksi pendudukan sehingga mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer agresi antara lain berupa invasi, pemboman, blokade, serangan bersenjata negara lain, dan keberadaan unsur kekuatan bersenjata asing dalam wilayah Indonesia yang bertentangan dengan perjanjian, tindakan suatu negara yang mengizinkan wilayahnya menjadi daerah persiapan, pengiriman kelompok bersenjata, atau tentara bayaran. Berdasarkan perkembangan lingkungan strategis tersebut ancaman militer agresi dapat terjadi dikarenakan adanya persengketaan dan klaim wilayah antar negara. Salah satu bentuk agresi adalah keberadaan unsur kekuatan bersenjata negara lain dalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian yang telah disepakati.

- b) Ancaman Militer Bukan Agresi. Ancaman Militer Bukan Agresi merupakan ancaman yang dapat menggunakan kekuatan senjata ataupun tidak, dilakukan oleh pihak asing atau warga negara sendiri dan dapat mempengaruhi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Penerapan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer bukan agresi dilakukan dengan pertahanan berlapis disesuaikan dengan skala ancaman yang dihadapi, dengan keterlibatan TNI dilakukan melalui pengerahan kekuatan militer berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Ancaman militer bukan agresi antara lain:

- (1) Pelanggaran Wilayah. Ancaman wilayah dapat berbentuk pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik yang menggunakan kapal maupun pesawat nonkomersial termasuk pelanggaran wilayah perbatasan sebagai akibat kesepakatan batas wilayah yang belum terselesaikan dengan baik. Potensi pelanggaran wilayah perbatasan tersebut dapat terjadi dengan negara tetangga seperti Malaysia, India, Thailand, Papua New Guinea (PNG), Vietnam, Timor Leste, Palau, dan Australia.
- (2) Pemberontakan Bersenjata. Gerakan separatis bersenjata di beberapa wilayah Indonesia yang dilakukan oleh kelompok yang berkeinginan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara melakukan eksploitasi kelemahan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan masih berpotensi terjadi.
- (3) Sabotase terhadap Objek Vital Nasional yang bersifat Strategis. Ancaman terhadap objek vital nasional yang bersifat strategis akan berdampak pada keselamatan segenap bangsa dan mengganggu kepentingan masyarakat. Objek vital nasional yang

bersifat strategis merupakan kawasan, lokasi, bangunan, instalasi dan/atau usaha menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa, serta kepentingan nasional yang apabila terjadi ancaman dan gangguan dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa. Objek vital nasional yang bersifat strategis antara lain: Istana Presiden/Wakil Presiden, kediaman Presiden/Wakil Presiden, bandar udara internasional, pelabuhan internasional, eksplorasi/eksploitasi sumber daya alam, instalasi nuklir, industri biologi dan kimia skala besar, industri pertahanan, industri dan badan keantariksaan, dan perusahaan umum percetakan uang Republik Indonesia.

- (4) Spionase. Ancaman spionase yang dilakukan oleh negara lain masih akan tetap berpotensi terjadi untuk mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara. Negara tersebut akan berusaha mendapatkan informasi strategis untuk menjawab hakikat ancaman dan tantangan terhadap kepentingan nasional.
- (5) Terorisme. Aksi teror bersenjata dilakukan oleh jaringan terorisme internasional yang bekerjasama dengan terorisme dalam negeri bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.
- (6) Gangguan keamanan di laut dan/atau udara. Gangguan keamanan laut dan/atau udara yurisdiksi nasional Indonesia yang dilakukan pihak tertentu dapat berupa: pembajakan atau perompakan, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan peledak, serta bahan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan bangsa, penangkapan ikan secara ilegal atau pencurian kekayaan di laut. Sementara posisi geografi Indonesia yang berada

pada wilayah pelintasan transportasi dunia, membawa implikasi terhadap potensi pelanggaran wilayah udara yang cukup tinggi.

- (7) Konflik Komunal. Konflik komunal merupakan ancaman yang berpotensi akan terjadi karena heterogenitas masyarakat Indonesia dengan keragaman suku bangsa, agama, etnis, golongan, dan kondisi sosial. Selain hal tersebut di Indonesia masih terdapat sejumlah daerah tertinggal yang sebagian besar dikategorikan daerah rawan konflik. Konflik komunal juga dapat disebabkan oleh: masalah sengketa lahan, tuntutan kenaikan upah kerja dan ketidakpuasan masyarakat atas kebijakan publik, serta eksekusi kegiatan politik yang tidak bermartabat.
- 2) Ancaman Non Militer. Ancaman nonmiliter merupakan usaha atau kegiatan tanpa bersenjata yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan dan/atau berimplikasi mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini dapat berasal dari luar negeri atau dapat pula bersumber dari dalam negeri. Ancaman nonmiliter digolongkan ke dalam ancaman yang berdimensi antara lain: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan umum, teknologi, dan legislasi.
 - a) Ancaman berdimensi Ideologi. Ancaman yang berdimensi Ideologi dapat berasal dari dalam dan luar negeri yaitu penetrasi nilai-nilai individualisme dan materialisme yang berusaha mendesak nilai-nilai komunalisme dan spiritualisme serta sifat gotong-royong yang selama ini di kenal oleh masyarakat. Ancaman berdimensi ideologi antara lain kelompok yang mengklaim dirinya pembaharu/perubahan yang lebih baik namun dengan cara tidak konstitusional, kelompok penganut aliran sesat, dan kelompok radikalisme yang melakukan tindakan anarkis dengan berlindung dibalik atribut keagamaan.

- b) Ancaman berdimensi Politik. Ancaman berdimensi politik dapat berasal dari dalam dan luar negeri. Ancaman yang dilakukan oleh negara lain misalnya dengan melakukan tekanan politik dan isu strategis regional dan global. Dapat juga oleh aktor non negara dengan menggunakan isu penegakan dan perlindungan Hak Azasi Manusia, penyelamatan dan kerusakan lingkungan hidup, ataupun penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Sedangkan ancaman dari dalam negeri misalnya menggerakkan dan memobilisasi massa untuk menumbangkan pemerintahan atau menggalang kekuatan politik yang bertujuan untuk melemahkan kekuasaan pemerintah dan berbagai bentuk ancaman yang berdimensi politik lainnya.
- c) Ancaman berdimensi Ekonomi. Ancaman berdimensi ekonomi dari luar negeri bisa berupa embargo atau bentuk penghalang nontarif (*nontariff barrier*), terhadap produk perdagangan, baik untuk kebutuhan ekspor maupun impor utamanya barang kebutuhan strategis. Sementara itu ancaman berdimensi ekonomi dari dalam negeri antara lain inflasi yang tinggi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, ketimpangan pendapatan, terbatasnya sarana dan prasana, distribusi ekonomi yang buruk, korupsi, dan kolusi.
- d) Ancaman berdimensi Sosial budaya. Ancaman berdimensi sosial budaya dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa misalnya: konflik horizontal seperti pertikaian suku, agama, ras, dan antar golongan. Sedangkan pengaruh teknologi informasi yang tidak terkontrol terhadap sublimasi nilai-nilai dari luar sehingga memicu terjadinya benturan peradaban, termasuk dampak peredaran narkoba dan zat adiktif lain yang mengancam generasi muda.
- e) Ancaman berdimensi Keselamatan Umum. Ancaman terhadap keselamatan umum sangat mungkin terjadi akibat bencana, baik bencana alam maupun bencana buatan yang belum dapat diketahui secara pasti. Penanganan terhadap berbagai bencana sebagai rangkaian dalam kegiatan penanggulangan ancaman yang berdimensi keselamatan umum, memperlihatkan bahwa bencana alam dan bencana

sosial merupakan tantangan dan resiko yang akan terus dihadapi dan perlu diantisipasi. Indonesia sering menghadapi berbagai bencana alam diantaranya seperti tsunami, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, kekeringan, tanah longsor, erupsi gunung berapi, dan kebakaran hutan. Sementara bencana sosial yang terjadi diantaranya seperti kerusuhan sosial, konflik sosial, pencemaran lingkungan hidup, dan kegagalan infrastruktur.

- f) Ancaman berdimensi Teknologi. Ancaman ini merupakan dampak kemajuan teknologi di bidang informasi yang selalu berorientasi terhadap bisnis dan mengabaikan aspek moral. Diantaranya seperti program tayangan yang tidak memiliki standar untuk acara yang layak ditonton anak-anak, internet yang tidak dapat dikontrol secara penuh. Sedangkan kejahatan yang memanfaatkan siber antara lain seperti kejahatan perbankan, ekonomi, penyadapan, dan pembajakan hak cipta.
 - g) Ancaman berdimensi Legislasi. Ancaman berdimensi legislasi yaitu ancaman yang terjadi dalam proses pembentukan atau pemaknaan substansi suatu peraturan perundang-undangan sehingga menyebabkan ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Wujud ancaman berdimensi legislasi antara lain seperti adanya upaya pihak-pihak yang ingin mewujudkan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan kepentingannya, dengan cara mengintervensi proses penyusunan peraturan perundang-undangan, melemahkan, tidak mengesahkan ataupun berupaya mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan kepentingannya.
- 3) Ancaman Hibrida. Hakikat ancaman hibrida adalah ancaman yang bersifat campuran yang menggabungkan ancaman militer dan nonmiliter. Ancaman hibrida merupakan kombinasi antara ancaman konvensional, asimetrik, teroris, perang siber, serta kriminal yang beragam dan dinamis. Ancaman hibrida juga dapat berupa keterpaduan serangan

antara penggunaan senjata Kimia, Biologi, Radiasi, Nuklir, dan Eksplosif (KBRNE) serta perang informasi.

Dinamika perkembangan lingkungan strategis secara terbuka telah menciptakan dimensi ancaman yang kompleks dan berubah-ubah baik ancaman militer, nonmiliter, serta hibrida yang dihadapi oleh setiap negara di dunia termasuk Indonesia sebagai konsekuensi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dimensi ancaman tersebut dapat dikategorikan sebagai ancaman nyata dan ancaman tidak nyata. Ancaman yang sedang dan sewaktu-waktu dihadapi seperti terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, wabah penyakit, bencana alam, pelanggaran perbatasan, perompakan, pencurian sumber daya alam, serangan siber, spionase dan penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman nyata yang dapat berpengaruh langsung kepada ketahanan nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan teknologi.

Sementara, Konflik militer terbuka atau perang konvensional yang mengerahkan kekuatan angkatan bersenjata merupakan ancaman belum nyata yang kemungkinan kecil akan terjadi, namun berpotensi menjadi ancaman nyata tergantung eskalasi konflik dan kepentingan nasional masing-masing negara khususnya kepentingan ekonomi serta klaim kedaulatan atas teritorial. Namun demikian, kehadiran ancaman ini harus senantiasa bisa diantisipasi dengan kemampuan pertahanan negara yang handal serta adaptif terhadap dinamika perkembangan lingkungan strategis yang sedang dan akan terjadi. Dalam konteks kepentingan strategis nasional selanjutnya dapat diidentifikasi potensi dan permasalahan sebagai berikut.

c. Potensi dan Peluang.

- 1) Posisi geografis. Posisi silang Indonesia antara 2 (dua) samudera dan 2 (dua) benua seyogyanya dapat menjadikan Indonesia sebagai suatu kekuatan yang dapat mengontrol lalu lintas laut dan udara demi kepentingan nasional apabila Indonesia memiliki sebuah pertahanan yang memiliki daya tangkal yang tinggi dan kredibel sehingga keamanan dan keselamatan lalu lintas pelayaran dan penerbangan dapat dijamin dan dilakukan oleh Indonesia. Dengan posisi strategis yang sangat terbuka dan dengan sumber daya yang besar, maka strategi pertahanan

- dapat selalu dikembangkan secara adaptif sesuai dengan dinamika lingkungan strategis yang berkembang.
- 2) Kebijakan negara tentang visi poros maritim dunia dan sebagai kekuatan maritim di Asia Timur. Visi tersebut memiliki keterkaitan yang erat antara kepentingan ekonomi dan pertahanan. Keberadaan visi ini memberikan peluang untuk membangun dan mengembangkan sistem pertahanan yang mencakup kapasitas dan strategi pertahanan yang sesuai dan memadai dalam mendukung terwujudnya visi tersebut. Untuk dapat menunjang visi tersebut diperlukan suatu sistem pertahanan yang terpadu dan elemennya merupakan integrasi dari kekuatan darat, kekuatan laut, kekuatan udara, serta komunikasi dan informasi yang memanfaatkan ruang siber dan ruang angkasa (satelit). Dengan memiliki perencanaan pembangunan pertahanan secara integratif tersebut diharapkan dalam 5 (lima) tahun mendatang, visi Indonesia sebagai kekuatan maritim regional di Asia Timur telah memiliki fondasi yang kuat untuk dikembangkan lebih lanjut pada 5 (lima) tahun berikutnya. Kebijakan ini akan memicu dan memacu pemikiran strategis mengenai pertahanan secara lebih luas dihadapkan pada lingkungan strategis yang selalu berubah-ubah.
 - 3) Kebangkitan Industri Pertahanan Dalam Negeri. Pembangunan kekuatan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara sangat membutuhkan kemandirian industri pertahanan untuk memenuhi kebutuhan Alutsistanya. Kebangkitan industri pertahanan ditandai dengan diundangkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Undang-Undang ini mengamanatkan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk secara sinergis mewujudkan kebangkitan industri pertahanan melalui program nyata diberbagai kementerian dan pemangku kepentingan. Salah satu kebijakan penting sebagai modalitas utama bahwa setiap pembelian suatu produk dari negara lain harus disertai program alih teknologi dan penyertaan kandungan lokal untuk mempercepat peningkatan kapasitas industri pertahanan dalam negeri. Sejak berlakunya Undang-Undang ini maka ada ketegasan bahwa

- produk yang dihasilkan oleh industri pertahanan dalam negeri akan digunakan untuk kebutuhan TNI. Dengan semakin meningkatnya hubungan kerja sama pertahanan dengan sejumlah negara dapat menjadi salah satu katalisator bagi peningkatan produk hasil produksi pertahanan dalam negeri melalui alih teknologi dan/atau *offset*.
- 4) Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan dukungan anggaran pertahanan. Pada tahun 2014 persentase pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sebesar 5,8% (lima koma delapan persen) dan menempati posisi kedua setelah Tiongkok dalam konteks pertumbuhan global, hal ini mengindikasikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik di dunia. Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik serta tuntutan untuk memenuhi rasa aman dalam menjaga kepentingan nasional, maka dalam 5 (lima) tahun mendatang anggaran pertahanan Indonesia memiliki peluang ditingkatkan menjadi 1,5 % (satu koma lima persen) dari PDB sejalan dengan rencana pemenuhan anggaran pertahanan pada kabinet Kerja tahun 2015-2019. Saat ini anggaran pertahanan Indonesia masih dibawah 1 % (satu persen) dari PDB dan masih dibawah rata-rata anggaran pertahanan negara-negara ASEAN. Dengan peningkatan anggaran pertahanan tersebut maka dalam 5 (lima) tahun kedepan, diharapkan Alutsista Indonesia dapat memenuhi kebutuhan menuju MEF.
 - 5) Peningkatan kerja sama internasional. Dengan pertumbuhan ekonomi nomor 2 (dua) dalam G-20 setelah Tiongkok dan dengan ditunjang sumber daya alam yang besar serta kondisi demografi yang baik, Indonesia memiliki daya tarik yang besar bagi negara-negara besar di dunia. Dalam situasi itu, Indonesia memiliki kesempatan yang besar untuk bekerja sama dengan negara lain, khususnya dengan negara adidaya seperti dengan AS yang telah memiliki *comprehensive partnership* sejak tahun 2010, maupun dengan Tiongkok yang juga memiliki *strategic comprehensive partner ship* sejak tahun 2013. Sebagai negara dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia memiliki potensi untuk dapat mengelola hubungan strategis negara-negara adi daya agar tidak terjebak dalam suatu hubungan yang konfrontatif yang akan merugikan situasi

keamanan di kawasan. Sementara itu untuk mendukung stabilitas keamanan yang kondusif di kawasan, Indonesia perlu tetap meningkatkan peran sentral di ASEAN guna menghindari terjadinya konflik bersenjata di Laut Tiongkok Selatan. Keterlibatan Indonesia secara multilateral yang tidak bisa diabaikan yaitu dengan adanya peran serta pasukan perdamaian Garuda sebagai sebuah bentuk kontribusi global Indonesia dalam menjamin perdamaian dunia.

d. Permasalahan dan Tantangan.

- 1) Basis-basis kekuatan militer merupakan peninggalan masa kolonial. Walaupun telah terjadi pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di seluruh Indonesia, namun dapat diketahui bahwa hampir sebagian besar basis-basis utama/pangkalan militer merupakan hasil peninggalan masa kolonial yang dibangun dengan pertimbangan lingkungan strategis masa tersebut. Dalam 5 (lima) tahun kedepan, lingkungan strategis akan mengalami suatu perubahan yang cukup signifikan terutama dalam mengantisipasi penerapan strategi militer oleh pihak-pihak lawan. Dengan perubahan situasi keamanan strategis tersebut maka diperlukan tinjauan strategis terhadap disposisi kekuatan militer Indonesia.
- 2) Koherensi strategi dan kebijakan pertahanan secara komprehensif. Pertahanan negara mengenal ancaman militer, ancaman non militer dan dengan perkembangan saat ini terjadi ancaman hibrida yang merupakan kombinasi dari keduanya. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 para pemangku kepentingan untuk jenis ancaman tersebut tidak sama. Menyikapi dinamika ancaman yang berbeda-beda tersebut diperlukan sebuah strategi dan kebijakan yang koherensi. Koherensi strategi dan kebijakan antar berbagai pemangku kepentingan masih menjadi sebuah persoalan besar karena setiap pemangku kepentingan cenderung memiliki prioritas yang berbeda dengan lainnya sehingga tujuan bersama tidak tercapai dengan optimal.
- 3) Kapabilitas pertahanan dihadapkan pada letak geografis. Wilayah Indonesia terdiri dari 2/3 (dua per tiga) perairan dan sangat terbuka untuk dilintasi karena berada dalam perlintasan 2 (dua) benua dan jalur pelayaran. Kenyataan tersebut

menjadikan wilayah Indonesia rentan kehilangan potensi ekonomi di laut dan kapabilitas pertahanan Indonesia belum mampu mengontrol maupun menindak pelanggaran yang terjadi. Demikian juga masih banyaknya kejahatan transnasional yang terjadi melalui wilayah Indonesia disebabkan masih rendahnya kehadiran komponen utama, baik dalam bentuk personel maupun aset militer, di seluruh wilayah Indonesia dibanding luas wilayah yang harus dijaga. Situasi ketidakhadiran dalam sebuah wilayah ini dapat berkembang menjadi *ungoverned territory* dan dipandang sebagai *safe haven* bagi para teroris/separatis. Keberadaan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dapat menimbulkan kerawanan mana kala ada negara yang tidak mengakui dan tidak meratifikasi *United Nations Convention on the Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 dan melakukan kegiatan yang bersifat provokatif, seperti insiden Bawean tahun 2003.

- 4) Kesejahteraan prajurit dan profesionalisme. Peningkatan peran TNI secara global dalam misi perdamaian dunia dan meningkatnya ancaman dan gangguan keamanan khususnya di perbatasan darat, laut, dan udara belum berbanding lurus dengan kesejahteraan yang selayaknya melekat. Hadirnya berbagai tuntutan tugas disertai dengan ragam misi yang memiliki spektrum luas antara damai dan perang, prajurit TNI membutuhkan pendidikan dan pelatihan yang lebih komprehensif dan mendalam agar dapat melaksanakan tugas utama secara lebih profesional dan tugas lain di luar kompetensi utamanya. Sementara itu, pangkalan militer masih belum bersifat ramah keluarga (*family friendly*) atau belum memiliki sarana-prasarana sosial, kesehatan, dan pendidikan yang memadai untuk ditinggali bagi sebuah keluarga demikian pula sejumlah pos-pos perbatasan darat dan pos-pos di pulau-pulau terluar belum dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai seperti sarana transportasi, alat perhubungan, akses jalan penghubung untuk pelaksanaan inspeksi, dan alat penjernih air.
- 5) Ragam Alutsista dan *Interoperabilitas*. Alutsista TNI berasal dari berbagai negara yang memiliki filosofi teknologi yang berbeda sehingga berimplikasi pada aspek pemeliharaan,

- pengoperasian, efisiensi, dan efektifitas. Situasi tersebut diantaranya mengakibatkan rendahnya derajat interoperabilitas Alutsista. Akibat rendahnya *interoperabilitas* maka integrasi Alutsista akan mengalami kendala, hal tersebut akan mengganggu jalannya sebuah operasi militer gabungan atau operasi trimatra terpadu.
- 6) Industri Pertahanan. Terbatasnya infrastruktur dasar industri pertahanan dalam negeri khususnya dalam menunjang alih teknologi Alutsista strategis seperti pesawat tempur, kapal selam, atau peluru kendali. Masalah lain adalah masih rendahnya industri pertahanan dalam negeri melakukan investasi dalam pengembangan riset ilmu-ilmu dasar untuk menunjang industri pertahanan. Lokasi industri pertahanan yang saat ini berada terutama di Pulau Jawa juga merupakan sebuah kerawanan karena dengan penempatan tipologi terpusat seperti demikian, apabila dihancurkan, maka tidak akan ada lagi industri pertahanan yang dapat menjamin kelanjutan jalannya perang. Dengan menghadirkan industri pertahanan di wilayah lain di Indonesia tidak saja akan berkontribusi dalam peningkatan indeks pembangunan manusia di pulau-pulau lain, tetapi juga akan meningkatkan *survivabilitas* industri pertahanan dalam mendukung usaha memenangkan perang.
 - 7) Intelijen, Penginderaan, Pengamatan dan Pengawasan. Permasalahan pada bidang ini berakibat pada meningkatnya pelanggaran di wilayah laut, udara, dan perbatasan darat. Beberapa permasalahan diantaranya:
 - a) Dalam konteks penginderaan dan peringatan dini (*early warning*) jumlah radar yang berbasis di darat (*ground based*) yang tergelar saat ini 20 (dua puluh) buah sedangkan idealnya sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah untuk mencakup seluruh wilayah Indonesia. Keterbatasan radar penginderaan tersebut selayaknya dapat ditingkatkan tidak saja dengan jumlah ideal tetapi dengan menempatkan elemen sensor pada platform lain seperti kapal perang, pesawat terbang, pesawat tak berawak, maupun satelit.
 - b) Operasi intelijen strategis masih belum secara efektif dapat mencegah dan membendung terjadinya persoalan

- keamanan nasional dan transnasional yang masuk ke dalam negeri.
- c) Masih lemahnya koordinasi antara komunitas intelijen dan juga soal pembagian/tukar menukar data dan informasi intelijen (*data and information sharing*). Selain itu masih kurangnya integrasi antara intelijen manusia (*human intelligence*), yang memanfaatkan teknologi seperti intelijen sinyal (*signal intelligence*), intelijen elektronik (*electronic intelligence*), maupun intelijen citra/gambar (*imagery intelligence*) secara terkoordinasi dalam suatu kerangka kerja bersama yang melibatkan intelijen di tiap angkatan dan lembaga lainnya seperti persandian dan lembaga yang memiliki kemampuan teknologi komunikasi dan informasi. Integrasi diwujudkan terutama dengan pemanfaatan satelit (komunikasi, *remote sensing*, radar); *airborne system* (pesawat terbang, pesawat tak berawak yang membawa platform ISR (*Intelligence, Surveillance & Recognition*); serta sarana prasarana teknologi informasi/komunikasi (siber).
 - d) Ketiadaan sistem komunikasi militer secara mandiri menjadi salah satu sebab utama masih rentannya informasi jatuh kepada pihak yang tidak seharusnya dan kepada pihak asing. Saat ini Kemhan dan TNI belum memiliki satelit militer tersendiri dalam mendukung tugas dan perannya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pembuatan satelit untuk kebutuhan khusus ini seharusnya dapat dibuat secara mandiri oleh industri pertahanan dalam negeri.
 - e) Terjadinya penyadapan informasi terhadap aktivitas Presiden Republik Indonesia oleh pihak Australia merupakan contoh masih lemahnya kualitas sistem keamanan informasi dan kurangnya pemanfaatan lembaga penyandian serta menunjukkan masih rendahnya kewaspadaan akan proteksi terhadap keamanan informasi.
- 8) Dukungan energi dalam mendukung operasi. Dalam 15 (lima belas) tahun terakhir konsumsi minyak Indonesia meningkat dari sekitar 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) barel per hari (bph) pada tahun 1990-an menjadi 1,5 (satu koma lima) juta bph. Sementara itu

produksi minyak terus turun dari 1,6 (satu koma enam) juta bph pada tahun 1990-an menjadi hanya sekitar 800.000 (delapan ratus ribu) bph pada tahun 2014. Mulai tahun 2005 Indonesia telah menyatakan diri sebagai importir minyak, dan menurut *Indonesian Petroleum Association* (IPA), Indonesia akan menjadi importir minyak terbesar dalam 5 (lima) tahun kedepan. Itu dapat terjadi karena terjadi kesenjangan antara *supply* dan *demand* yang dapat mencapai 2,4 (dua koma empat) sampai dengan 2,5 (dua koma lima) juta bph. Cadangan minyak kita hanya 0.5 % (nol koma lima persen) dari cadangan minyak dunia.

Dengan semakin meningkatnya kuantitas peralatan tempur TNI yang menggunakan BBM dan mendukung kebutuhan operasi TNI dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya maka kebutuhan energi juga semakin meningkat yang berimplikasi kepada anggaran untuk operasional TNI akan semakin tinggi. Dengan ketergantungan energi secara eksternal (impor) akan mempengaruhi kapabilitas daya gerak dan menjadi sebuah titik sensitif dalam rangkaian sistem pertahanan. Dengan demikian strategi penggunaan energi alternatif (*gas* alam, panas matahari, batu bara, bio diesel, kincir angin dan gelombang laut) dan penghematan BBM dalam institusi militer menjadi suatu hal yang krusial dalam masa yang akan datang.

- 9) Diplomasi luar negeri. Perkembangan lingkungan strategis global menunjukkan bahwa konflik intra dan antar negara semakin meningkat. Sementara di sisi lain sejumlah WNI juga ada yang berdomisili di luar negeri. Dalam hal ini Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) sebagai rumah WNI di luar negeri, terutama KBRI di negara-negara yang rawan timbul konflik dan peperangan seperti di Afrika, Timur Tengah saat ini belum memiliki unsur militer yang dapat menjamin kedaulatan wilayah di KBRI dan menjamin keselamatan para WNI yang bekerja di negara rawan konflik tersebut.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI, VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

3. Tugas Pokok dan Fungsi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015, tugas pokok dan fungsi Kemhan sebagai berikut:

- a. Tugas Pokok. Kemhan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
 - b. Fungsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kemhan dan TNI menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan.
 - 2) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.
 - 3) Pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan.
 - 4) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan.
 - 5) Pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan.
 - 6) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan.
 - 7) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan.
 - 8) Pelaksanaan pengelolaan instalasi strategis pertahanan.
 - 9) Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
 - 10) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.
4. Visi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, telah menetapkan visi pembangunan nasional adalah

“ Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Kepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk merealisasikan visi tersebut, telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan dan 9 (sembilan) agenda prioritas Pemerintah (Nawa Cita). Untuk lebih menajamkan pemahaman visi dan misi RPJMN dalam bidang pembangunan pertahanan negara dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai ancaman serta mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan maka visi, misi Kementerian Pertahanan pada Revisi Renstra 2015-2019 mengacu

pada Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/451/M/IV/2018, tanggal 11 April 2018 tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Renstra Kemhan dan TNI Tahun 2015-2019. Adapun visi pertahanan negara adalah **“Terwujudnya Pertahanan Negara yang Tangguh”**.

5. Misi.

Upaya dalam mewujudkan visi pertahanan negara tersebut, misi Kementerian Pertahanan, adalah:

“Mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan”.

6. Tujuan.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Pertahanan Negara, ditetapkan 3 (tiga) tujuan strategis yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan peta strategis pertahanan negara, yaitu:

- a. Menjaga dan melindungi kedaulatan negara.
- b. Menjaga dan melindungi keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Menjaga dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

7. Sasaran.

- a. Terwujudnya sumber daya nasional yang dapat digunakan dalam pertahanan negara.
- b. Terwujudnya sistem pertahanan negara yang terintegrasi.
- c. Terwujudnya kerja sama pertahanan dengan negara sahabat.
- d. Keikutsertaan dalam pasukan perdamaian dunia diberbagai kawasan sebagai wujud dalam menjaga perdamaian dunia.
- e. Terwujudnya kekuatan pokok minimum TNI untuk menghadapi seluruh potensi ancaman yang bersumber dari perkembangan lingkungan strategis nasional, regional, dan global.
- f. Terwujudnya wilayah perbatasan darat serta wilayah yurisdiksi laut dan udara yang bebas dari pelanggaran kedaulatan negara.
- g. Terwujudnya industri pertahanan dalam negeri guna pemenuhan alat peralatan pertahanan (Alpalhan) dan mendukung produksi alat peralatan yang menunjang perekonomian nasional dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

8. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.

Sesuai dengan penugasan yang diberikan Pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, penyelenggaraan pertahanan negara diarahkan dalam upaya pencapaian visi, misi, dan agenda pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional. Sasaran pokok pembangunan nasional untuk pertahanan negara diarahkan pada tercapainya pemenuhan kekuatan pokok *Minimum Essential Force* (MEF) dan kontribusi industri pertahanan dalam negeri terhadap pemenuhan MEF. Dengan mengacu pada sasaran tersebut, maka sasaran bidang pertahanan yang merupakan prioritas yang hendak dicapai adalah untuk terpenuhinya Alutsista TNI yang didukung industri pertahanan, meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit, menguatnya intelijen dan kontra intelijen, menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan, dan terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegrasi. Arah, kebijakan, dan strategi yang ditempuh dalam rangka pencapaian sasaran tersebut sebagai berikut:

a. Arah Kebijakan.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan bidang pertahanan tahun 2015-2019 maka arah kebijakan pembangunan bidang pertahanan dengan:

- 1) Terpenuhinya Alutsista TNI yang didukung industri pertahanan, ditempuh dengan:
 - a) Melanjutkan pemenuhan MEF.
 - b) Meningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan.
 - c) Meningkatkan kontribusi industri pertahanan bagi Alutsista TNI.
 - d) Peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi industri pertahanan.
- 2) Meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit, ditempuh dengan:
 - a) Meningkatkan fasilitas perumahan dinas prajurit.
 - b) Meningkatkan kualitas serta kuantitas pendidikan dan pelatihan prajurit TNI.
- 3) Menguatnya intelijen dan kontra intelijen, ditempuh dengan:
 - a) Pemantapan peran Intelijen TNI dan peningkatan koordinasi antar institusi Intelijen Negara.

- b) Pemantapan efektivitas operasi intelijen melalui peningkatan profesionalisme personel dan modernisasi peralatan Intelijen Negara.
- 4) Menguatnya keamanan laut, keamanan udara, dan daerah perbatasan, ditempuh dengan:
 - a) Meningkatkan pengawasan dan penjagaan, serta penegakan hukum di laut, udara, dan daerah perbatasan.
 - b) Meningkatkan sarana dan prasarana pengamanan laut, udara, dan daerah perbatasan.
 - c) Meningkatkan sinergitas pengamanan laut, udara, dan daerah perbatasan.
 - 5) Terbangunnya sistem keamanan nasional yang integratif, ditempuh dengan:
 - a) Melakukan pendekatan keamanan yang komprehensif yang diukur dengan indeks ketahanan nasional.
 - b) Meningkatkan koordinasi antar institusi pertahanan dan keamanan dengan institusi lainnya.
- b. Strategi.
- Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan bidang pertahanan Tahun 2015-2019 maka strategi kebijakan pembangunan bidang pertahanan yang akan dilaksanakan dengan:
- 1) Terpenuhinya Alutsista TNI yang didukung industri pertahanan, dilaksanakan melalui:
 - a) Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan (Alpalhan) TNI.
 - b) Peningkatan kesiapan Alutsista TNI Tahun 2015-2019 (selaras dengan peningkatan jumlah Alutsista yang akan tiba).
 - c) Peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri (produksi Alutsista dan pemeliharaan).
 - d) Peningkatan kolaborasi penelitian dan pengembangan serta perekayasaan antara lembaga Litbang Pemerintah – Perguruan Tinggi – Industri.
 - 2) Meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit, ditempuh melalui:
 - a) Peningkatan jumlah fasilitas perumahan prajurit.
 - b) Menetapkan regulasi tentang perumahan negara.

- c) Melakukan kerja sama antar Kementerian dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait pembangunan fasilitas perumahan negara.
 - d) Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dan latihan prajurit TNI.
- 3) Menguatnya intelijen dan kontra intelijen, dilaksanakan dengan:
- a) Pengembangan sistem jaringan *intelligence data sharing* antar institusi intelijen negara.
 - b) Peningkatan koordinasi fungsi intelijen TNI dengan intelijen negara lainnya dalam memberikan layanan data/informasi kepada Presiden.
 - c) Peningkatan profesionalisme personel dan modernisasi peralatan intelijen.
- 4) Menguatnya keamanan laut, udara, dan daerah perbatasan, ditempuh melalui kegiatan:
- a) Meningkatkan sarana prasarana dan kegiatan operasi pengamanan dan keselamatan di laut, udara, dan wilayah perbatasan, termasuk peningkatan kapasitas peralatan *surveillance* keamanan laut.
 - b) Menambah pos pengamanan perbatasan darat.
 - c) Memperkuat kelembagaan keamanan laut, termasuk peningkatan koordinasi dan pemantapan Komando Keamanan Laut.
 - d) Intensifikasi dan ekstensifikasi operasi keamanan dan keselamatan di wilayah laut yurisdiksi nasional, termasuk di area poros maritim dan tol laut.
- 5) Terbangunnya sistem keamanan nasional yang integratif, dilaksanakan dengan cara:
- a) Pembentukan Pertahanan Integratif.
 - b) Pembentukan Dewan Keamanan Nasional.
 - c) Pemutakhiran sistem informasi keamanan nasional.
 - d) Perumusan kebijakan keamanan nasional strategis, krusial, dan mendesak.
 - e) Pengendalian dan pemantauan keamanan nasional.
 - f) Pendidikan bela negara.

Kementerian Pertahanan dalam penyelenggaraan pertahanan negara berkomitmen mendukung program pemerintah dalam pembangunan daerah untuk meraih kemajuan, meningkatkan kemandirian, dan

memperkuat daya saing sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Hal ini sebagai implementasi visi dan misi Presiden Republik Indonesia 2014-2019, khususnya misi keempat: Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; misi kelima: Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; dan misi keenam: Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

Selain itu, komitmen untuk mengembangkan wilayah dan memajukan daerah juga dipertegas dalam agenda prioritas Pemerintah atau Nawacita. Misi dan agenda prioritas tersebut menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan nasional bagi pengembangan wilayah yang menjadi bagian integral dari agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui kementerian/lembaga (termasuk Kementerian Pertahanan).

Pengembangan wilayah yang terkait dengan bidang pertahanan didasarkan pengembangan wilayah perbatasan dan pengembangan kawasan strategi nasional di 7 (tujuh) wilayah pembangunan, yaitu: Wilayah Papua (Jayapura), Wilayah Maluku (Saumlaki), Wilayah Nusa Tenggara (Atambua), Wilayah Sulawesi (Tahuna), Wilayah Kalimantan (Entikong, Paloh, Nanga Badau, Tarakan, Nunukan), Wilayah Jawa-Bali dan Wilayah Sumatra (Sabang, Ranai). Arah kebijakan dalam pengembangan wilayah, khususnya kawasan perbatasan dengan mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman.

Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan dilaksanakan melalui pendekatan keamanan (*security approach*), dan pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*). Di bidang pertahanan negara, strategi pengembangan kawasan perbatasan dilaksanakan melalui:

- 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas serta standarisasi sarana-prasarana pengamanan perbatasan laut dan darat yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengamankan batas dan kedaulatan negara;
- 2) Peningkatan kerja sama pertahanan dengan negara tetangga dalam pengamanan wilayah perbatasan.

9. Arah Kebijakan dan Strategi Kemhan dan TNI.

Mengacu pada sasaran yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2015-2019 serta dengan mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan yang akan dihadapi maka pembangunan pertahanan negara diselenggarakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019. Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 diarahkan dalam upaya memberdayakan seluruh kekuatan serta kemampuan komponen bangsa secara konsisten dalam pertahanan negara guna mewujudkan tercapainya tujuan nasional.

a. Pokok-pokok kebijakan umum Pertahanan Negara meliputi:

1) Kebijakan Pembangunan Pertahanan Negara.

Pembangunan pertahanan negara diperlukan untuk membangun kekuatan pertahanan tangguh yang memiliki kemampuan penangkalan sebagai negara kepulauan dan negara maritim sehingga Indonesia memiliki posisi tawar dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Pembangunan pertahanan negara baik pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter diselenggarakan secara terpadu dengan mengacu pada sistem pertahanan negara yang bersifat semesta yang diarahkan pada:

a) Pembangunan postur pertahanan negara untuk mewujudkan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter menuju kekuatan maritim regional yang disegani di kawasan Asia Timur dengan prinsip defensif aktif dalam rangka menjamin kepentingan nasional. Usaha pertahanan negara diselenggarakan melalui pembangunan postur pertahanan negara secara berkesinambungan untuk mewujudkan kekuatan, kemampuan, dan gelar. Pembangunan postur pertahanan militer diarahkan pada pemenuhan Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force*, MEF) komponen utama dan menyiapkan komponen pertahanan lainnya. Sedangkan pembangunan postur pertahanan nirmiliter diprioritaskan pada peningkatan peran K/L dalam menghadapi ancaman, dan kemampuan pengelolaan sumber daya nasional serta sarana prasarana nasional sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung kepentingan pertahanan negara.

- b) Pembangunan sistem pertahanan negara yang terintegrasi terdiri atas pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter diarahkan untuk mensinergikan dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi koordinasi dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
- c) Pembangunan kelembagaan pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter diselenggarakan guna mewujudkan kekuatan yang terintegrasi dalam pengelolaan pertahanan negara melalui penguatan, dan penataan ulang, serta restrukturisasi kelembagaan, sebagai berikut:
 - (1) Pembentukan instansi vertikal Kementerian Pertahanan di daerah, sebagai upaya dalam membangun sumber daya nasional secara lebih komprehensif dan lebih tertata untuk kepentingan pertahanan negara.
 - (2) Menata kembali unsur Kementerian Pertahanan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan organisasi internasional, dalam rangka optimalisasi fungsi yang mampu menjalankan diplomasi pertahanan negara secara luas dan terkoordinasi.
 - (3) Pembangunan sistem keamanan nasional yang terintegrasi dengan sistem pertahanan negara dalam rangka kapasitas pertahanan.
 - (4) Penguatan kapasitas lembaga intelijen dan kontra intelijen untuk pertahanan negara, termasuk pengembangan pertukaran informasi antar K/L dalam rangka peningkatan kemampuan deteksi dini dan cegah dini.
 - (5) Pembentukan lembaga lainnya yang terkait dengan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter ditujukan untuk efektivitas, efisiensi, dan responsibilitas institusional dalam menghadapi kemungkinan ancaman yang berimplikasi pada stabilitas nasional.
- d) Pembangunan wilayah pertahanan diarahkan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan dan negara maritim yang mandiri, maju, kuat dengan berbasiskan pada kepentingan nasional. Pembangunan

tersebut diselenggarakan secara terintegrasi antara unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui penataan ruang wilayah nasional/daerah dengan tata ruang wilayah pertahanan untuk mewujudkan ruang pertahanan negara yang tangguh.

- e) Pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan yang merupakan halaman depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diarahkan pada usaha pengembangan kawasan dan daerah tertentu yang meliputi:
 - (1) Pengintegrasian peran dan fungsi K/L dan pemerintah daerah dengan memaksimalkan peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan secara terpadu.
 - (2) Optimalisasi upaya diplomasi secara bilateral dan/atau multilateral dengan mengedepankan penyelesaian masalah perbatasan secara damai bersama negara tetangga.
- f) Pembangunan teknologi serta sistem informasi dan komunikasi bidang pertahanan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sistem informasi pertahanan negara termasuk pertahanan siber yang dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, dan terintegrasi dalam pengelolaan pertahanan negara. Pengembangan teknologi dilakukan melalui penelitian dan pengembangan serta alih teknologi secara terpadu termasuk pemanfaatan teknologi satelit nasional yang melibatkan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah, perguruan tinggi, dan industri yang terkait dengan bidang pertahanan negara.
- g) Pembangunan di bidang kerja sama internasional diarahkan pada peningkatan kerja sama pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara bilateral maupun multilateral, mengacu pada kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Bentuk kerja sama internasional dikembangkan untuk membangun rasa saling

pengertian (*Confidence Building Measures/CBM*), pembangunan kapasitas (*capacity building*), ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia, pendidikan dan pelatihan, serta upaya diplomasi sesuai dengan kebijakan pemerintah.

- h) Pembangunan industri pertahanan dilakukan untuk mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Pembangunan tersebut ditujukan dalam rangka mewujudkan kemandirian pertahanan negara guna memenuhi kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan (Alpalhan) dan mendukung produksi alat peralatan yang menunjang perekonomian nasional. Kemandirian pertahanan negara diwujudkan melalui pengembangan industri pertahanan nasional dan diversifikasi kerja sama pertahanan serta peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi industri pertahanan. Untuk pengadaan Alpalhan dari luar negeri, industri pertahanan dilibatkan melalui imbal dagang alih teknologi, *offset*, dan/atau kandungan lokal.
 - i) Pembangunan karakter bangsa sebagai bagian dari revolusi mental, diselenggarakan melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap Warga Negara Indonesia untuk menyiapkan sumber daya manusia pertahanan negara, serta penguatan jati diri bangsa yang berkepribadian dan berkebudayaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kebijakan Pemberdayaan Pertahanan Negara.

Pemberdayaan pertahanan negara diarahkan untuk memelihara dan mengembangkan seluruh kekuatan dan potensi pertahanan negara secara terpadu dan terarah yang melibatkan seluruh warga negara, pemanfaatan seluruh sumber daya nasional dan sarana prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara untuk selalu siap operasional. Pemberdayaan pertahanan negara juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan secara terintegrasi guna menghadapi situasi kontijensi dan eskalasi ancaman sebagai dampak dari dinamika perkembangan lingkungan strategis. Usaha pemberdayaan pertahanan negara meliputi:

- a) Pemberdayaan Pertahanan Militer.
 - (1) Pemberdayaan pertahanan militer bertumpu pada TNI sebagai komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Pemberdayaan tersebut diselenggarakan dengan memantapkan kebijakan strategis, memelihara dan meningkatkan kemampuan TNI, membina kekuatan TNI secara proporsional, serta menata gelar TNI secara seimbang. Penyelenggaraan disesuaikan dengan karakteristik geografi Indonesia guna menghadapi ancaman secara berkesinambungan dalam kerangka Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dengan mengacu pada Trimatra Terpadu.
 - (2) K/L dan pemerintah daerah disiapkan dan ditata untuk mendukung pertahanan militer.
- b) Pemberdayaan Pertahanan Nirmiliter dilaksanakan melalui:
 - (1) Peningkatan kapasitas, sinergi, dan peran K/L sebagai unsur utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter, didukung K/L lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya serta unsur lain dari kekuatan bangsa.
 - (2) TNI dipersiapkan sebagai unsur lain kekuatan bangsa secara terpadu untuk mendukung K/L dan pemerintah daerah dalam pertahanan nirmiliter.
- c) Pemberdayaan potensi pertahanan diselenggarakan secara terpadu dengan menyinergikan fungsi K/L dan pemerintah daerah dalam membina sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana prasarana nasional, nilai-nilai, teknologi, dan dana serta sinkronisasi penataan wilayah pertahanan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional untuk disiapkan menjadi kekuatan pertahanan negara.
- d) Pemberdayaan bidang kerja sama internasional diarahkan bagi terwujudnya kawasan yang damai dan stabil melalui kerja sama dengan negara tetangga dan

upaya bersama antar negara yang memiliki pengaruh penting bagi kawasan.

- e) Pemberdayaan industri pertahanan diarahkan pada pengembangan industri nasional untuk memiliki kemampuan dalam mendukung industri pertahanan guna pemenuhan Alpalhan.
 - f) Peningkatan kesadaran bela negara di lingkungan K/L dan pemerintah daerah, baik terhadap unsur utama maupun unsur lain kekuatan bangsa, dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas dan sinergitas kekuatan dalam menghadapi ancaman guna mendukung pertahanan negara.
- 3) Kebijakan Pengerahan Kekuatan Pertahanan Negara.

Pengerahan kekuatan pertahanan negara yang meliputi kekuatan pertahanan militer dan kekuatan pertahanan nirmiliter, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menghadapi ancaman pertahanan negara dan kondisi tertentu untuk kepentingan nasional, sebagai berikut:

- a) Menghadapi ancaman militer, pengerahan kekuatan pertahanan militer diselenggarakan dengan menempatkan TNI sebagai komponen utama yang didukung komponen cadangan dan komponen pendukung.
- b) Menghadapi ancaman nonmiliter, pengerahan kekuatan pertahanan nirmiliter diselenggarakan dengan menempatkan K/L di luar bidang pertahanan dan pemerintah daerah sebagai unsur utama didukung oleh TNI dan unsur lain dari kekuatan bangsa. Unsur utama dimaksud adalah K/L dan pemerintah daerah yang menangani urusan bidang sesuai ancaman nonmiliter yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan umum, teknologi, dan legislasi.
- c) Menghadapi ancaman hibrida, dihadapi dengan pola pertahanan militer, dengan kekuatan pertahanan nirmiliter yang diformasikan dalam komponen pendukung sesuai dengan hakikat dan eskalasi ancaman hibrida yang timbul.
- d) Pengerahan kekuatan pertahanan negara dalam melaksanakan tugas perdamaian dunia, diselenggarakan

oleh TNI dan K/L sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya dalam misi perdamaian dunia berdasarkan mandat dari Dewan Keamanan PBB atau lembaga internasional sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia.

- e) Pengerahan kekuatan pertahanan negara dalam menghadapi kondisi tertentu untuk kepentingan nasional, diselenggarakan oleh TNI dan unsur pertahanan nirmiliter.
- 4) Kebijakan Regulasi.

Kebijakan regulasi di bidang pertahanan diarahkan pada percepatan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang selaras dalam Program Legislasi Nasional melalui pengesahan rancangan undang-undang yang didelegasikan oleh Undang-Undang tentang Pertahanan Negara yaitu, Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang tentang Veteran, Undang-Undang tentang Industri Pertahanan, dan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer, maupun yang dibentuk karena kebutuhan, termasuk undang-undang yang merupakan bagian dari daftar kumulatif terbuka dalam rangka ratifikasi perjanjian internasional bidang pertahanan.

- 5) Kebijakan Anggaran.

Kebijakan anggaran pertahanan negara diarahkan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pertahanan negara meliputi:

- a) Peningkatan anggaran untuk pencapaian tujuan strategis pertahanan negara mempedomani prioritas dan sasaran bidang pertahanan, serta tugas-tugas sesuai dengan rencana strategis pertahanan negara.
- b) Dukungan anggaran pertahanan nirmiliter disediakan masing-masing K/L dan pemerintah daerah yang digunakan untuk pembangunan, pemberdayaan, dan pengerahan kekuatan pertahanan nirmiliter sesuai dengan rencana strategis K/L dan pemerintah daerah yang selaras dengan kepentingan pertahanan negara.
- c) Tersedianya anggaran di tingkat pusat dan tingkat daerah untuk memenuhi kebutuhan penanganan keadaan darurat dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

6) Kebijakan Pengawasan.

Fungsi pengawasan diselenggarakan melalui pengawasan internal dan eksternal baik dalam penyelenggaraan pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter. Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta peraturan perundang-undangan, yang diarahkan pada pengawasan terhadap penyelenggaraan pertahanan negara dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan menjamin akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Dalam 5 (lima) tahun mendatang, Kemhan dan TNI berkewajiban mendukung pelaksanaan RPJMN Tahun 2015-2019 yang telah memuat visi dan misi Kabinet Kerja selaras dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional yang menjadi tugas dan tanggung jawab di bidang pertahanan. Dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional yang dituangkan ke dalam RPJMN 2015-2019, Kemhan dan TNI harus menjalankan tugas dan fungsinya selaku penyelenggara fungsi pertahanan negara dalam pemerintahan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sasaran strategis Kemhan dan TNI yang ditetapkan, telah mencakup keseluruhan program dan kegiatan prioritas nasional maupun bidang, termasuk program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kemhan dan TNI seperti: Penguatan Sistem Pengamanan Informasi Pertahanan Negara berbasis Pertahanan Siber, Kesadaran Bela Negara dengan wawasan kebangsaan sebagai gerakan nasional/revolusi mental dan moral di bidang pertahanan, konsep sabuk pengamanan (*security belt*) secara terpadu dalam rangka peningkatan pengamanan wilayah perbatasan darat, pengadaan Alutsista yang dapat digunakan dalam menghadapi ancaman bencana alam seperti pengadaan helikopter CH-47 Chinook, pesawat amfibi dan peralatan dalam rangka penanggulangan pasca bencana dan penambahan kekuatan Peralatan Satuan Zeni.

Berdasarkan sasaran maupun penugasan yang telah ditentukan, selanjutnya ditetapkan arah kebijakan dan strategi pertahanan negara dalam rangka pengelolaan seluruh sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung perwujudan keberhasilan agenda pembangunan nasional. Arah kebijakan dan strategi yang tepat diharapkan dapat mewujudkan rencana pembangunan yang berkualitas serta dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan

nasional. Kebijakan pertahanan negara diarahkan pada pencapaian pembangunan sistem pertahanan negara yang tangguh yang didukung oleh kemandirian industri pertahanan serta semangat bela negara.

b. Arah Kebijakan dan Strategi

1) Terwujudnya sumber daya nasional yang dapat digunakan dalam pertahanan negara.

a) Arah kebijakan.

(1) Penguatan kapasitas pembinaan potensi sumber daya nasional dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan yang terintegrasi dalam menghadapi setiap ancaman.

(2) Pengembangan konsep pemberdayaan potensi sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara.

b) Strategi.

(1) Penyelenggaraan pembinaan terhadap seluruh potensi sumber daya nasional guna meningkatkan kemampuan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman.

(2) Menyusun RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara.

2) Terwujudnya sistem pertahanan negara yang terintegrasi.

a) Arah kebijakan.

(1) Meningkatkan tata kelola kelembagaan yang diselenggarakan secara profesional dan didukung dengan peralatan yang modern serta terintegrasi dengan baik dan bersinegi dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

(2) Memantapkan efektivitas operasional dan meningkatkan koordinasi antar institusi kelembagaan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

(3) Merumuskan kebijakan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara guna mendukung visi misi dan program prioritas pemerintahan kabinet kerja (Nawacita).

(4) Terwujudnya sistem keamanan nasional yang terintegrasi dengan sistem pertahanan negara guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi gelar kekuatan TNI.

- b) Strategi.
 - (1) Peningkatan profesionalisme dalam manajemen kelembagaan yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan kelembagaan.
 - (2) Pengembangan sistem jaringan intelijen dan sistem informasi yang akurat, terkini, dan *real time*.
 - (3) Penguatan Sistem Pengamanan Informasi Pertahanan Negara berbasis pertahanan siber (*cyber defence*).
 - (4) Percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) di bidang pertahanan negara, terutama RUU Keamanan nasional, RUU Pengelolaan Sumber daya Nasional Pertahanan Negara, RUU Rahasia Negara, RUU TNI, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 3) Terwujudnya kekuatan pokok minimum TNI untuk menghadapi seluruh potensi ancaman yang bersumber dari perkembangan lingkungan strategis nasional, regional, dan global.
 - a) Arah kebijakan.
 - (1) Melanjutkan pemenuhan MEF.
 - (2) Meningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan.
 - b) Strategi.
 - (1) Penyelenggaraan pengadaan Alutsista MEF.
 - (2) Peningkatan kesiapan Alutsista TNI Tahun 2015-2019 (selaras dengan peningkatan jumlah Alutsista yang akan tiba).
 - (3) Penambahan perumahan dinas dan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan.
 - (4) Melakukan kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat.
 - (5) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan prajurit.
 - (6) Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung keperluan Alutsista/Non Alutsista TNI.
- 4) Terwujudnya wilayah perbatasan darat serta wilayah yurisdiksi laut dan udara memiliki batas yang jelas dan bebas dari pelanggaran kedaulatan negara.
 - a) Arah kebijakan.

- (1) Memperkuat penetapan garis batas wilayah melalui survei, pemotretan, dan pemetaan.
 - (2) Meningkatkan pengawasan dan penjagaan serta penegakan hukum di laut, udara nasional dan daerah perbatasan.
 - (3) Meningkatkan kapasitas kekuatan pertahanan negara dalam rangka peningkatan pengamanan maritim, dirgantara dan pengamanan daerah perbatasan.
 - (4) Meningkatkan sinergitas antar institusi dalam pengamanan daerah perbatasan.
- b) Strategi.
- (1) Menyelesaikan penataan garis batas maritim dan wilayah udara nasional serta wilayah perbatasan darat secara yang jelas dengan negara tetangga.
 - (2) Menyelenggarakan operasi pengamanan dan keselamatan di seluruh wilayah perbatasan laut dan darat serta wilayah udara dalam rangka mendukung pembangunan *security belt*.
 - (3) Menambah maupun meningkatkan pos-pos perbatasan darat maupun pulau-pulau kecil terluar (termasuk pos-pos pengamanan laut).
 - (4) Intensifikasi dan ekstensifikasi operasi bersama.
- 5) Terwujudnya kerja sama pertahanan dengan negara sahabat.
- a) Arah kebijakan.
- (1) Menata kembali kerja sama pertahanan yang bebas dan aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim.
 - (2) Memperkuat diplomasi melalui kerja sama pertahanan untuk kepentingan nasional dan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan pertahanan yang dibangun dengan prinsip saling percaya dan saling pengertian.
- b) Strategi.
- (1) Evaluasi pelaksanaan kerja sama pertahanan dan penyusunan Buku Biru kerja sama pertahanan yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim dan membenahan pelaksanaan

- kebijakan dalam kerja sama pertahanan yang saling menjunjung hak dan kedaulatan masing-masing.
- (2) Mendorong kerja sama pertahanan yang dapat menumbuhkan saling percaya dan pengertian dengan mengedepankan kepentingan nasional dan saling menguntungkan dalam peningkatan kemampuan pertahanan negara.
- 6) Keikutsertaan dalam pasukan perdamaian dunia di berbagai kawasan sebagai wujud dalam menjaga perdamaian dunia.
- a) Arah kebijakan.
- Meningkatkan peran dan kontribusi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia melalui pengiriman pasukan yang profesional dan didukung perlengkapan serta sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan permintaan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- b) Strategi.
- (1) Pembentukan pasukan perdamaian melalui pendidikan dan latihan yang berlanjut melalui Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP).
 - (2) Memberikan pelatihan kepada negara lain dan ikut merumuskan penyelesaian konflik yang terjadi disuatu kawasan.
- 7) Terwujudnya industri pertahanan dalam negeri guna pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan (Alpalhan) dan mendukung produksi alat peralatan yang menunjang perekonomian nasional.
- a) Arah kebijakan.
- (1) Melanjutkan Pemenuhan MEF dengan memberdayakan industri pertahanan.
 - (2) Meningkatkan kerja sama industri pertahanan baik dalam negeri maupun luar negeri.
 - (3) Meningkatkan pengembangan teknologi industri pertahanan.
 - (4) Meningkatkan pemanfaatan *offset* dan alih teknologi pada setiap pengadaan Alpalhankam dari luar negeri.
- b) Strategi.

- (1) Pengadaan Alpalhan TNI yang didukung industri pertahanan.
- (2) Pengadaan Alpalhan dari luar negeri yang tidak mampu dipenuhi industri pertahanan dilakukan dengan mengikutsertakan industri pertahanan dan kewajiban dalam alih teknologi.
- (3) Peningkatan produk prototipe alpalhan.
- (4) Peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri (produksi Alutsista dan pemeliharaan).

c. Program dan Kegiatan.

Program dan Kegiatan Kemhan dan TNI dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) program dan 200 (dua ratus) kegiatan terdiri atas:

1) Kemhan.

a) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Organisasi Kemhan.

- (1) Pengelolaan Sistem Informasi Pertahanan Negara Pelayanan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan.
- (2) Pelayanan Bantuan Hukum Pertahanan.
- (3) Pelayanan Rehabilitasi dan Perumahsakitkan.
- (4) Dukungan Pelayanan Umum Unit Organisasi Kemhan.
- (5) Dukungan Peningkatan Sarpras Aparatur Unit Organisasi Kemhan.
- (6) Dukungan Pembinaan dan Pengelolaan Pegawai Unit Organisasi Kemhan.
- (7) Dukungan Perencanaan dan Penganggaran Program Kerja Unit Organisasi Kemhan.
- (8) Dukungan Administrasi dan Pelayanan Pimpinan Unit Organisasi Kemhan.
- (9) Pelayanan Komunikasi Publik.

b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemhan.

- (1) Pengelolaan Barang Milik Negara.
- (2) Kelaikan Sarana Pertahanan.
- (3) Kodifikasi Materiil Pertahanan.
- (4) Pengadaan Jasa Konstruksi Pertahanan.
- (5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertahanan di Wilayah Perbatasan.
- (6) Pengadaan Barang dan Jasa Militer PLN/KE.

- (a) Rupiah Murni Pendamping (uang muka KE).
- (b) PLN/KE.
- (7) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Baranahan Kemhan.
- c) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemhan.
 - (1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kemhan.
 - (2) Pengawasan Umum Kemhan/TNI.
 - (3) Pengawasan Pengadaan Kemhan/TNI.
 - (4) Pengawasan Keuangan Kemhan/TNI.
 - (5) Pengawasan Logistik Kemhan/TNI.
- d) Penelitian dan Pengembangan Kemhan.
 - (1) Penelitian dan Pengembangan Strategi Pertahanan.
 - (2) Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan.
 - (3) Penelitian dan Pengembangan Iptek Pertahanan.
 - (4) Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan.
 - (5) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Balitbang Kemhan.
- e) Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemhan.
 - (1) Pendidikan dan Pelatihan Bahasa.
 - (2) Pendidikan dan Latihan Manajemen Pertahanan.
 - (3) Pendidikan Pelatihan Teknis Fungsional dan Pertahanan.
 - (4) Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pertahanan.
 - (5) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Badiklat Kemhan.
 - (6) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara.
- f) Strategi Pertahanan.
 - (1) Analisis Strategis.
 - (2) Perumusan Kebijakan Strategis dan Kebijakan Implementatif.
 - (3) Kerja Sama Internasional.
 - (4) Perumusan Kebijakan Pengerahan Komponen Pertahanan Negara.

- (5) Perumusan Legislasi Pertahanan Negara.
 - (6) Pengelolaan Wilayah Pertahanan.
 - (7) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Ditjen Strahan Kemhan.
 - g) Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan.
 - (1) Administrasi Pelaksanaan Anggaran.
 - (2) Pengendalian Program dan Anggaran.
 - (3) Perencanaan Pembangunan Pertahanan.
 - (4) Perencanaan Program dan Anggaran.
 - (5) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Ditjen Renhan Kemhan.
 - h) Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan.
 - Produksi Alutsista Dalam Negeri dan Pengembangan Penak Industri Pertahanan.
 - (a) Rupiah Murni.
 - (b) Pinjaman Dalam Negeri (PDN).
 - i) Potensi Pertahanan.
 - (1) Pembinaan Keveteranan.
 - (2) Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
 - (3) Pembentukan dan Pembinaan Komponen Cadangan.
 - (4) Penataan dan Pembinaan Komponen Pendukung.
 - (5) Pembinaan Potensi Teknologi dan Industri Pertahanan.
 - (6) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Ditjen Pothan Kemhan.
 - j) Kekuatan Pertahanan.
 - (1) Pembinaan Fasilitas dan Jasa Pertahanan.
 - (2) Pembinaan Kesehatan Pertahanan.
 - (3) Pembinaan Materiil Pertahanan.
 - (4) Pembinaan Personel/Sumber Daya Manusia Pertahanan.
 - (5) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Ditjen Kuathan Kemhan.
 - k) Pembinaan Instalasi Strategis Nasional.
 - (1) Pembinaan Pengamanan dan Pemeliharaan.
 - (2) Pembinaan Pengembangan dan Kerja Sama.
 - (3) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Pembinaan Instalasi Strategis Nasional.
- 2) Mabes TNI.

- a) Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif.
 - (1) Penyelenggaraan Administrasi dan Perawatan Personel Integratif.
 - (2) Penyelenggaraan Operasional Perkantoran.
 - (3) Penyelenggaraan Pemeliharaan/Perawatan Perkantoran Integratif.
 - (4) Perawatan Sarana dan Prasarana.
 - (5) Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Integratif.
 - b) Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif.
 - (1) Operasi Militer Untuk Perang (OMP).
 - (2) Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
 - (3) Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi.
 - (4) Operasi Intelijen Strategis.
 - (5) Operasi SAR TNI.
 - (6) Operasi Bantuan TNI.
 - (7) Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan.
 - (8) Pemeliharaan Alutsista Integratif.
 - c) Modernisasi Alutsista/Non Alutsista/Sarpas Integratif.
 - (1) Pengadaan Kendaraan Taktis, Suku Cadang Kendaraan Tempur, dan Suku Cadang Kendaraan Taktis.
 - (2) Pengadaan Non-Alutsista/Senjata.
 - (3) Pengadaan Munisi Kaliber Kecil.
 - (4) Pengadaan Munisi Khusus.
 - (5) Pengadaan Materil Khusus.
 - (6) Pengadaan Munisi Kaliber Besar.
 - (7) Pengadaan Senjata.
 - (8) Pengadaan Non Alutsista.
 - (9) Pembangunan Sarpras Pendukung.
 - d) Pendidikan Pertama Dikma Perwira TNI (*Werving*).
 - (1) Pendidikan Pengembangan/Spesialisasi.
 - (2) Latihan Kesiapsiagaan Operasi/Latgab/Latma Internasional
 - (3) Latihan Pembinaan Balakpus TNI.
 - (4) Latihan Pratugas Operasi.
 - (5) Pembangunan Sarana Prasarana Profesionalisme Personel Integratif.
- 3) TNI AD.

- a) Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat.
 - (1) Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Darat.
 - (2) Penggiatan Fungsi Matra Darat.
 - (3) Penyelenggaraan Kepolisian Militer Matra Darat.
 - (4) Penyelenggaraan Pembinaan Hukum.
 - (5) Penyelenggaraan Administrasi Personel.
 - (6) Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Fungsional, Fasilitas dan Sarpras Perkantoran.
 - (7) Penyelenggaraan Administrasi Perbekalan dan Dukungan Bekal.
 - (8) Penyelenggaraan Penpas dan Penum.
 - (9) Penyelenggaraan Administrasi Umum.
 - (10) Penyelenggaraan Administrasi Pembinaan, Perencanaan, Penganggaran, dan Keuangan.
 - (11) Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan.
- b) Dukungan Kesiapan Matra Darat.
 - (1) Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Darat.
 - (2) Kerjasama Internasional Matra Darat.
 - (3) Penyelenggaraan Survei dan Pemetaan.
 - (4) Pemeliharaan/Perawatan Kendaraan Tempur.
 - (5) Pemeliharaan/Perawatan Pesawat Terbang.
 - (6) Pemeliharaan/Perawatan Alat Angkut Air.
 - (7) Pemeliharaan/Perawatan Senjata dan Munisi/Alpal.
 - (8) Pemeliharaan/Perawatan Non Alutsista.
 - (9) Penyelenggaraan Kegiatan Teritorial Matra Darat.
 - (10) Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra Darat.
 - (11) Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Matra Darat.
 - (12) Pemeliharaan dan Perawatan Kesatriaian dan Fasilitas Latihan Tempur.
 - (13) Penyelenggaraan Pembinaan Potensi Nasional menjadi Kekuatan Pertahanan.
 - (14) Penyelenggaraan OMSP
- c) Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista Matra Darat.
 - (1) Pengadaan/Penggantian Kendaraan Tempur.
 - (2) Pengadaan/Penggantian Pesawat Terbang (Sabang).

- (3) Pengadaan/Penggantian Alat Angkut Air.
 - (4) Pengadaan/Penggantian Senjata dan Munisi.
 - (5) Pengadaan/Penggantian Materiil Alutsista.
 - (6) Pengadaan/Penggantian Materiil Non Alutsista.
 - (7) Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Matra Darat.
- d) Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat.
- (1) Latihan Matra Darat.
 - (2) Latihan Bersama Internasional.
 - (3) Penyelenggaraan Pertama Matra Darat.
 - (4) Pendidikan Pembentukan Matra Darat.
 - (5) Pendidikan Pengembangan Umum/Rutin Matra Darat.
 - (6) Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Matra Darat.
 - (7) Pendidikan Profesi dan Keahlian Matra Darat.
 - (8) Pembangunan Sarpras Profesionalisme Personel Matra Darat.
- 4) TNI AL.
- a) Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut.
- (1) Penyelenggaraan Administrasi Personel Matra Laut.
 - (2) Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Fungsional, Fasilitas, dan Sarana Prasarana.
 - (3) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.
 - (4) Penyelenggaraan Pembinaan Hukum.
 - (6) Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Keuangan.
 - (8) Penyelenggaraan Administrasi Perbekalan dan Dukungan Bekal Matra Laut.
 - (9) Penyelenggaraan Penerangan Pasukan dan Penerangan umum Matra Laut.
 - (10) Penyelenggaraan Administrasi Perawatan Personel Matra Laut.
 - (11) Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Kepolisian Militer Matra Laut.
 - (12) Penyelenggaraan Administrasi Umum Matra Laut.
- b) Dukungan Kesiapan Matra Laut.
- (1) Penyelenggaraan Survei dan Pemetaan Hidrografi dan Oseonografi (Rutin).

- (2) Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra Laut.
 - (3) Penyelenggaraan Uji Kelaikan Materiil dan Fasilitas Matra Laut.
 - (4) Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Komlek.
 - (5) Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Senlek dan Amunisi.
 - (6) Pemeliharaan/Perawatan KRI/Alpung dan Ranpur/Rantis.
 - (7) Penyelenggaraan OMSP Matra Laut, Penegakan Hukum dan Jaga Keamanan laut di Wilayah Laut Yurisdiksi Nasional.
 - (8) Litbanghan Matra Laut.
 - (9) Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Laut.
 - (10) Penyelenggaraan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut.
 - (11) Pemeliharaan/Perawatan Pesud.
- c) Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Haneg Matra Laut.
- (1) Peningkatan/Pengadaan Peralatan Surta Hidros.
 - (2) Peningkatan/Pengadaan Peralatan Komlek.
 - (3) Peningkatan/Pengadaan Senlek dan Amunisi.
 - (4) Peningkatan/Pengadaan KRI/Alpung dan Ranpur/Rantis.
 - (5) Peningkatan/Pengadaan Peralatan Passusla dan Materiil Non Alutsista Matra Laut.
 - (6) Pengadaan Alutsista Strategis Matra Laut.
 - (7) Peningkatan/Pengadaan Pesud.
- d) Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut.
- (1) Pendaftaran dan Seleksi.
 - (2) Pembangunan Fasilitas dan Sarpras Profesionalisme Matra Laut.
 - (3) Penyelenggaraan Latihan Operasi Matra Laut.
 - (4) Dikma, Dikbangum, Spesialisasi, Profesi, dan Ketrampilan, serta Diktuk Matra Laut.
 - (5) Penyelenggaraan Psikologi Matra Laut .
- 5) TNI AU.

- a) Dukungan Kesiapan Matra Udara.
 - (1) Penyelenggaraan OMSP Matra Udara.
 - (2) Harwat Pesawat Udara, Senjata, dan Almtsus lainnya.
 - (3) Penyelenggaraan Dukungan Operasi Penerbangan.
 - (4) Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra Udara.
 - (5) Harwat Radar, Penangkis Serangan Udara, dan Almtsus Komlek lainnya.
 - (6) Penyelenggaraan Uji Kelaikan Materiil dan Fasilitas Matra Udara.
 - (7) Litbanghan Matra Udara.
 - (8) Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Udara.
 - (9) Penyelenggaraan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Matra Udara.
 - (10) Penyelenggaraan Surta.
- b) Modernisasi Alutsista/Non Alutsista, Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara.
 - (1) Pengadaan Alutsista Strategis Matra Udara.
 - (2) Peningkatan/Pengadaan Pesawat Udara dan Dukungan Lainnya.
 - (3) Peningkatan/Pembangunan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara.
 - (4) Peningkatan/Pengadaan Radar, PSU, dan Alat Komlek Lainnya.
 - (5) Peningkatan/Pengadaan Senjata ringan/Senjara berat.
 - (6) Pengadaan Peralatan Non Alutsista.
- c) Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara.
 - (1) Latihan Matra Udara.
 - (2) Penyelenggaraan Pendidikan Matra Udara.
 - (3) Pembangunan Sarpras Kesejahteraan Personel Matra Udara.
 - (4) *Werving*.
 - (5) Penyelenggaraan Psikologi Matra Udara.
- d) Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara.
 - (1) Penyelenggaraan Kepolisian Militer Matra Udara.
 - (2) Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan.

- (3) Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Fungsional, Fasilitas dan Sarpras, serta LTGA.
 - (4) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.
 - (5) Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Keuangan.
 - (6) Penyelenggaraan Pembinaan Hukum.
 - (7) Penyelenggaraan Administrasi Perbekalan Umum dan Pemeliharaan Perawatan Perkantoran.
 - (8) Penyelenggaraan Administrasi Personel Matra Udara.
 - (9) Penyelenggaraan Penpas dan Penum Matra Udara.
 - (10) Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Udara.
 - (11) Penyelenggaraan Administrasi Umum Matra Udara.
- d. *Quick Wins* dan Program Lanjutan bidang Pertahanan.
- 1) *Quick Wins*.
 - a) Penyusunan Renstra Industri Pertahanan dengan sasaran tersedianya Alutsista TNI dengan teknologi yang mampu memenuhi kebutuhan.
 - b) Meluncurkan produk strategis pertahanan 2015-2019 dengan sasaran tersedianya Alutsista TNI dengan teknologi yang mampu mengimbangi kekuatan sumber ancaman.
 - c) Pembentukan Pertahanan Integratif (tahap awal) dengan sasaran tersedianya kantor Pertahanan Integratif beserta sarpras pendukungnya.
 - d) Peningkatan kesejahteraan prajurit dengan sasaran membaiknya kesejahteraan prajurit TNI.
 - e) Membangun infrastruktur rumah dinas TNI dengan sasaran sebanyak 15.000 (lima belas ribu) unit rumah negara TNI AD, 7.500 (tujuh ribu lima ratus) unit rumah negara TNI AL, dan 2.500 (dua ribu lima) unit rumah negara TNI AU.
 - f) Menetapkan regulasi mengenai tata cara pengaturan dan pembinaan rumah negara dengan sasaran tersusunnya revisi peraturan/regulasi rumah dinas di lingkungan TNI.
 - g) Melakukan kerja sama antar Kementerian dengan Menteri Negara Perumahan Rakyat dan meningkatkan peran yayasan yang mengurus perumahan dengan sasaran tersusunnya MoU kerja sama antar Kementerian antara

Kemhan/TNI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- h) Meningkatkan pendidikan dan latihan TNI dengan sasaran meningkatnya frekuensi pendidikan dan latihan prajurit TNI sebanyak 2 (dua) kali lipat.
- 2) Program Lanjutan.
- a) Bidang profesionalisme TNI dan kesejahteraan prajurit dengan sasaran membaiknya kesejahteraan dan profesionalisme prajurit TNI.
- b) Meningkatkan pendidikan dan latihan TNI dengan sasaran meningkatnya frekuensi pendidikan dan latihan prajurit TNI sebanyak 2 (dua) kali lipat.
- c) Bidang penguatan birokrasi dan koordinasi Industri Pertahanan dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan operasionalisasi KKIP.
- d) Bidang Pembangunan Kekuatan Pertahanan dan Modernisasi Pertahanan dengan sasaran meningkatnya kemampuan pertahanan (hanya sampai pemenuhan MEF tahap II dan belum termasuk kebutuhan penguatan kemampuan pertahanan yang disegani di Asia Timur sebagaimana amanat visi misi Presiden dalam Nawa Cita).

10. Kerangka Regulasi.

Kerangka regulasi dikaitkan dokumen perencanaan dibutuhkan agar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan disusun sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi pengalokasian anggaran. Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran strategis Kemhan dan TNI pada tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel Kerangka Regulasi Isu Strategis
Peningkatan Kapasitas Pertahanan Nasional

Nomor	Sasaran Strategis	Regulasi Terkait yang Sudah Ada	Kebutuhan Regulasi
1	Terselenggaranya pemberdayaan sumber daya nasional dalam sistem pertahanan	a. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. b. PP Nomor 68 Tahun 2014	a. RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara. b. RUU tentang

Nomor	Sasaran Strategis	Regulasi Terkait yang Sudah Ada	Kebutuhan Regulasi
	negara.	tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
2	Pengintegrasian manajemen pertahanan negara dalam mendukung sistem pertahanan negara.	<ul style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. b. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. c. UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. d. UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen. 	<ul style="list-style-type: none"> a. RUU tentang Keamanan Nasional. b. RUU tentang Perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka Kamtibmas. c. RUU tentang Rahasia Negara. d. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. e. RUU tentang Pemasarakatan Militer. f. RUU tentang KUHPM g. RUU tentang Persandian. h. RUU tentang Peradilan Militer. i. RPP tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Polri dan PNS Kementerian Pertahanan serta PNS Polri. j. RPP tentang Perubahan atas PP No 67 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU

Nomor	Sasaran Strategis	Regulasi Terkait yang Sudah Ada	Kebutuhan Regulasi
			<p>Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.</p> <p>k. R. Perpres tentang Perubahan atas Perpres Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI.</p> <p>l. R. Perpres tentang Jabatan fungsional TNI.</p>
3	<p>Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum TNI untuk menghadapi seluruh potensi ancaman yang bersumber dari perkembangan lingkungan strategis nasional, regional dan global.</p>	<p>a. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.</p> <p>b. UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014</p>	<p>a. RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.</p> <p>b. R Perpres tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2015-2019</p>
4	<p>Seluruh wilayah perbatasan darat serta wilayah yuridiksi laut dan udara memiliki batas yang jelas dan bebas dari pelanggaran kedaulatan negara, serta memiliki daya tangkal yang</p>	<p>a. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara</p> <p>b. UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI</p> <p>c. UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara</p> <p>d. UU Nomor 1</p>	<p>a. RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional</p> <p>b. RPP tentang Pengamanan Wilayah Udara.</p> <p>c. R. Perpres tentang Pengawasan Alur Laut Kepulauan Terhadap Kapal-Kapal Asing.</p>

Nomor	Sasaran Strategis	Regulasi Terkait yang Sudah Ada	Kebutuhan Regulasi
	handal dalam menghadapi setiap ancaman.	Tahun 2009 tentang Penerbangan e. UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan f. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara.	
5	Seluruh objek vital nasional yang bersifat strategis dapat terjamin keamanannya.	a. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri b. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara c. UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI d. Keppres Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional	R. Perpres tentang Pengamanan Objek Vital Nasional
6	Kekuatan laut yang mampu menjangkau pulau-pulau kecil terluar guna mengatasi berbagai bentuk pelanggaran	a. UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil. b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang	a. R. Perpres tentang Pengawasan Alur Laut Kepulauan terhadap Kapal-Kapal Asing. b. R. Perpres tentang Pengamanan Pelayaran.

Nomor	Sasaran Strategis	Regulasi Terkait yang Sudah Ada	Kebutuhan Regulasi
	maritim di wilayah laut yurisdiksi nasional.	Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil. c. UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. d. PP Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan.	c. RPP tentang Perubahan Atas PP Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan.
7	Kekuatan darat yang mampu menjangkau daerah-daerah terpencil, daerah perbatasan darat negara dan pulau-pulau kecil terluar serta menjaga keamanan wilayah daratan.	a. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. b. UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. c. UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. d. Keppres Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional.	R. Perpres tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019

Nomor	Sasaran Strategis	Regulasi Terkait yang Sudah Ada	Kebutuhan Regulasi
8	Kekuatan udara yang mampu menjaga keamanan dirgantara di wilayah udara yurisdiksi nasional dan mendukung pengamanan perbatasan darat dan laut wilayah NKRI.	a. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. b. UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. c. UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.	a. RPP Tentang Pengamanan Wilayah Udara. b. RPP Tentang Pesawat Udara Negara. c. R. Perpres tentang pendayagunaan Bandar Udara untuk Pertahanan Negara.
9	Tergelarnya kekuatan darat, laut, dan udara yang sinergis dan terintegrasi.	a. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara b. UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.	a. RUU tentang Keamanan Nasional. b. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. c. R. Perpres tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.
10	Kerja sama pertahanan dengan menjunjung tinggi politik bebas aktif dan jati diri sebagai Negara maritime dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan hak dan kedaulatan masing- masing negara	a. UU Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. b. UU Nomor 24 Tahun 200 tentang Perjanjian Internasional c. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara d. UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri	a. RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Pemerintah Jerman Mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan. b. RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara

Nomor	Sasaran Strategis	Regulasi Terkait yang Sudah Ada	Kebutuhan Regulasi
		Pertahanan	<p>Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Cina tentang Kerja Sama Aktivitas Dalam Bidang Pertahanan.</p> <p>c. RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.</p> <p>d. RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan.</p> <p>e. RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.</p> <p>f. RUU tentang</p>

Nomor	Sasaran Strategis	Regulasi Terkait yang Sudah Ada	Kebutuhan Regulasi
			Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Pemerintah Bela Rusia Bidang Pertahanan.
			g. RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan. h. RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan. i. RUU tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja

Nomor	Sasaran Strategis	Regulasi Terkait yang Sudah Ada	Kebutuhan Regulasi
			<p>Sama di Bidang Pertahanan.</p> <p>j. RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian</p>
			<p>Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.</p> <p>k. RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan.</p> <p>l. RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait.</p> <p>m. RUU tentang</p>

Nomor	Sasaran Strategis	Regulasi Terkait yang Sudah Ada	Kebutuhan Regulasi
			<p>Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.</p> <p>n. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah. Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.</p> <p>o. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.</p> <p>p. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan.</p> <p>q. RUU tentang</p>

Nomor	Sasaran Strategis	Regulasi Terkait yang Sudah Ada	Kebutuhan Regulasi
			Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan.
11	Pengiriman pasukan perdamaian dunia di berbagai kawasan sebagai wujud keikutsertaan dalam menjaga perdamaian dunia	a. UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. b. UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.	a. RUU tentang TNI b. R. Perpres tentang Pengiriman Konga Satgas Heli Mi-17 TNI Minusma pada Misi Pemeliharaan Dunia Di Mali.
		c. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara d. UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.	c. R. Perpres tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2015-2019.
12	Diplomasi pertahanan yang mampu mendukung kepentingan nasional.	a. UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. b. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. c. UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.	a. R. Perpres tentang Pengiriman Konga Satgas Heli Mi-17 TNI Minusma pada Misi Pemeliharaan Dunia di Mali. b. R. Perpres tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2015-2019.

Nomor	Sasaran Strategis	Regulasi Terkait yang Sudah Ada	Kebutuhan Regulasi
13	Mendorong tumbuhnya industri strategis nasional guna mendukung kepentingan pertahanan	a. UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan b. PP Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari Luar Negeri.	a. RUU tentang Senjata Api, Amunisi, dan Bahan Peledak. b. R. Perpres tentang Program Pembangunan Kapal Selam. c. RPP tentang Pengelolaan Industri Pertahanan. d. R. Perpres tentang Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Jangka Panjang.
14	Memberdayakan industri pertahanan dalam negeri guna pemenuhan Alut sista dan Alat Peralatan Pertahanan Keamanan (Alpalkam) dalam rangka mendukung perekonomian nasional.	a. UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan b. PP Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang dalam Pengadaan Alat Peralatan Hankam dari Luar Negeri	a. RUU tentang Senjata Api, Amunisi dan Bahan Peledak. b. R. Perpres tentang Program Pembangunan Kapal Selam. c. RPP tentang Pengelolaan Industri Pertahanan. d. R. Perpres tentang Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Jangka Panjang.
15	Peningkatan dan penguasaan teknologi, dalam mendukung pengembangan Industri	a. UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan b. Permenhan Nomor 76 Tahun	a. RUU tentang Senjata Amunisi dan Bahan Peledak b. R. Perpres tentang Program Pembangunan Kapal

Nomor	Sasaran Strategis	Regulasi Terkait yang Sudah Ada	Kebutuhan Regulasi
	pertahanan.	2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari Luar Negeri.	Selam. c. RPP tentang Pengelolaan Industri Pertahanan d. R.Perpres tentang Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Jangka Panjang.
16	Terbentuknya kader bela negara yang tangguh dalam mendukung pertahanan negara.	UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara.
17	Terwujudnya sistem pembinaan kesadaran bela negara dengan melibatkan K/L, Pemerintah Daerah dan komponen bangsa lainnya.	UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.	a. RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara. b. R. Perpres tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.
18	Terwujudnya SDM sebagai komponen pertahanan negara dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara.	a. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. b. UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI	a. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang TNI. b. RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara. c. RUU tentang Prajurit Wajib.

11. Kerangka Kelembagaan.

Penguatan kerangka kelembagaan dimaksudkan untuk mewujudkan kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, akuntabel, dan sinergis agar mampu melaksanakan program pembangunan dengan efektif dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional, penguatan kerangka kelembagaan pemerintah akan difokuskan untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pemerintah yang tertuang dalam Nawa Cita, sedangkan sasaran yang terkait dengan bidang pertahanan, dengan:

- Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara:
 - 1) Penguatan kelembagaan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut nasional guna meningkatkan keterpaduan antar pemangku kepentingan terkait dalam menjaga keamanan laut nasional;
 - 2) Pembentukan Kantor Pertahanan Integratif guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi gelar pasukan dan alutsista serta keterpaduan antar matra dalam rangka *Command, Control, Communication, Computer, Intelligence, Surveillance dan Reconnaissance (C4ISR)*.

Untuk mewujudkan penguatan kerangka kelembagaan dalam Renstra Kemhan dan TNI Tahun 2015-2019, kerangka kelembagaan disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut.

- a. Penataan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga pemerintah untuk menghindari multitafsir dan duplikasi fungsi, serta benturan kewenangan;
- b. Penyederhanaan struktur baik secara horizontal maupun vertikal untuk mengurangi fragmentasi organisasi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan pertahanan;
- c. Penyempurnaan proses inter maupun antar lembaga agar tercipta tata laksana pemerintahan dan pembangunan yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif, dan efisien;
- d. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan pertahanan.

Penguatan kelembagaan juga dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan pembangunan, yang meliputi sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan, untuk memastikan bahwa kelembagaan yang diperkuat dan/atau

- dibentuk sejalan dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel;
2. Transparan, efektif, dan efisien, untuk memastikan bahwa hasil penataan kelembagaan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan.
- Sejalan dengan penguatan kelembagaan dalam mewujudkan sasaran strategis pertahanan dibutuhkan kerangka kelembagaan sebagai berikut:

**Tabel Kerangka Kelembagaan Isu Strategis
Peningkatan Kapasitas Pertahanan Nasional**

Nomor	Sasaran Strategis	Kelembagaan Terkait yang Sudah Ada	Kerangka Kelembagaan
1.	Terselenggaranya pemberdayaan sumber daya nasional dalam sistem pertahanan Negara.	Pemda, Satuan Teritorial TNI, Lemhannas, Dewan Ketahanan Nasional.	Penguatan dan Intensifikasi Koordinasi antar Lembaga dalam Pengelolaan Sumber Daya Nasional.
2.	Pengintegrasian manajemen pertahanan Negara dalam mendukung sistem pertahanan negara.	Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.	Pembentukan Pertahanan Integratif dan Unsur-Unsur Satuan Pendukung.
3.	Pembangunan kekuatan pokok minimum TNI untuk menghadapi seluruh potensi ancaman yang bersumber dari perkembangan lingkungan strategis nasional, regional, dan global.	Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.	<ol style="list-style-type: none"> a. Pembentukan Pertahanan Integratif dan unsur-unsur satuan pendukung. b. Validasi organisasi satuan TNI dalam mendukung Pertahanan Integratif. c. Penguatan KKIP. d. Penguatan pengelola

Nomor	Sasaran Strategis	Kelembagaan Terkait yang Sudah Ada	Kerangka Kelembagaan
			perumahan prajurit.
4.	Seluruh wilayah perbatasan darat serta wilayah yurisdiksi laut dan udara memiliki batas yang jelas dan bebas dari pelanggaran kedaulatan negara, serta memiliki daya tangkal yang handal dalam menghadapi setiap ancaman	BNPP, Pemda, Kemdagri, Kemenlu, TNI, dan KKP.	Penguatan Legislasi dan Pemberdayaan Wilayah melalui Lembaga Kewilayah-an dan Teritorial.
5.	Seluruh objek vital nasional yang bersifat strategis dapat terjamin keamanannya.	Intelijen TNI.	Penguatan Intelijen TNI.
6.	Kekuatan laut yang mampu menjangkau pulau-pulau kecil terluar guna mengatasi berbagai bentuk pelanggaran maritim di wilayah laut yurisdiksi nasional.	KKP, Kemenlu, TNI, dan Kemenkumham.	a. Penguatan Badan Penyelesaian Pelanggaran batas wilayah laut. b. Badan penetapan batas Wilayah Laut dan Hukum internasional.
7.	Kekuatan darat yang mampu menjangkau daerah-daerah terpencil, daerah perbatasan darat negara dan pulau - pulau kecil terluar serta menjaga keamanan wilayah daratan.	KKP, Kemenlu, TNI, dan Kemenkumham.	a. Penguatan badan penyelesaian pelanggaran batas wilayah laut. b. Badan penetapan batas wilayah laut dan hukum internasional.

Nomor	Sasaran Strategis	Kelembagaan Terkait yang Sudah Ada	Kerangka Kelembagaan
8.	Kekuatan udara yang mampu menjaga keamanan dirgantara di wilayah udara yurisdiksi nasional dan mendukung pengamanan perbatasan darat dan laut wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Kohanudnas, TNI AU, dan KNKT.	<ul style="list-style-type: none"> a. Validasi organisasi b. Penguatan legislasi untuk pelanggaran wilayah udara.
9.	Tergelarnya kekuatan darat, laut, dan udara yang sinergis dan terintegrasi.	Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan Pertahanan Integratif dan unsur-unsur satuan pendukung. b. Validasi organisasi satuan TNI dalam mendukung Pertahanan Integratif.
10.	Kerja sama pertahanan dengan menjunjung tinggi politik bebas aktif dan jati diri sebagai negara maritim dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan hak dan kedaulatan masing-masing negara.	KKP, Kemlu, TNI, Kemenkumham.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan Badan penyelesaian pelanggaran batas wilayah laut. b. Badan penetapan Batas Wilayah Laut dan Hukum Internasional.
11.	Pengiriman pasukan perdamaian dunia di berbagai kawasan sebagai wujud keikutsertaan dalam menjaga	PMPP.	Penguatan PMPP.

Nomor	Sasaran Strategis	Kelembagaan Terkait yang Sudah Ada	Kerangka Kelembagaan
	perdamaian dunia.		
12.	Diplomasi pertahanan yang mampu mendukung kepentingan nasional.	Kemenlu dan Mabes TNI.	Penguatan Atase Pertahanan.
13.	Mendorong tumbuhnya industri strategis nasional guna mendukung kepentingan pertahanan.	KKIP.	Penguatan KKIP.
14.	Memberdayakan industri pertahanan dalam negeri guna pemenuhan Alutsista dan Alat Peralatan Pertahanan Keamanan (Alpalhankam) dalam rangka mendukung perekonomian nasional.	KKIP.	Penguatan KKIP.
15.	Peningkatan dan penguasaan teknologi, dalam mendukung pengembangan Industri pertahanan.	BPPT, Balitbang Kemhan, Balitbang TNI, BUMNIS Pertahanan, Pothan Kemhan, dan Baranahan Kemhan.	a. Pengembangan penelitian dan pengembangan terpadu bagi Industri Pertahanan. b. Penguatan kerja sama dengan Industri Pertahanan Nasional.
16.	Terbentuknya kader bela negara yang tangguh dalam mendukung pertahanan negara.	Menwa, Pramuka, dan FKPPi.	Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi massa yang berafiliasi Bela Negara.

Nomor	Sasaran Strategis	Kelembagaan Terkait yang Sudah Ada	Kerangka Kelembagaan
17.	Terwujudnya sistem pembinaan kesadaran bela negara dengan melibatkan K/L, Pemerintah Daerah dan komponen bangsa lainnya.	KORPRI, Pemda.	Penguatan Pembinaan dan pemberdayaan Bela Negara di lingkungan Kementerian/ Lembaga.
18.	Terwujudnya SDM sebagai komponen pertahanan negara dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara.	Kemempora, Kemendagri, Pemda, dan Kemhan (Pothan).	Pengembangan Lembaga Pendidikan tentang Bela Negara.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

12. Target Kinerja.

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kemhan dan TNI Tahun 2015-2019 telah ditetapkan 18 (delapan belas) sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Kemhan dan TNI. Pelaksanaan atas sasaran strategis tersebut selanjutnya akan diwujudkan dalam pelaksanaan program Kemhan dan TNI yang telah mencakup pelaksanaan program/kegiatan. Keberhasilan pembangunan pertahanan negara sangat ditentukan dari keberhasilan dalam memenuhi target kinerja yang ditetapkan baik pada sasaran strategis, sasaran program (*outcome*), maupun sasaran kegiatan (*output*) setelah ditentukan indikator kinerja yang menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan.

Target Kinerja menunjuk tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh organisasi dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

Kriteria penyusunan target kinerja:

- a. Target harus menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran.
- b. Penetapan target harus relevan dengan indikator kinerjanya, logis, dan berdasarkan *baseline* data yang jelas.

Target kinerja dari tiap Program dan kegiatan Renstra Kemhan dan TNI Tahun 2015-2019 disusun dalam bentuk Matrik Kinerja dan Pendanaan seperti tertera dalam sublampiran.

13. Kerangka Pendanaan.

Indikasi pendanaan belanja prioritas Kemhan dan TNI Tahun 2015-2019 (di luar belanja gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, uang makan, dan operasional perkantoran) direncanakan sebesar Rp 4.184.082 M (empat juta seratus delapan puluh empat ribu delapan puluh dua miliar) yang dituangkan dalam matriks kinerja dan pendanaan selanjutnya digunakan untuk mendanai Program dan Kegiatan Prioritas termasuk *Quickwins*/Program lanjutan serta tugas dan fungsi Kemhan dan TNI.

Belanja aparatur (belanja gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, uang makan, dan operasional perkantoran) akan ditambahkan dalam perencanaan tahunan sesuai dengan kebijakan belanja aparatur dan rencana kebutuhan masing-masing Unit Organisasi Kemhan dan TNI.

Untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan dalam program Kemhan dan TNI yang terdiri atas 9 (sembilan) program Generik dan 18 (delapan belas) program Teknis dengan kerangka kebutuhan pendanaan yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dan Pinjaman Luar Negeri (PLN/KE). Sesuai dengan sifat dari program yang akan dilaksanakan, pendanaan Rupiah Murni merupakan sumber pendanaan yang umum, Pinjaman Luar Negeri hanya diperuntukkan bagi pengadaan Alutsista TNI yang masih akan diadakan dari luar negeri sedangkan pendanaan dalam negeri, diutamakan dalam rangka meningkatkan upaya pemberdayaan industri pertahanan nasional. Selanjutnya kerangka pendanaan sesuai dengan program dan unit organisasi pelaksana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel Kerangka Pendanaan Program
Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Tahun 2015-2019

No	Program	Outcome	Sumber dana	Pelaksana
1	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UO Kemhan	Terwujudnya manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan Kemhan	RM	Kemhan
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemhan	Terwujudnya sarana dan prasarana pertahanan yang memenuhi kebutuhan dan standar mutu, sesuai dengan kemajuan IPTEK serta dikembangkan secara mandiri.	RM PLN	Kemhan
3	Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemhan	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan.	RM	Kemhan
4	Penelitian dan pengembangan Kemhan	Terwujudnya teknologi dan sumber daya pertahanan sesuai dengan kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri.	RM	Kemhan
5	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemhan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Kemhan/TNI memenuhi standar mutu, menerapkan kemajuan IPTEK serta mampu menjawab tantangan tugas untuk menghasilkan.	RM	Kemhan
6	Strategi Pertahanan	Terwujudnya kebijakan strategi pertahanan negara yang terintegrasi dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional, dan global.	RM	Kemhan

No	Program	Outcome	Sumber dana	Pelaksana
7	Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan	Terwujudnya perencanaan umum dan penanggaran pertahanan yang terintegrasi, akuntabel, tepat waktu, dan mampu memenuhi kebutuhan.	RM	Kemhan
8	Pengembangan teknologi dan industri pertahanan.	Meningkatnya kemandirian Alutsista TNI produksi dalam negeri dan pengembangan Pinak Indhan	PDN RM	Kemhan
9	Potensi Pertahanan	Seluruh masyarakat, sumber daya alam/buatan dan sarana/prasarana nasional berdayaguna secara optimal dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara	RM	Kemhan
10	Kekuatan Pertahanan	Terwujudnya kekuatan pertahanan negara yang mampu mengidentifikasi, menangkal, menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu.	RM	Kemhan
11	Pembinaan Instalasi Strategis Nasional	Terwujudnya pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan, dan kerja sama kawasan instalasi strategis nasional dalam mendukung tertib administrasi, kegiatan, dan tata kelola kawasan.	RM	Kemhan
12	Penggunaan kekuatan pertahanan integratif	Terwujudnya penggunaan kekuatan pertahanan Intergratif yang mampu mengidentifikasi, menangkal, menindak ancaman secara terintegrasi, efektif, dan tepat waktu.	RM	Mabes TNI

No	Program	Outcome	Sumber dana	Pelaksana
13	Modernisasi Alutsista/ Non-Alutsista/ Sarpras Integratif.	Terwujudnya modernisasi Alutsista/non Alutsista/Sarpras pertahanan yang memenuhi kebutuhan standar mutu, sesuai dengan kemajuan Iptek serta dikembangkan secara mandiri.	RM PLN PDN	Mabes TNI
4	Profesionalisme Prajurit Integratif	Meningkatnya profesionalisme prajurit baik kemampuan maupun kekuatan dalam rangka penggunaan kekuatan yang sesuai standar mutu dan kemajuan Iptek.	RM	Mabes TNI
15	Penyelenggaraan administrasi dan perawatan personel integratif	Terlaksananya pemenuhan hak-hak prajurit dan PNS TNI berupa pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan serta lembur yang dapat diterima secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	RM	Mabes TNI
16	Dukungan Kesiapan Matra Darat	Tercapainya tingkat kesiapan Alutsista dan fasilitas/sarpras dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju MEF.	RM	TNI AD
17	Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista, Sarpras Matra Darat.	Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista dan fasilitas/sarpras dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AD menuju MEF.	RM PLN PDN	TNI AD

No	Program	Outcome	Sumber dana	Pelaksana
18	Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat.	Terwujudnya profesionalisme personel dan satuan dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju MEF.	RM	TNI AD
19	Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat	Terwujudnya kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju MEF.	RM	TNI AD
20	Dukungan Kesiapan Matra Laut	Kemampuan dan kekuatan TNI AL meningkat dan siap operasional mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan standar dan kebutuhan, dengan daya dukung, daya tangkal, dan daya gempur yang tinggi.	RM	TNI AL
21	Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Pertahanan Negara Matra Laut	Kemampuan dan kekuatan TNI AL meningkat dan siap operasional mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan standar dan kebutuhan, dengan daya dukung, daya tangkal, dan daya gempur yang tinggi.	RM PLN PDN	TNI AL
22	Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut.	Kinerja organisasi semakin meningkat dan diawaki oleh personel yang berkualitas sesuai dengan SKP dan dengan jumlah yang mencukupi sesuai DSP.	RM	TNI AL
23	Penyelenggaraan manajemen dan operasional Matra Laut.	Peningkatnya kedisiplinan dan profesionalisme personel TNI AL, kelancaran penyelenggaraan operasional perkantoran serta akuntabilitas dan optimalisasi kerja.	RM	TNI AL

No	Program	Outcome	Sumber dana	Pelaksana
24	Dukungan Kesiapan Matra Udara	Tercapainya tingkat kesiapan Alutsista, non Alutsista, organisasi, doktrin, fasilitas dan Sarpras serta kekuatan pendukung Matra Udara.	RM	TNI AU
25	Modernisasi Alutsista/ Non Alutsista, Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara.	Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista dan Fasilitas/Sarpras dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI TNI AU menuju MEF.	RM PLN PDN	TNI AU
26	Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara.	Terpenuhinya profesionalisme personel matra udara sesuai dengan DSP, peningkatan, dan kesiapan personel.	RM	TNI AU
27	Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara.	Meningkatnya kedisiplinan dan profesionalitas personel TNI AU, kelancaran penyelenggaraan operasional perkantoran, akuntabilitas, dan optimalisasi kinerja/ laporan.	RM	TNI AU

BAB V
PENUTUP

14. Penutup.

Rencana Strategis Kemhan dan TNI Tahun 2015-2019 merupakan panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kemhan dan TNI untuk 5 (lima) tahun kedepan. Diharapkan Renstra ini dapat dijadikan acuan bagi masing-masing unit kerja dilingkungan Kemhan dan TNI dalam rencana penyelenggaraan Pertahanan Negara. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2015-2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, dukungan data dan informasi, sumber daya manusia dan sumber pendanaan, serta komitmen dari semua pihak untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan akuntabel.

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

RYAMIZARD RYACUDU

SUBLAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 08 TAHUN 2015 TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA
TAHUN 2015-2019

Matriks Kinerja dan Pendanaan Renstra Kemhan dan TNI Tahun 2015-2019

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output) Indikator	Target					Aksi (dalam miliaran rupiah)					Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PRIORITAS N, B, R/L
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
KEMENTERIAN PERTAHANAN														
	1. Terwujudnya sumber daya nasional yang dapat digunakan dalam pertahanan negara.													
	- Penseñtasi potensi sumber daya nasional yang dapat dipertajam menjadi kekuatan pertahanan yang tangguh untuk mendukung kepentingan pertahanan negara.	14%	20%	24%	28%	32%								
	2. Terwujudnya sistem pertahanan negara yang terintegrasi.													
	- Penseñtasi satuan kerja yang menerapkan manajemen yang terintegrasi, akuntabel, dan akurat dilintasan Kemhan dan TNI	86%	87%	88%	89%	100%								
	3. Terwujudnya kekuatan politik minimum TNI untuk menghadapi sebuah potensi ancaman yang bersumber dari perkembangan lingkungan strategis nasional, regional, dan global.													
	- Penseñtasi kekuatan politik minimum (MEP) TNI meliputi aspek akreditasi, profesionalisme, sumbu, dan penerapan, serta kesejahteraan yang dibangun.	16%	20%	20%	23%	28%								
	4. Terwujudnya wilayah pertahanan darat serta wilayah yurisdiksi laut dan udara memiliki batas yang jelas dan bebas dari pelanggaran kedaulatan negara.													
	1. Penseñtasi wilayah pertahanan negara darat, laut, dan udara yang memiliki batas yang jelas.													
	2. Penseñtasi penerapan pelanggaran wilayah pertahanan dan daerah rawan.	25%	20%	18%	10%	8%								
	5. Terwujudnya kerja sama pertahanan dengan negara sahabat.													
	- Penseñtasi kerja sama pertahanan yang mengacu pada politik bebas aktif dan jadi di sebagai negara maritim di forum internasional.	11%	22%	33%	44%	55%								
	6. Keterlibatan dalam panca perdamaian dunia di berbagai kawasan sebagai wujud dalam menjaga perdamaian dunia													

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Output) / Sasaran Kegiatan (Output) Indikator	Target								Akhir Tahun (akhir tahun) capaian								Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PRIORITY N. R. K/L
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
1363 Dukungan administrasi dan pelayanan Penerimaan UO Kembera.	Penerapan pelayanan yang profesional dan tata laksana Kementerian yang selengkap dan seoptimal mungkin.	100%	100%	100%	100%	100%	1.2	1.2	1.3	1.5	1.8	6.9	Biar TERA Usaha							
		100%	100%	100%	100%	100%	1.2	1.2	1.3	1.5	1.8	6.9								
1365 Pelayanan komunikasi publik.	Berupaya memperoleh informasi yang benar kepada seluruh personal Kembera, TNL, masyarakat dan masyarakat umum yang berkepentingan serta pihak Kembera dan TNL.	100%	100%	100%	100%	100%	2.4	4.0	3.7	4.7	4.3	19.1	Pusat Komunikasi Publik							
		100%	100%	100%	100%	100%	2.4	4.0	3.7	4.7	4.3	19.1								
02 Meningkatkan sarana dan prasarana operator Kembera.	Peningkatan layanan teknis dan pengalihan sarana transportasi, BBM serta terwujudnya sarana transportasi yang layak pakai, efisien serta memiliki standar mutu Kembera dan TNL dan TNL.	18.504.7	26.903.4	23.983.0	28.066.7	33.114.6	110.574.3	Buletin Sarana Perbaikan												
		23.1	60.3	96.7	94.4	60.0	256.3													
1366 Pengadaan Barang Milik Negara (BMN).	Peningkatan layanan teknis dan terwujudnya pengadaan sarana perabotan, BMN yang terintegrasi dengan data vertikal, akurasi, akurat dan seoptimal mungkin.	20 layman	23 layman	24 layman	23 layman	23 layman	23.1	60.3	96.7	94.4	60.0	256.3	Pusat Barang Milik Negara							
		1. Akurasi aset BMN Kembera / TNL yang terakurasi secara up-to-date dan seoptimal mungkin.																		
		2. Nilai dokumen lelang/ tender teknis di bidang pengadaan sarana perabotan, BMN yang implementasi dan efektif dengan biaya "Best Value".																		
1367 Mekanisme sarana perabotan.	Peningkatan layanan teknis dan terwujudnya sarana perabotan yang memiliki standar mutu.	4.4	8.0	6.3	8.5	7.2	34.4	Pusat Kelembagaan												
		4.4	8.0	6.3	8.5	7.2	34.4													

Program / Kegiatan	Sesuai Program (Output)/Sesuai Kegiatan (Output)	Target								Aksi dan Indikator					Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PRIORITY N, R, K/L
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019						
1365	Kegiatan pelatihan	- Ajaran Alur an/Man Alur an seta a kearifan (memerata standar n) Pemasar alur an/Man Alur an yang merata standar n/Man Alur an dengan pengajaran dan berurutan pengajaran	54 Paket	532 Paket	79 Paket	79 Paket	60 Paket	4,4	8,0	6,3	8,5	7,2	34,4	Pusat Kordinasi			
			2.400 Item	2.400 Item	2.400 Item	2.400 Item	2.400 Item	1,5	2,5	2,1	3,1	2,0	11,2				
1366	Kegiatan pelatihan	- Beradanya buku Manual Serial Member (MSM) pada semua pelayanan yang terintegrasi secara nasional dan berkesinambungan di seluruh Indonesia yang mencakup: 1. Ajaran kearifan materi pelatihan yang terintegrasi secara nasional. 2. Ajaran kearifan materi pelatihan yang terintegrasi secara nasional. 3. Pemasar an seta a perubahan hasil pengajaran yang telah mendapat buku Manual Serial Member (MSM) yang terintegrasi secara nasional dan internasional dengan dokumentasi yang akurabel	34.200 Item	34.200 Item	34.200 Item	34.200 Item	34.200 Item	1,0	2,0	1,0	2,0	1,7	7,7	Pusat Kordinasi			
			2.400 Item	2.400 Item	2.400 Item	2.400 Item	2.400 Item	1,5	2,5	2,1	3,1	2,0	11,2				
1369	Kegiatan, jasa konsultasi/pelatihan	- Beradanya konsultasi sumber daya perubahan yang sesuai kebutuhan pengajaran, e-lerning, akurabel serta memuat standar n/Man Alur an dan TN 1. Ajaran berurutan konsultasi per danan yang 2. Pemasar an seta a perubahan kearifan sumber daya perubahan yang sesuai kebutuhan pengajaran, e-lerning, akurabel, sopor waku serta memuat standar n/Man Alur an dan TN dan akurabel	25 unit	24 unit	26 unit	20 unit	26 unit	498,1	1.543,0	847,6	900,9	694,7	4.286,3	Pusat Kordinasi			
			1.400 Item	1.400 Item	1.400 Item	1.400 Item	1.400 Item	1,5	2,5	2,1	3,1	2,0	11,2				
1370	Kegiatan pelatihan	- Meningkatkan jumlah sarana pelayanan per danan wilayah pedesaan. 1. Ajaran sarana dan pelayanan perubahan 2. Pemasar an seta a perubahan 3. Pemasar an seta a perubahan	186,2	1.606,8	1.414,7	1.535,2	1.022,0	5.064,8	Pusat Kordinasi								
			2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	1.866,3			1.955,5	2.055,2	2.155,5	2.266,3	1.028,6		
1371	Kegiatan barang dan jasa n/Man Alur an	- Beradanya alat seta a dan n/Man Alur an yang sesuai kebutuhan pelayanan, akurabel, sopor waku serta memuat standar n/Man Alur an dan TN 1. Ajaran pelayanan Alur an seta a kearifan	1	1	1	1	1	72,6	76,3	80,1	84,1	88,3	401,4	Pusat Kordinasi			
			1	1	1	1	1	113,5	119,2	123,1	121,4	128,0	627,2				
1371	Kegiatan barang dan jasa n/Man Alur an	- Beradanya alat seta a dan n/Man Alur an yang sesuai kebutuhan pelayanan, akurabel, sopor waku serta memuat standar n/Man Alur an dan TN 1. Ajaran pelayanan Alur an seta a kearifan	17.787,2	23.674,0920	21.652,2	23.907,6	11.441,4	500.492,6	Pusat Kordinasi								
			5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	17.787,2			23.674,0920	21.652,2	23.907,6	11.441,4	500.492,6		

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Output)/ Sasaran Kegiatan (Output) Indikator	Target							Asumsi Output minimum optimal							Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PROMOTIFIS N. R. K/L
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019							
	Penerapan upaya pemertanian bidang penyusutan unitan yang bebas bertransaksi	60%	65%	70%	75%	80%	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.0	1.8	Bupati				
1375 Program an pengadaan Kamban/TNI	Tercapainya akuntabilitas aparatur Kamban di bidang pengadaan Penerapan kegiatan pengadaan yang bebas bertransaksi						0.6	0.9	0.9	1.0	1.2	4.6	Bupati					
		35%	30%	25%	20%	15%	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.0						
1376 Program an keuangan Kamban/TNI	Tercapainya akuntabilitas aparatur Kamban di bidang keuangan Penerapan kegiatan bidang keuangan yang bebas bertransaksi						0.6	0.7	1.0	1.2	1.2	4.6	Bupati					
		35%	30%	25%	20%	15%	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	1.5						
1377 Program an logistik Kamban/TNI	Tercapainya akuntabilitas aparatur Kamban di bidang logistik Penerapan kegiatan bidang logistik yang bebas bertransaksi						0.6	0.9	1.0	1.0	1.2	4.6	Bupati					
		30%	25%	20%	15%	10%	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	1.2						
04	Prestasi dan pengembangannya Kamban						1239.4	2186.0	2206.0	2.307.2	2.211.6	11.040.37	Bupati					
		54%	53%	57%	60%	70%	3.5	3.8	4.2	4.8	5.3	21.6						
1378	Prestasi dan pengembangannya strategi pemerintahan						3.5	3.8	4.2	4.8	5.3	21.6	Bupati					
							41.6	49.0	69.5	71.5	801.2	302.8	Bupati					

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Output)/Sasaran Kegiatan (Output) Indikator	Target							Aksi dan indikator kinerja							Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PRIORITYS N. R. K/L	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019								
	4. Peningkatan capaian target dan penyempitan engkaban target waktu																		
05 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kesehatan	Tersedianya layanan pendidikan dan pelatihan Kesehatan dan P3K yang memenuhi standar mutu dan mampu melaksanakan tugas sesuai kompetensi/pekerjaan.																		
	Peningkatan layanan dasar yang memantapkan standar mutu dan mampu melaksanakan tugas sesuai kompetensi/pekerjaan dengan ketrampilan "Hard/softskill".	80%	85%	90%	92%	90%													
11383 Pendidikan dan pelatihan kesehatan	Layanan yang mampu memberikan anjuran standar mutu guna mendukung pelaksanaan tugas kesehatan baik tingkat/ pemberdayaan, sesuai standar mutu guna mendukung pelaksanaan tugas kesehatan baik tingkat/ pemberdayaan.	80%	83%	86%	89%	92%	9,0	10,2	11,2	12,3	13,5	56,2							
11384 Pendidikan dan latihan manajemen perubahan.	Tersedianya layanan yang mampu mengelola program dan kegiatan serta urusan bidang perubahan kesehatan.						8,2	9,0	9,9	10,9	12,0	50,0							
	Peningkatan pengetahuan kompetensi layanan Manajemen Perubahan sesuai dengan standar, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai layanan.	80%	83%	86%	89%	92%	8,2	9,0	9,9	10,9	12,0	50,0							
	Peningkatan layanan yang memiliki kemampuan mengelola program dan kegiatan serta urusan bidang pelayanan kesehatan dengan ketrampilan "Hard/ softskill".																		
11385 Pendidikan pelatihan berbasis kompetensi dan perubahan.	Tersedianya layanan yang mampu mengelola urusan bidang pelayanan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perubahan.						6,9	7,6	8,4	9,2	10,1	42,3							
	Peningkatan pengetahuan kompetensi layanan Manajemen Perubahan sesuai dengan standar, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai jabatan.	80%	83%	86%	89%	92%	6,9	7,6	8,4	9,2	10,1	42,3							
	Peningkatan layanan yang mampu mengelola urusan bidang kesehatan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perubahan dengan ketrampilan "Hard/ softskill".																		
11386 Pengembangan Pendidikan Tinggi Perubahan.	Tersedianya layanan Siswa 2 bidang perubahan sesuai standar nasional dan internasional.						88,1	292,3	30,4	31,6	33,3	478,1							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Output)/ Sasaran Kegiatan (Output) Indikator	Target							Akhir tahun minimum capaian					Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PROMOTAS N. R. K/L
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
	1. Ajaran praktik Asuhan Strategi yang dimonitoring/objektifitas dasar kejuruan/didokumentasikan.	16 bulan	11 bulan	8 bulan	6 bulan	7 bulan	7,1	9,4	9,7	8,7	9,6	44,5	Direktorat Kejuruan Strategi			
	2. Nilai dokumentasi perkembangan Lulusan dengan kategori "Baik"															
1198	Praktikum kejuruan etnografi dan kebijakan implementasi						6,7	6,5	7,1	6,0	6,9	33,2	Direktorat Kejuruan Strategi			
	Tersebutnya dibuktikan kebijakan strategi perubahan negara yang dapat dipantau dan diimplementasikan untuk kegiatan penelitian perguruan tinggi.															
	1. Ajaran Kebijakan Strategi yang diimplementasikan.	13 dokumen	13 dokumen	9 dokumen	7 dokumen	9 dokumen	4,2	6,5	7,1	6,0	6,9	30,7				
	2. Nilai dokumentasi kebijakan etnografi perubahan negara dengan kategori "Baik"															
1199	Karya sama internasional						12,6	15,5	17,2	17,9	18,8	81,9	Direktorat Kejuruan Internasional			
	Tersebutnya kebijakan kerjasama internasional yang dapat diimplementasikan untuk kegiatan sama kerjasama dengan negara sahabat di bidang penelitian negara															
	1. Ajaran kerja sama bidang penelitian dengan negara sahabat.	22 negara	22 negara	22 negara	22 negara	22 negara	12,6	15,5	17,2	17,9	18,8	81,9				
	2. Nilai dokumentasi kebijakan kerjasama internasional dengan kategori "Baik"															
	3. Penemuan-penemuan dengan negara sahabat yang ditandatangani.															
1197	Praktikum kebijakan pengabdian masyarakat						6,3	7,8	8,0	8,3	8,1	38,4	Direktorat Pengabdian			
	Tersebutnya kebijakan pengabdian masyarakat perubahan negara yang dapat dipantau dan diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia															
	1. Ajaran kebijakan pengabdian masyarakat perikanan negara yang diimplementasikan.	8 dokumen	8 dokumen	5 dokumen	4 dokumen	5 dokumen	2,8	3,6	5,1	3,2	5,0	19,7				
	2. Nilai dokumentasi kebijakan pengabdian masyarakat perikanan negara dengan kategori "Baik"															
1196	Praktikum kebijakan strategi perikanan negara						9,3	10,6	10,0	8,7	7,0	43,6	Direktorat Perikanan Perikanan Perikanan			
	Tersebutnya Peraturan Perundang-undangan yang dapat dipantau untuk mencapai sasaran strategi pengembangan perikanan negara															
	1. Ajaran peraturan perundang-undangan bidang perikanan negara yang ditandatangani.	12 RRU	20 RRU	12 RRU	7 RRU	6 RRU	5,8	8,3	8,6	6,4	5,5	34,5				
	2. Nilai Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan "Baik"															
1193	Kejuruan strategi perikanan						4,2	10,4	11,5	12,4	13,6	52,8	Direktorat Wilayah Perikanan			
	Tersebutnya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTU) perikanan yang dapat dipantau dan diimplementasikan untuk meningkatkan sumber daya perikanan dan kegiatan penelitian															

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Output) / Indikator	Target							Aksi dan Indikator							Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PRIORITY N. R. K/L
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019							
1394 Kegiatan	Penerapan kewirausahaan di kawasan Kecamatan Tera Ruang Widyah (RTRW) di kawasan dengan dukungan Rencana Tata Ruang Kawasan (RTRK) yang berdaya guna.	3 bulan	13 bulan	7 bulan	7 bulan	7 bulan	0,8	5,0	1,9	1,9	2,1	11,7	Sektor/Direktorat	PRIORITY				
		100%	100%	100%	100%	100%	2,2	4,1	4,4	5,0	5,5	21,3						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12			
1395 Kegiatan	Penerapan kewirausahaan di kawasan Kecamatan Tera Ruang Widyah (RTRW) di kawasan dengan dukungan Rencana Tata Ruang Kawasan (RTRK) yang berdaya guna.	3 bulan	13 bulan	7 bulan	7 bulan	7 bulan	0,8	5,0	1,9	1,9	2,1	11,7	Sektor/Direktorat	PRIORITY				
		100%	100%	100%	100%	100%	2,2	4,1	4,4	5,0	5,5	21,3						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12			
1396 Kegiatan	Penerapan kewirausahaan di kawasan Kecamatan Tera Ruang Widyah (RTRW) di kawasan dengan dukungan Rencana Tata Ruang Kawasan (RTRK) yang berdaya guna.	3 bulan	13 bulan	7 bulan	7 bulan	7 bulan	0,8	5,0	1,9	1,9	2,1	11,7	Sektor/Direktorat	PRIORITY				
		100%	100%	100%	100%	100%	2,2	4,1	4,4	5,0	5,5	21,3						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12			
1397 Kegiatan	Penerapan kewirausahaan di kawasan Kecamatan Tera Ruang Widyah (RTRW) di kawasan dengan dukungan Rencana Tata Ruang Kawasan (RTRK) yang berdaya guna.	3 bulan	13 bulan	7 bulan	7 bulan	7 bulan	0,8	5,0	1,9	1,9	2,1	11,7	Sektor/Direktorat	PRIORITY				
		100%	100%	100%	100%	100%	2,2	4,1	4,4	5,0	5,5	21,3						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12			

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Output)/ Sasaran Kegiatan (Output) Indikator	Target						Akhir Tahun (akhir tahun) capaian						Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PROMOTIFAS N. R. K/L	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019						
1405	Revisi dan pembuatan kumpulan peraturan																
	Terwujudnya kebijakan dan serangkaian komponen pendukung untuk kepentingan pembinaan seragam						10,7	7,2	7,3	7,8	8,4	41,3	Direktorat Korpri dan Pembinaan Peralatan Seragam				
	1. Ajarah wilayah yang memuatkan soal-soal kumpulan peraturan meliputi bidang SIM, SIMA dan Seragam nasional.	13 wilayah	12 wilayah	11 wilayah	10 wilayah	10 wilayah	4,5	3,7	2,0	3,7	4,6	18,6					
	2. Ajarah kebijakan pemastan dan pembinaan kumpulan peraturan.	11 kebijakan	10 kebijakan	17 kebijakan	11 kebijakan	3 kebijakan	1,6	2,0	3,7	2,4	2,0	11,6					
	3. Ajarah wilayah yang dikuatkan peraturan meliputi bidang SIM, SIMA, dan Seragam nasional.	15 wilayah	16 wilayah	18 wilayah	15 wilayah	10 wilayah	1,3	1,4	1,7	1,7	1,9	7,9					
	4. Ajarah kebijakan pengembangan sistem pemerintahan siber.	3 kebijakan	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	0,6					
	5. Ajarah kerjasama nasional dan internasional pemerintahan siber.	3 paket	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	1,5					
	6. Ajarah wilayah yang meratifikasi soal-soal dan bentuk pemerintahan siber.	13 Kodum	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	1,3					
	7. Misi dibidang kebijakan pengembangan dan pembinaan kumpulan peraturan dengan kategori "Raid".																
	8. Penetapan peraturan capaian penyelesaian RIU Komvika.																
1406	Pembinaan personel teknologi dan industri pemerintahan.						192,3	315,7	222,5	214,3	386,0	1.350,6	Direktorat Teknologi dan Industri Pemerintahan				
	Terwujudnya kebijakan serangkaian indikator pembinaan dan program yang memiliki kerangka BTKK serta soal standar atau guna dikembangkan untuk dipelajari secara mandiri.						8,9	7,2	7,5	8,1	8,5	40,2					
	1. Ajarah kebijakan pengembangan indikator pemerintahan sesuai dengan kemampuan ipak yang dikembangkan secara mandiri.	7 kebijakan	-	-	-	-	-	62,8	62,8	62,8	66,5	251,9					
	2. Peningkatan pembinaan kebidanan Operasional KOP.	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-					
	3. Ajarah pembinaan pemastan dan pembinaan seragam dan indikator pemerintahan.	4 pdt	3 pdt	3 pdt	3 pdt	3 pdt	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	4,4					
	4. Ajarah pelaksanaan TOR meliputi pengarsipan teknologi ipak siber, Portal C-705, media sosial dan PTTA status siber.	4 paket	3 paket	4 paket	3 paket	2 paket	180,9	204,9	151,4	142,6	310,2	1.090,0					
	5. Misi dibidang kebijakan pengembangan indikator pemerintahan dengan kategori "Raid".																
	6. Peningkatan program unggulan yang dibawakan.																

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Output)/ Sasaran Kegiatan (Output) Indikator	Target							Akhirus Tahunan (nilai-nilai riil)							Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PROMOTUS N. R. K/L	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019								
1407 Komban	Selesai pelaksanaan dan pelaksanaan tugas sebagai Kepala Digen Priban																		
	Selesai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan yang terdiri dari indikator secara terintegrasi, akuntabel, dan tepat waktu & lingkungan Sistem Komban.																		
	1. Peningkatan pelayanan program dan kegiatan dengan layanan "Blak"	100%	100%	100%	100%	100%	1.7	3.7	3.4	3.6	4.2	16.3							
	2. Peningkatan pelayanan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dengan layanan "Blak"																		
	3. Peningkatan capaian target program/ kegiatan.																		
	4. Peningkatan capaian target dalam pencapaian kegiatan target & mutu																		
10. Mekanisme Perubahan																			
	Penelitian, perbaikan, dan inovasi perubahan pelaksanaan program/ kegiatan.																		
	Nilai dokumen indikator di bidang pembangunan kesehatan, kemampuan dan keterampilan organisasi untuk melaksanakan program yang implementatif, efektif serta efisien dan tepat waktu.																		
1408 Perubahan Fasilitas dan Jasa Perawatan																			
	Penelitian, perbaikan, dan inovasi perubahan di bidang fasilitas dan jasa yang implementatif, efektif serta efisien guna mendukung layanan, kemampuan dan keterampilan untuk pelayanan prima.																		
	1. Jumlah bedah perawatan organ di bidang kesehatan dan jasa dengan standar yang terakreditasi dan mutu.	8 Nanda	6 Nanda	3 Nanda	3 Nanda	-	0.7	0.9	0.2	0.4	-	2.2							
	2. Jumlah Perawatan, barang pelayanan fasilitas dan jasa perawatan yang diambatkan.	9 Perawatan	7 Perawatan	6 Perawatan	5 Perawatan	3 Perawatan	0.8	1.8	1.3	1.0	0.4	3.2							
	3. Jumlah laporan tentang vertikal, cetak pengembalian, monitoring dan evaluasi, report pengembangan, akreditasi, RAS, dan lainnya.	22 Laporan	19 Laporan	18 Laporan	19 Laporan	20 Laporan	3.1	89.1	89.6	89.5	90.3	361.6							
	4. Jumlah dokumen Mutu, PMS dan Kajian tentang fasilitas dan jasa.	3 Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0.2	0.3	0	0	0.1	0.6							
	5. Nilai dokumen kebijakan di bidang health and jasa yang implementatif, efektif serta efisien dengan layanan "Blak"																		
	6. Peningkatan efisiensi pengendalian TPA Komban dan BNI																		
	7. Peningkatan kemampuan dukungan fasilitas dan jasa untuk mendukung pelaksanaan tugas Komban dan TNI																		

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Output)/Sasaran Kegiatan (Output) Indikator	Target								Akumulasi Output indikator kegiatan								Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PRIORITYS N. R. K/L
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019									
14109	Pembinaan kesehatan peralihan.																			
	Peningkatan jumlah dan kualitas implementasi etdief serta etison guna meningkatkan pembinaan kesehatan, kemampuan dan pda kelompok utama peralihan Negara.																			
	1. Jumlah kegiatan pembinaan tenaga di bidang kesehatan dengan/pemilihan yang terdidi dan akurat.	23 Nandah	6 Nandah	8 Nandah	5 Nandah	3 Nandah	0,24	0,72	1,12	0,73	0,79	3,60	3,60							
	2. Jumlah pertemuan tentang kesehatan yang dilaksanakan.	9 Pertemuan	8 Pertemuan	10 Pertemuan	9 Pertemuan	7 Pertemuan	0,94	6,18	1,39	1,39	1,31	11,41	11,41							
	3. Jumlah layanan tentang Rupa, Sosialisme, Inovasi, Hinek, Pendidikan, Hinas dan Bagan, Vertikal, Hening, Koning dan Sogepan, serta Hinas Kesehatan.	13 Laporan	13 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	1,81	9,75	10,05	11,16	12,10	41,87	41,87							
	4. Jumlah dukungan MUI, PMS, Kajian, dan Nandah Akademik bidang kesehatan.	3 Dukungan	9 Dukungan	1 Dukungan	2 Dukungan	0 Dukungan	0,66	1,65	0,14	0,32	0	2,77	2,77							
	5. Jumlah pengaduan Akas, O-keu, O-keu.	1 Utang	-	-	-	-	30,00	-	-	-	-	30,00	30,00							
	6. Jumlah kegiatan penyediaan dan/atau dukungan kesehatan di bidang kesehatan.	1 Duk	-	-	-	-	13,00	-	-	-	-	13,00	13,00							
	7. Jumlah kegiatan penyediaan dan/atau dukungan kesehatan di bidang kesehatan.	1 Duk	-	-	-	-	0,35	-	-	-	-	0,35	0,35							
	8. Nilai dukungan kegiatan di bidang kesehatan yang implementasi etdief serta etison dengan banyar "Mile".																			
	9. Peningkatan beres dan/atau dukungan kesehatan di bidang kesehatan.																			
	10. Nilai dukungan rambu nilai di lingkungan Kesehatan dan TNI kepada pda dan PNS Kesehatan dan TNI beserta keluarganya.																			
14110	Pembinaan materi peralihan.																			
	Peningkatan jumlah dan kualitas implementasi etdief serta etison guna meningkatkan pembinaan materi yang diperlukan untuk operasional bakan, meningkatkan kemampuan dan pda kelompok utama peralihan Negara.																			
	1. Jumlah kegiatan di bidang materi peralihan dengan pda yang terdidi dan akurat.	10 Nandah	5 Nandah	6 Nandah	7 Nandah	2 Nandah	1,17	1,05	1,25	1,80	0,65	5,92	5,92							
	2. Jumlah pertemuan tentang materi yang dilaksanakan.	4 Pertemuan	16 Pertemuan	11 Pertemuan	10 Pertemuan	9 Pertemuan	0,56	4,10	4,15	7,57	3,93	20,31	20,31							
	3. Jumlah laporan tentang rupa, Sosialisme, Inovasi, Hinek, Pendidikan, Hinas dan Bagan, Vertikal, Hening, Koning dan Sogepan, serta Hinas Kesehatan.	10 Laporan	13 Laporan	12 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	1,96	6,53	6,69	3,33	3,85	22,36	22,36							
	4. Jumlah dukungan MUI, PMS, dan Kajian bidang kesehatan.	3 Dukungan	4 Dukungan	4 Dukungan	4 Dukungan	4 Dukungan	0,31	0,82	1,81	2,00	2,17	7,11	7,11							
	5. Nilai dukungan kegiatan di bidang materi yang implementasi etdief serta etison dengan banyar "Mile".																			

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Output)/ Sasaran Kegiatan (Output)	Target					Aksi dan Indikator Kinerja					Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PROMOTUS N. R. K/L		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
1412	Revisi dan penyempurnaan daya manusia perusahaan.															
	Berdasarkan kebijakan di bidang SDM yang dipersonal, untuk serta dalam guna peningkatan kualitas, kompetensi untuk pendidikan tenaga															
	1. Jumlah karyawan bidang SDM komponen utama dipetakan yang bentuk dan akurasi	4 Nisalah	1 Nisalah	1 Nisalah	2 Nisalah	2 Nisalah	0,6	0,3	0,1	0,2	0,2	1,4				
	2. Jumlah perantara tentang SDM pendidikan yang ditunjukkan	3 Perburuan	3 Perburuan	3 Perburuan	3 Perburuan	3 Perburuan	0,3	0,3	1,0	0,7	0,7	3,1				
	3. Jumlah layanan tentang Rupa, Pendidikan, Kesehatan, Perencanaan, FGD, Bimbingan, dan	7 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0,8	0,8	0,4	0,8	0,4	3,3				
	4. Jumlah dokumen MUI, PKS, Kajian, dan Nisalah	3 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	0,3	0,4	-	-	0,7					
	5. Jumlah kegiatan penyelenggaraan S&B Babar.	1 Gud	-	-	-	-	0,2	-	-	-	0,2					
	6. Jumlah kegiatan Hasil Nisalah	1 Gud	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1					
	7. Nilai dokumen kebijakan di bidang SDM yang dipersonal, untuk serta dalam dengan kategori "B&K"															
1413	Didukung manajemen dan pelaksanaan target secara halnya Digen															
	Kontribusi						4,2	1,7	1,4	1,4	1,4	10,1				
	Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaksanaan dilaksanakan berdasarkan data yang terdapat dan akurat secara terintegrasi, akurat, dan tepat waktu di lingkungan Satuan Komandan.															
	1. Penilaian dokumen pelaksanaan program dan anggaran dengan kategori "B&K"	100%	100%	100%	100%	100%	4,2	1,7	1,3	1,4	1,4	10,0				
	2. Penilaian dokumen pengendalian dan pelaksanaan pelaksanaan program anggaran dengan kategori "B&K"															
	3. Penilaian capaian target program/ kegiatan.															
	4. Penilaian capaian target dan penyempurnaan anggaran tepat waktu															
27	Revisi dan penyempurnaan daya manusia						3,0	40,0	7,3	8,3	9,1	67,8				
	Terwujudnya kemampuan hasil kerja nasional yang berpengaruh sesuai Master Plan & Sestrat.															
	1. Penilaian ketercapaian sasaran dan pemenuhan kemampuan dan ketahanan kemampuan melalui strategi nasional & Sestrat	80%	80%	80%	80%	80%										
	2. Penilaian pengendalian dan kemampuan kemampuan yang strategis															
3304	Revisi dan penyempurnaan daya manusia						1,3	21,3	4,6	3,2	3,2	40,0				
	Terwujudnya kemampuan hasil kerja nasional yang berpengaruh sesuai Master Plan & Sestrat.															
	Penilaian ketercapaian dan pemenuhan kemampuan dan ketahanan kemampuan melalui strategi nasional & Sestrat.	30%	30%	30%	30%	30%	1,3	21,3	4,6	5,2	5,2	40,0				

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Output)/Sasaran Kegiatan (Output) Indikator	Target							Akumulasi Output minimum rencana							Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PRIORITY N. R. K/L	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019								
3365	Pembinaan Pengembangan dan Kerja sama	1. Penyelidikan pengembangan dan kerja sama kerjasama teknis dan tingkat nasional di tingkat																	
	Penerapan pengabdian dan kerja sama antar Kemendikbud dan lembaga di luar negeri berdasarkan Strategi Nasional di bidang yang memuat standar sesuai tuntutan tugas	60%	60%	60%	60%	60%	0.9	1.3	1.6	1.6	1.7	7.3	Pusat Kerja Balastranca Kerohan						
3366	Pelaksanaan Monitoring dan Pelaksanaan Tugast Teknis Lulusan Pendidikan Sederajat di Berbagai Masyarakat	1. Selama perencanaan, pelaksanaan, pengabdian dan program dilaksanakan berdasarkan dan yang terdiri dari tim dari secara terintegrasi, akurat, dan tepat waktu & tercapai sesuai ketentuan																	
	2. Penerapan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan dengan tingkat "Bak"	100%	100%	100%	100%	100%	0.6	13.0	1.3	1.4	1.5	19.9	Sederajat Balastranca Kerohan						
	3. Penerapan dukungan pelaksanaan dan pelaksanaan pelaksanaan program kegiatan dengan tingkat "Bak"																		
	4. Penerapan capaian target dan pencapaian indikator tugas teknis																		
III	MAHASISWA						1825.8	2367.0	1797.6	2005.3	2282.8	10.478.8							
11.	Pengembangan kegiatan perbukitan terpadu	Pengembangan kegiatan perbukitan terpadu NKRJ serta terdistribusi berdasarkan kegiatan dan rencana terpadu dalam budidaya dan tanaman dan pengabdian terpadu berdasarkan kegiatan dan rencana terpadu					476.1	60.1	63.0	63.9	68.8	733.9							
		Penerapan pengabdian terpadu sesuai pedoman nasional NKRJ																	
1114	Operasi MHR untuk Peningkatan GMP	1. Peningkatan indikator NKRJ dari masyarakat melalui																	
		1. Jumlah sarana yang dapat melaksanakan GMP	6 Sar	6 Sar	6 Sar	6 Sar													
		2. Jumlah pelaksanaan GMP di tingkat	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit													
		3. Penerapan indikator pelaksanaan kegiatan dengan tingkat "Bak"																	
		4. Penerapan dan dalam pasar pasar terpadu dengan yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan nilai tambah dengan tingkat "Bak"																	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Output)/ Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Target						Akhiran (akhir realisasi kegiatan)						Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PROMOTIF N. R. K/L		
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019							
1416	Peningkatan mutu layanan pelanggan (Customer Satisfaction) dan peningkatan kinerja keuangan (Financial Performance)	<p>1. Peningkatan mutu layanan pelanggan (Customer Satisfaction) dan peningkatan kinerja keuangan (Financial Performance)</p> <p>2. Peningkatan mutu layanan pelanggan (Customer Satisfaction) dan peningkatan kinerja keuangan (Financial Performance)</p> <p>3. Peningkatan mutu layanan pelanggan (Customer Satisfaction) dan peningkatan kinerja keuangan (Financial Performance)</p> <p>4. Peningkatan mutu layanan pelanggan (Customer Satisfaction) dan peningkatan kinerja keuangan (Financial Performance)</p> <p>5. Peningkatan mutu layanan pelanggan (Customer Satisfaction) dan peningkatan kinerja keuangan (Financial Performance)</p> <p>6. Peningkatan mutu layanan pelanggan (Customer Satisfaction) dan peningkatan kinerja keuangan (Financial Performance)</p>																	
1417																			
1418																			
1419																			
1420																			
1421																			
1422																			
1423																			
1424																			
1425																			
1426																			
1427																			
1428																			
1429																			
1430																			
1431																			
1432																			
1433																			
1434																			
1435																			
1436																			
1437																			
1438																			
1439																			
1440																			
1441																			
1442																			
1443																			
1444																			
1445																			
1446																			
1447																			
1448																			
1449																			
1450																			
1451																			
1452																			
1453																			
1454																			
1455																			
1456																			
1457																			
1458																			
1459																			
1460																			
1461																			
1462																			
1463																			
1464																			
1465																			
1466																			
1467																			
1468																			
1469																			
1470																			
1471																			
1472																			
1473																			
1474																			
1475																			
1476																			
1477																			
1478																			
1479																			
1480																			
1481																			
1482																			
1483																			
1484																			
1485																			
1486																			
1487																			
1488																			
1489																			
1490																			
1491																			
1492																			
1493																			
1494																			
1495																			
1496																			
1497																			
1498																			
1499																			
1500																			

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Output) / Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Target						Asumsi Output minimum optimal						Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PRIORITY N, R, K/L
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
1418 Operasi SOR TNI	Penyediaan landasan darat, perantara bandara dan barang/kegiatan sebagai sarana transportasi untuk kegiatan kemanusiaan.	Penyediaan perancangan rupa Operasi SOR TNI dengan budget "BAP"	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1419 Operasi Bantuan TNI	Penyediaan dukungan/ partisipasi dan rasa aman kepada pemerintah sipil di daerah bencana dan atau masyarakat sipil dan atau korban yang menderita bencana kemanusiaan.	1. Perencanaan perancangan rupa operasi Bantuan TNI yang dilaksanakan dengan anggaran "BAP"	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1420 Operasi Pembenhayaan Wilayah Perdesaan	Penyediaan, pemertengahan, TML, rambu dan pemertanda guna mendukung pelaksanaan tugas OMP dan OMSIP di wilayah setempat.	2. Jumlah Sarana wilayah Perdesaan Rupa Cipta yang dilaksanakan dengan anggaran "BAP"	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1421 Pemeliharaan Aset dan Sarana	Pemeliharaan aset dan sarana yang ada di wilayah setempat.	1. Alokasi anggaran pemeliharaan aset dan sarana yang ada di wilayah setempat.	100%	100%	100%	100%	100%	11,0	11,0	12,1	12,1	13,2	13,2	60,0	Sat Logistik		
			100%	100%	100%	100%	100%	6,5	6,5	7,2	7,5	7,8	13,8	Sat Logistik			
1422 Pemeliharaan Aset dan Sarana	Pemeliharaan aset dan sarana yang ada di wilayah setempat.	2. Alokasi anggaran pemeliharaan aset dan sarana yang ada di wilayah setempat.	100%	100%	100%	100%	100%	6,5	6,5	7,2	7,5	7,8	13,8	Sat Logistik			
			100%	100%	100%	100%	100%	6,5	6,5	7,2	7,5	7,8	13,8	Sat Logistik			
1423 Kegiatan Bantu Sosial Bencana	1. Jumlah pengabdian Bantu Sosial Bencana	2. Jumlah pengabdian Bantu Sosial Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	22,0	23,1	24,2	25,3	26,5	121,1	Sat Logistik			
			100%	100%	100%	100%	100%	22,0	23,1	24,2	25,3	26,5	121,1	Sat Logistik			

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Output)/Subsasaran Kegiatan (Output) Indikator	Target								Akhirus Tahunan (millions rupiah)								Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PRIORITYS N, R, K/L	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019										
1424 Kegiatan Non-Akademik/Kejuruan	2. Ajaran pengabdian sosial Bermanfaat 3. Ajaran pengabdian sosial Bermanfaat 4. Penemuan Baru, Brand Register dan Brand Baru yang dapat terproteksi sesuai D391P	1 Paker	1 Paker	1 Paker	1 Paker	1 Paker															
		1 Paker	1 Paker	1 Paker	1 Paker	1 Paker															
1425 Kegiatan MKK	1. Ajaran pengabdian masyarakat non Akademik 2. Penemuan non Akademik/Kejuruan yang dapat terproteksi sesuai D391P	3 Paker	3 Paker	3 Paker	3 Paker	3 Paker															
1426 Kegiatan Masud Kesehatan	1. Ajaran pengabdian masyarakat untuk perbaikan dan beli publik sosial Bermanfaat 2. Penemuan MKK untuk bahan dan beli publik yang dapat terproteksi	17 paker	17 paker	17 paker	17 paker	17 paker															
1427 Kegiatan Masud Kesehatan	1. Ajaran pengabdian masyarakat untuk perbaikan dan beli publik sosial Bermanfaat 2. Penemuan masud kesehatan untuk bahan dan beli publik yang dapat terproteksi	4 paker	4 paker	4 paker	4 paker	4 paker															
1428 Kegiatan MKK	1. Ajaran pengabdian masyarakat untuk perbaikan dan beli publik sosial Bermanfaat 2. Penemuan MKK untuk bahan dan beli publik yang dapat terproteksi	10 paker	10 paker	10 paker	10 paker	10 paker															
1429 Kegiatan Masud Kesehatan	1. Ajaran pengabdian masyarakat untuk perbaikan dan beli publik sosial Bermanfaat 2. Penemuan MKK untuk bahan dan beli publik yang dapat terproteksi	45 paker	45 paker	45 paker	45 paker	45 paker															
1430 Kegiatan Non-Akademik	1. Ajaran pengabdian masyarakat untuk perbaikan dan beli publik sosial Bermanfaat 2. Penemuan masud kesehatan yang dapat terproteksi	4 paker	4 paker	4 paker	4 paker	4 paker															
1431 Pengembangan Sarana Perekonomian	1. Ajaran pengabdian masyarakat untuk perbaikan dan beli publik sosial Bermanfaat 2. Penemuan masud kesehatan yang dapat terproteksi	13 Paker	13 Paker	13 Paker	13 Paker	13 Paker															

Program/Kegiatan	Subkegiatan	Target							Asumsi Output tahunan kegiatan							Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PRIORITYS N, R, K/L
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019							
Sistem Bantuan (Okecevi/Suarewa Kegiatan (Okecevi)	1. Ajaran teoritik dan penguasaan bahasa produksi optik, struktur hingga produksi, serpih, dan basis produksi lainnya 2. Peningkatan Perbaikan barang di 3. Peningkatan Perbaikan barang di 4. Peningkatan Perbaikan barang di 5. Serpih Produksi 6. Peningkatan Keahlian TN Yang Baru 7. Peningkatan Serpih produksi yang dapat diproses	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	7 paket	-	1234,9	242,4	283,3	310,2	1.972,8	1000					
		8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	-	164,3	-	-	-	164,3						
		8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	-	221,1	-	-	-	221,1						
		8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	-	293,7	-	-	-	293,7						
		8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	-	494,0	-	-	-	494,0						
		8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	-	242,4	-	-	-	242,4						
		8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	-	283,3	-	-	-	283,3						
13. Peningkatan Perbaikan barang	Peningkatan profesionalitas perawat tingkat untuk meningkatkan OMS/ dan OMP Peningkatan sarana profesional perawat tingkat untuk meningkatkan OMS/ dan OMP	62,3	100,2	164,4	216,2	410,1	1.071,8	UO Malin TN										
1433 Pendidikan Perawatan Diaria Perawatan TN (Dewi)	1. Pendidikan kebidanan perawat TN/ONS dan manajemen keperawatan perawat Diaria 2. Ajaran Berdaya 3. Pendidikan Sarana Pendidikan 4. Peningkatan sarana perawat yang terakreditasi dan sarana kebidanan sehingga menghasilkan perawat perawat 5. Peningkatan sarana perawat yang terakreditasi dan sarana kebidanan sehingga menghasilkan perawat perawat	3 dk	3 dk	3 dk	3 dk	3 dk	-	-	-	-	-	-	-	-				
		3 dk	3 dk	3 dk	3 dk	3 dk	-	-	-	-	-	-	-	-				
		3 dk	3 dk	3 dk	3 dk	3 dk	-	-	-	-	-	-	-	-				
		3 dk	3 dk	3 dk	3 dk	3 dk	-	-	-	-	-	-	-	-				
		3 dk	3 dk	3 dk	3 dk	3 dk	-	-	-	-	-	-	-	-				
1434 Pendidikan perawat/keperawatan/ spesialisasi	Peningkatan kebidanan perawat TN dari awal Diklat keperawatan 1. Ajaran pendidikan kebidanan 2. Peningkatan sarana kebidanan dan sarana kebidanan sehingga menghasilkan perawat perawat	17 dk	17 dk	17 dk	17 dk	17 dk	-	-	-	-	-	-	-					
		17 dk	17 dk	17 dk	17 dk	17 dk	-	-	-	-	-	-	-					
1435 Latihan kompetensi Keperawatan/kebidanan	Peningkatan kompetensi Keperawatan/kebidanan 1. Peningkatan kebidanan/Keperawatan 2. Ajaran kebidanan/Keperawatan 3. Ajaran kebidanan/Keperawatan 4. Ajaran kebidanan/Keperawatan	20%	20%	20%	20%	20%	51,0	84,1	132,2	201,0	406,2	1.010,5	Keperawatan					
		8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	-	-	-	-	-	-	-	-				
		11 paket	11 paket	11 paket	11 paket	11 paket	-	-	-	-	-	-	-	-				
		7 paket	7 paket	7 paket	7 paket	7 paket	-	-	-	-	-	-	-	-				

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Output)/ Sasaran Kegiatan (Output) Indikator	Target								Asumsi Output minimum optimal					Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PRIORITYS N. R. K/L
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019						
1436 Latihan Pemukiman Baliguan TNI	Pengabdian masyarakat ke masyarakat perawat di tingkat Babinsa TNI untuk meningkatkan upaya operasi						7.1	7.7	8.0	8.4	8.8			40.2	Staff Operasi		
	1. Ajarilah latihan pemukiman Baliguan	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket											
	2. Perawatan jiwa di tingkat Babinsa TNI yang mampu melakukan upaya operasi dengan beryoga "Mak"																
1437 Latihan Praktek Operasi	Pengabdian ke masyarakat perawat umum umum TNI yang mampu melaksanakan upaya operasi						4.2	4.4	4.6	4.8	5.1			21.1	Staff Operasi		
	1. Ajarilah latihan yang berkaitan dengan praktek	26 satuan	26 satuan	26 satuan	26 satuan	26 satuan											
	2. Perawatan jiwa latihan latihan praktek operasi yang mampu melakukan upaya operasi dengan beryoga "Mak"																
1438 Meningkatkan Sertifikasi Perawat Perawat	Pengabdian ke masyarakat Babinsa TNI untuk meningkatkan dan meningkatkan profesionalisme perawat beryoga														Staff/Perawat		
	1. Ajarilah peningkatan beryoga beryoga	14 paket	14 paket	14 paket	14 paket	14 paket											
	2. Untuk meningkatkan profesionalisme perawat beryoga																
23. Meningkatkan manajemen dan operasional beryoga	Peningkatan mutu pelayanan perawat dan TNI secara efektif dan efisien agar siap melaksanakan OMP dan OMSIP																
	1. Perawatan jiwa perawat Babinsa TNI yang melaksanakan pelayanan beryoga dengan secara efektif, efisien dan berkeseluruhan														UO Makin TNI		
1439 Meningkatkan administrasi dan pelayanan perawat beryoga	Pengabdian ke masyarakat perawat dan Babinsa TNI yang beryoga																
	1. Perawatan jiwa perawat dan Babinsa TNI yang beryoga																
1440 Pengembangan operasional perawat	Pengabdian ke masyarakat perawat dan Babinsa TNI yang beryoga																
	1. Perawatan jiwa perawat dan Babinsa TNI yang beryoga																
1440 Pengembangan operasional perawat	Pengabdian ke masyarakat perawat dan Babinsa TNI yang beryoga																
	1. Perawatan jiwa perawat dan Babinsa TNI yang beryoga																
1440 Pengembangan operasional perawat	Pengabdian ke masyarakat perawat dan Babinsa TNI yang beryoga																
	1. Perawatan jiwa perawat dan Babinsa TNI yang beryoga																

Program / Kegiatan	Sesuai Program (Output)/Sesuai Kegiatan (Output) Indikator	Target					Akumulasi Output indikator kegiatan					Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PRIORITY N. R. K/L		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
1441 Pengembangan pendidikan/penerapan peraturan undang-undang sipil	1. Jumlah pendidikan/pelajar per tahun. 2. penerapan peraturan TNY yang siap pakai	4 pelajar	4 pelajar	4 pelajar	4 pelajar	4 pelajar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		34 sutirer	34 sutirer	34 sutirer	34 sutirer	34 sutirer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1442 Pemertan arisan dan penerapan	1. Jumlah arisan dan penerapan sutirer yang dipelihara. 2. Penerapan arisan dan penerapan TNY yang siap pakai	34 sutirer	34 sutirer	34 sutirer	34 sutirer	34 sutirer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		34 sutirer	34 sutirer	34 sutirer	34 sutirer	34 sutirer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1443 Pengembangan arisan dan rekam literasi terpadu	1. Jumlah produk arisan dan rekam literasi. 2. Jumlah arisan dan rekam literasi yang dipelihara. 3. Jumlah arisan dan rekam literasi yang dipelihara. 4. Jumlah arisan dan rekam literasi yang dipelihara. 5. Jumlah arisan dan rekam literasi yang dipelihara. 6. Jumlah arisan dan rekam literasi yang dipelihara.	3 pelajar	3 pelajar	3 pelajar	3 pelajar	3 pelajar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		34 sutirer	34 sutirer	34 sutirer	34 sutirer	34 sutirer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III TN/AD	1. Jumlah arisan dan rekam literasi terpadu. 2. Jumlah arisan dan rekam literasi terpadu. 3. Jumlah arisan dan rekam literasi terpadu. 4. Jumlah arisan dan rekam literasi terpadu. 5. Jumlah arisan dan rekam literasi terpadu. 6. Jumlah arisan dan rekam literasi terpadu.	8.646,6	19.421,5	23.089,8	23.660,1	24.942,5	99.200,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.580,9	3.789,9	4.144,3	4.286,5	4.787,4	19.668,8	UD TN/AD	-	-	-	-	-	-	-	-
1444 Dukungan Koperasi Mitra Daurat	1. Jumlah arisan dan rekam literasi terpadu. 2. Jumlah arisan dan rekam literasi terpadu. 3. Jumlah arisan dan rekam literasi terpadu. 4. Jumlah arisan dan rekam literasi terpadu. 5. Jumlah arisan dan rekam literasi terpadu. 6. Jumlah arisan dan rekam literasi terpadu.	59%	60%	58%	100%	100%	264,1	421,4	440,0	453,0	471,7	2.092,2	UD TN/AD	-	-	-
		264,1	421,4	440,0	453,0	471,7	2.092,2	UD TN/AD	-	-	-	-	-	-	-	-

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Output)/ Sasaran Kegiatan (Output) Indikator	Target					Aktual (dalam ribuan rupiah)					Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PROMOTAS N. R. K/L		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
1445	Kegiatan International Mata Diate															
	Penyediaan alat kerja sama nilai Mata Diate dengan negara sahabat guna mendukung kepentingan pembangunan negara.															
	Adanya kegiatan kerja sama nilai Mata Diate dengan negara sahabat yang ditandatangani	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan										
1446	Pengembangan Survei dan Pemasangan															
	Penelitian robotik untuk kegiatan lapangan dalam NBR1 untuk mendukung kegiatan siswa dalam /rehab.															
	Penerapan peta wilayah dalam NBR yang aktual /rehab.	95%	100%	100%	100%	100%										
1447	Pembinaan/Perawatan Kandang															
	Penyediaan kandang Banger untuk mendukung operasi, latihan dan pendidikan.															
	Penerapan kandang Banger untuk mendukung operasi, latihan dan pendidikan.	85.00%	87.00%	90.00%	92.00%	93.00%										
1448	Pembinaan/Perawatan Pemasaran Terbang															
	Penyediaan kandang pesawat terbang untuk mendukung operasi, latihan dan pendidikan.															
	Penerapan kandang pesawat terbang untuk mendukung operasi, latihan dan pendidikan.	44.00%	50.00%	56.00%	62.00%	63.00%										
1449	Pembinaan/Perawatan Alat Angkat Air															
	Penyediaan kandang alat angkut air untuk mendukung operasi, latihan dan pendidikan.															
	Penerapan kandang alat angkut air untuk mendukung operasi, latihan dan pendidikan.	89.00%	90.00%	93.00%	97.00%	100.00%										
1450	Pembinaan/Perawatan Sempai dan Misaal/Agud															
	Penyediaan kandang sempi dan misal/Agud untuk mendukung operasi, latihan dan pendidikan.															
	Penerapan kandang sempi dan misal/Agud untuk mendukung operasi, latihan dan pendidikan.	83.33%	86.57%	88.53%	91.53%	98.53%										

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Output)/ Sasaran Kegiatan (Output) Indikator	Target							Akhir Tahun minimum capaian							Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PRIORITY N. R. K/L	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019								
1431	Manajemen/Perawatan Non Akutaria																		
	Perawatan Non Akutaria yang siap operasional																		
	Persentase kunjungan pasien rawat inpatient untuk mendukung operasi, tindakan dan pendidikan.	93,24%	95,00%	96,00%	97,00%	100,00%													
1432	Pengembangan Kegiatan Teritorial Mitra Darat																		
	Tersedianya sarana/ruang IT di setiap unit pelayanan untuk mendukung TIF guna meningkatkan sistem pelayanan regional di wilayah darat.																		
	1. Arahkan produk teritorial.	120 paket	120 paket	120 paket	120 paket	120 paket													
	2. Persentase kegiatan teritorial TIF AD dengan kategori "baik"																		
1433	Pengembangan sistem dan kualitas konsep Mitra Darat																		
	Tersedianya sistem yang berbasis strategi reformasi guna membangun budaya manajemen dan kinerja yang efektif, efisien dan hemat.																		
	1. Arahkan sistem reformasi yang dibangun	10 sistem	9 sistem	9 sistem	9 sistem	9 sistem													
	2. Persentase sistem reformasi konsep yang terapan dan siap operasional																		
1434	Pembelian dan Pengembangan Perangkat Mitra Darat																		
	Tersedianya hasil Ulang (produksi) Mitra Darat yang berkualitas																		
	1. Arahkan kegiatan Ulang TIF AD	20 kegiatan	20 kegiatan	20 kegiatan	20 kegiatan	20 kegiatan													
	2. Persentase hasil Ulang kegiatan (produksi) Mitra Darat																		
1435	Pembelian dan peminan kesehatan dan fasilitas lain																		
	Tersedianya sarana (pangan) dan fasilitas lain lengkap yang siap pakai.																		
	1. Arahkan sarana dan prasarana infrastruktur di setiap unit pelayanan di unit dan daerah.	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket													
	2. Persentase bangunan (perawatan, bank, pendidikan dan rehabilitasi) di pelayanan siap pakai yang siap digunakan																		
1436	Pengembangan Perencanaan Pemas Nasional Kelayakan Perubahan																		
	Tersedianya masyarakat yang memiliki kesadaran bela negara																		
	1. Arahkan kegiatan pendidikan permasn dan pengembangan komunitas sosial dan pendidikan bela TN	65 kegiatan	65 kegiatan	65 kegiatan	65 kegiatan	65 kegiatan													
	2. Persentase kegiatan Perencanaan nasional mendapat kelulusan Perubahan dengan kategori "baik"																		

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Output)/Sasaran Kegiatan (Output) Indikator	Target					Asumsi Output minimum optimal					Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PRIORITYS N, R, K/L						
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019									
1457 Penyelenggaraan OHSPP	1. Terjadinya pelaksanaan rencana kegiatan pelatihan sebagai MPO dan terdapatnya pemantauan sebagai indikator kinerja kerja. 2. Jumlah kegiatan TIKM yang di Monitoring dan Survei (TKMCO) 3. Persentase pelaksanaan kegiatan TIKM untuk melaksanakan OHSPP sesuai dengan kebutuhan Pabrik TIKM	28 kegiatan	28 kegiatan	28 kegiatan	28 kegiatan	28 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		13. Monevrisasi Kurikulum dan Non Kurikulum, Sarana Kerja Bekerja						46415,0	14118,5	17233,3	17254,9	18251,9	72.003,5							
1458 Kegiatan/Penggiatan Keselamatan Temporer	1. Terjadinya pelaksanaan Kurikulum, sarana, Alat-alat, fasilitas dan Sarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pokok TIKM AD. 2. Persentase ATR/Non ATR/ Sarana Kerja Bekerja yang memadai.	69,82%	74,82%	79,82%	84,82%	89,82%	247,4	1972,8	2006,1	2.148,1	2.190,1	8.264,7								
		1459 Kegiatan/Penggiatan Pemantauan Terhadap (Subsistem)						2718,3	310,3	396,4	473,7	570,3	2.018,3							
1460 Kegiatan/Penggiatan Alat Kerja/ Alat	1. Terjadinya jumlah persentase terhadap (Subsistem) yang sesuai berdasarkan TDP/OSPP 2. Persentase persentase terhadap (Subsistem) yang memadai TDP/OSPP.	26,43%	41,43%	56,43%	71,43%	86,43%	273,3	310,3	396,4	473,7	570,3	2.018,3								
		1461 Kegiatan/Penggiatan Sampah, Mekanik dan Optik						146,5	241,3	218,3	242,3	268,3	1.117,0							
1462 Kegiatan/Penggiatan Sampah, Mekanik dan Optik	1. Terjadinya pelaksanaan rencana kegiatan, alat-alat, dan alat kerja untuk mendukung kegiatan TIKM AD (sesuai TDP/OSPP). 2. Persentase rencana dan status untuk memenuhkan TDP/OSPP.	93,24%	95,00%	96,00%	97,00%	100%	146,5	206,1	228,7	253,9	281,8	1.117,0								
		1463 Kegiatan/Penggiatan Sampah, Mekanik dan Optik						128,1	986,4	1.142,1	1.202,7	1.302,3	5.211,6							
1464 Kegiatan/Penggiatan Sampah, Mekanik dan Optik	1. Persentase rencana dan status untuk memenuhkan TDP/OSPP. 2. Persentase ATR/ Alat kerja untuk memenuhkan TDP/OSPP.	83,52%	86,52%	88,52%	91,52%	94,52%	128,1	986,4	1.142,1	1.202,7	1.302,3	5.211,6								
		1465 Kegiatan/Penggiatan Sampah, Mekanik dan Optik						128,1	986,4	1.142,1	1.202,7	1.302,3	5.211,6							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Output)/Sasaran Kegiatan (Output) Indikator	Target							Akhirus Tahunan (akhir tahun) capaian							Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PRIORITYS N. R. K/L		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019									
1462 Kegiatan/Penggiatan Materi Ausurata	- Terpeledaya kebutuhan materi Ausurata untuk mendukung tugas TNI AD (sewa TCP/DSPP). - Pemasar materi Ausurata untuk memenuai TCP/DSPP.	93,24%	93,00%	96,00%	97,00%	100,00%														
1463 Kegiatan/Penggiatan Materi Non Ausurata	- Terpeledaya kebutuhan materi non Ausurata untuk mendukung tugas TNI AD (sewa TCP/DSPP). - Pemasar materi Non Ausurata untuk memenuai TCP/DSPP.	83,50%	96,50%	88,50%	91,50%	98,50%														
1464 Kegiatan/Penggiatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Makna Damar	- Penulisan bahan dan fasilitas dan sarana untuk mendukung tugas TNI AD (sewa TCP/DSPP). - Pemasar hasil an. sarana dan prasarana pengabdian untuk memenuai DSPP.	26,20%	48,11%	54,88%	65,00%	72,30%														
1465 Kegiatan/Ausurata Strategi Makna Damar	- Terpeledaya kebutuhan Ausurata Strategi Makna Damar untuk mendukung tugas TNI AD (sewa TCP/DSPP). - Pemasar Ausurata Strategi Makna Damar sesuai DSPP.	62,30%	79,65%	91,68%	98,74%	99,45%														
16. Kegiatan/Profesionalisme Personal Makna Damar	- Terpeledaya profesionalisme personal TNI AD untuk melaksanakan OMP/Plan OMSIP. - Pemasar capaian profesionalisme personal TNI AD sesuai Daftar Sasaran Personal OMSIP (DSPP) untuk melaksanakan OMP/Plan OMSIP.	82,41%	76,31%	80,21%	90,00%	90,00%														
1466 Latihan Makna Damar	- Terpeledaya pelaksanaan program tingkat perorangan maupun dengan standar kecakapan seruan Makna Damar.																			

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Output)/ Sasaran Kegiatan (Output) Indikator	Target							Aksi dan indikator kegiatan							Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PRIORITY N, R, K/L
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019							
	- Penyelesaian urusan sengketa dengan kategori "High/ menengah"	89,41%	90,23%	92,03%	100,00%	100,00%	30,4	31,9	33,3	33,2	37,0	268,1	Staff Operatif					
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%												
1407	Latihan Bersama Internasional																	
	- Berwujudnya kerja sama militer Mera Daur dengan negara sahabat guna mendukung kepentingan strategi pertahanan negara. - Penawar latihan bersama Mera Daur dengan negara sahabat yang dilaksanakan.	73,00%	92,85%	83,71%	100,00%	100,00%	30,4	31,9	33,3	33,2	37,0	268,1	Staff Operatif					
1468	Pendidikan Beruma Mera Daur.																	
	- Berprestasinya ketahanan personel dari hasil latihan yang yang mampu memotivasi wisatawan lokal sesuai standar TN AD. - Penawar peserta Ditama yang tidak dengan kategori "High/ menengah".	487,3	511,9	537,3	564,4	592,6	487,3	511,9	537,3	564,4	592,6	2.261,9	Komando Distriktan Pendidikan dan Latihan					
		99,80%	61,70%	67,90%	100,00%	100,00%												
1469	Pendidikan Pembinaan Mera Daur.																	
	- Berprestasinya ketahanan personel dari hasil latihan yang memiliki kemampuan sesuai standar INPAD - Penawar peserta Ditama yang tidak dengan kategori "High/ menengah".	167,0	173,4	184,2	193,4	203,0	167,0	173,4	184,2	193,4	203,0	922,9	Komando Distriktan Pendidikan dan Latihan					
		96,10%	93,20%	101,30%	100,00%	100,00%												
1470	Pendidikan Pengembangan Urutan/Baris Mera Daur.																	
	- Berprestasinya ketahanan personel dari hasil latihan/edukasi yang memiliki kemampuan sesuai standar TN AD. - Penawar peserta Ditama yang tidak dengan kategori "High/ menengah".	33,3	36,0	38,8	61,7	64,8	33,3	36,0	38,8	61,7	64,8	294,3	Komando Distriktan Pendidikan dan Latihan					
		67,80%	83,10%	93,70%	100,00%	100,00%												
1471	Pendidikan Pengembangan Spesialitas Mera Daur.																	
	- Berprestasinya ketahanan personel dari hasil latihan/edukasi yang memiliki kemampuan sesuai standar INPAD. - Penawar peserta Ditama yang tidak dengan kategori "High/ menengah".	100,3	103,3	110,6	116,1	121,9	100,3	103,3	110,6	116,1	121,9	364,3	Komando Distriktan Pendidikan dan Latihan					
		91,40%	60,50%	93,20%	100,00%	100,00%												
1472	Pendidikan Protokol dan Kondisi Mera Daur.																	
	- Berprestasinya ketahanan personel yang memiliki keahlian sesuai standar protokol bersenjata.	96,8	101,6	106,7	112,0	117,6	96,8	101,6	106,7	112,0	117,6	334,7	Komando Distriktan Pendidikan dan Latihan					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Output)/ Sasaran Kegiatan (Output) Indikator	Target							Akhir Tahun (akhir tahun) capaian							Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PRIORITY N, R, K/L
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019							
1473 Pengembangan Sarana Prasarana Profesionalitas Pegawai Mitra Damar	- Penetapan pola tim pendidikan profesional dengan kategori Topik Workshop sesuai standar praktik terbaik	94.60%	79.70%	68.10%	100.00%	100.00%												
1474 Pengembangan Manajemen dan Operasional Mitra Damar	- Penetapan standar standar dan TNAD secara efektif dan efisien agar siap melaksanakan OMP dan OMSIP	7.33%	13.33%	68.22%	23.80%	28.09%												
1475 Pengembangan Perawatan Perawatan Mitra Damar	- Berwujudnya keagihan main dan display keahsan properti serta RNS TN AD beserta Melita Sireja	100%	100%	100%	100%	100%												
1476 Pengembangan Kepribadian Militer Mitra Damar	- Berwujudnya kemampuan terdapat bimbingan dan disiplin militer di TN AD	100%	100%	100%	100%	100%												
1477 Pengembangan Peningkatan Hukuman	- Berwujudnya peningkatan hukuman yang melibatkan baik staf maupun personal TN AD	100%	100%	100%	100%	100%												

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Output)/ Sasaran Kegiatan (Output) Indikator	Target					Aksi dan Indikator Kinerja Utama					Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PRIORITY N. R. K/L			
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019						
1478 Pengembangan Administrasi Perawat	1. Peningkatan pelayanan di TMI AD yang ramah (mendapat perhatian ahli/ tidak bingung) 2. Peningkatan budaya kerja yang sesuai dan dilaksanakan TMI AD 3. Peningkatan pengetahuan tindakan di TMI AD																
		1. Meningkatkan dukungan administratif perawat dalam Dink 2. Peningkatan PMS yang menerima uang muka, dan penambatan idg a dalam waktu PMS yang tepat waktu 3. Peningkatan pengawasan kegiatan protokol VWP/NP yang dilaksanakan POM TMI AD	100%	100%	100%	100%	100%										
1479 Pelaksanaan/ pelaksanaan tindakan Fungsional, Anatomi, dan Siprota Rekrutmen	1. Terpilihnya tenaga perawat profesional, terampil dan Siprota untuk mendukung pelaksanaan tugas TMI AD 2. Jumlah bimbingan belajar dan rumah dinas yang di berikan 3. Peningkatan pelayanan kesehatan, tindakan dan Siprota untuk mendukung pelaksanaan tugas TMI AD	3.203 KK/Unit	3.225 KK/Unit	3.159 KK/Unit	3.227 KK/Unit	3.203 KK/Unit											
1480 Pengembangan Administrasi Pendidikan dan Dukungannya	1. Terpilihnya tenaga ahli/ tenaga profesional berlatar belakang kebidanan TMI AD 2. Peningkatan pendidikan BHP sesuai tugas 3. Peningkatan pemahaman TCM sesuai tugas 4. Peningkatan pengetahuan keperawatan dengan peran	24%	30%	30%	30%	30%											
		60%	60%	60%	60%	60%											
		16.6%	20%	20%	20%	20%											
1481 Pengembangan Ruang dan Ruangan	1. Meningkatkan pelayanan yang benar kepada seluruh perawat, masyarakat dan keluarganya sesuai yang kondusif serta clean TMI AD yang baik 2. Jumlah produk kesehatan 3. Peningkatan produk Rumah dan Ruangan sesuai dan didukung di Rumah TMI AD yang didukung dan dan tidak yang benar sehingga tempat tinggal yang kondusif serta clean yang baik	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket											

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Output)/ Sasaran Kegiatan (Output) Indikator	Target					Aktual (dibaca mundur setiap tahun)					Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PRIORITAS N. R. K/L					
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019								
1482 Pengembangan Administrasi Umum	Berwujudnya Kantor dan unit layanan guna peningkatan layanan.	30 paket	30 paket	30 paket	30 paket	30 paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Berkas Sulke		
	Penerapan unit kerja dan unit kerja (unit kerja) yang diterbitkan tepat waktu dan tepat akurat ke seluruh Kantor, pembinaan dan ngep dan ngep, kegiatan kegiatan rutin dan kegiatan lainnya.																		
1483 Pengembangan administrasi pembelian, perawatan, pengalangan dan layanan.	Berwujudnya sistem pembelian, pelayanan, pengadaan barang dan jasa di TNI AD yang seragam, akurat, tepat waktu dan mampu memonitor keadaannya.						16.3	17.0	17.3	18.0	18.6	87.6		Staff Perencanaan, Direktur Keuangan, Staf Logistik					
	1. Penerapan penyusunan dokumen pembelian organisasi baru sesuai Rencana.	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%													
	2. Penerapan pembelian bahan dan peralatan dalam rangka mendukung operasional Mabis.	14.66%	27.03%	36.44%	43.39%	56.85%													
	3. Penerapan nilai laporan keuangan sesuai dengan SKM dan SKM yang diterbitkan tepat waktu.																		
	4. Nilai dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian anggaran dan laporan keuangan di TNI AD yang akurat dengan kategori "Ade".																		
	5. Nilai dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan TNI AD dengan kategori "Ade".																		
	6. Nilai dokumen pengendalian dan pengendalian pelaksanaan anggaran sesuai anggaran INPAD dengan kategori "Ade".																		
1484 Pengembangan Pengawasan dan Perencanaan	Berwujudnya anggaran keuangan dan laporan keuangan yang benar, akurat, efisien dan akurat.																		
	1. Akurasi sasaran yang terdapat tepat perencana.	51 Satuan	51 Satuan	51 Satuan	51 Satuan	51 Satuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Keperawatan Jendral	
	2. Capaian Anggaran Sesuai terhadap anggaran keuangan TNI AD sebagai bagian dari Laporan Keuangan Kinerja dan TNI.																		
	3. Penerapan temuan Sulke yang benar dari semua materi.																		
	4. Penerapan rekomendasi audit yang dilaksanakan.																		
	5. Tingkat narasumber Sistem Pengendalian Beras Pemerintah (SPM).																		

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Output)/ Sasaran Kegiatan (Output) Indikator	Target								Akhiran (Output indikator kegiatan)								Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PRIORITYS N. R. K/L	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019										
IV. TNIA/L																					
17	Dukung Kegiatan Mitra Lait																				
	- Penyelenggaraan kegiatan operasional TNIA AL																				
	- Penerimaan sediaan TNIA AL yang siap operasi																				
183	Penyelenggaraan Sediaan Hidroin																				
	- Penyelenggaraan dan hidros yang siap dan mengantar melalui pemantauan hidros																				
	1. Airtah dan Pori Lait yang dibuat/instalasi meliputi pemantauan hidros	20 data	20 data	20 data	20 data	20 data	20 data	20 data	20 data	13,0	16,3	18,1	20,0	22,0	91,6						
	2. Airtah dan Pori Lait yang dibuat/instalasi meliputi Pori Lait dan Pori Hidros (Densitas: Navigasi/Chart/ENC)	20 data	20 data	20 data	20 data	20 data	20 data	20 data	20 data	13,0	16,3	18,1	20,0	22,0	91,6						
	3. Airtah hidros pemeliharaan alat serta	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket												
	4. Penerimaan data hidros (perif) yang sudah dibuat dan direvisi																				
186	Pengembangan Sistem dan Bortas Kerja Mitra Lait																				
	- Penyelenggaraan sistem yang berbasis teknologi informasi guna mendukung kinerja dan efisiensi secara menyeluruh edisi dan berwujud																				
	1. Airtah sistem aplikasi dan metode kerja TNIA AL	14 Sistem Aplikasi	14 Sistem Aplikasi	14 Sistem Aplikasi	14 Sistem Aplikasi	14 Sistem Aplikasi	14 Sistem Aplikasi	14 Sistem Aplikasi	14 Sistem Aplikasi	13,0	16,3	18,1	20,0	22,0	91,6						
	2. Airtah layanan pemeliharaan hidros	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket												
	3. Penerimaan sistem informasi yang terpadu dan siap operasional																				
187	Penyelenggaraan Uji Kelelahan Material dan Pasiran Mitra Lait																				
	- Penyelenggaraan material dan hidros Mitra Lait yang siap operasional																				
	1. Airtah serah uji hidros	584 unit	706 unit	730 unit	712 unit	714 unit	714 unit	714 unit	714 unit	10,0	11,0	12,1	13,3	18,9	63,3						
	2. Airtah layanan pemeliharaan material	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket												
	3. Airtah pengiriman dan pemeliharaan alat uji hidros	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket												
	4. Penerimaan material dan hidros Mitra Lait yang siap untuk serah uji hidros																				
188	Pemeliharaan/Perawatan Perakitan Kontrol																				
	- Penyelenggaraan pemeliharaan komunikasi dan pemeliharaan peranti edisi serta yang siap untuk serah uji hidros																				
	1. Airtah pemeliharaan komunikasi, pemeliharaan dan pemeliharaan yang sudah diidentifikasi	425 set	425 set	425 set	425 set	425 set	425 set	425 set	425 set	30,0	33,0	60,3	66,3	73,3	303,3						
	2. Airtah layanan operasional dan pemeliharaan pemeliharaan	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket												
	3. Penerimaan peranti komunikasi dan Pemeliharaan yang siap operasional																				

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Output)/ Sasaran Kegiatan (Output) Indikator	Target								Akhirus Tahun (akhir tahun) capaian					Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PENCAPAIAN N. R. K/L		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019								
1301 Kegiatan/pengabdian Masyarakat	4. Peningkatan pemahaman perikanan Airgung, KOL, KOL, Bonger dan Bonga yang siap dipromosikan						939.7	1.353.3	1.300.3	1.321.4	1.171.3		5.208.2	Disaan Perikanan					
		1. Jumlah pengabdian perikanan Pua usda	16 paket	15 paket	15 paket	15 paket	15 paket												
		2. Jumlah pengabdian perikanan Pua usda keusan laur dan mariti san Aulania Mera Laut.	207 paket	211 paket	201 paket	201 paket	208 paket												
		3. Peningkatan pemahaman perikanan Pasuruan Mera Laut yang siap dipasarkan																	
	4. Peningkatan pemahaman perikanan mariti san Aulania Mera Laut yang siap dipasarkan																		
1302 Kegiatan Aulania Swarga Mera Laut																			
	1. Peningkatan pemahaman Aulania Swarga Mera Laut guna siap dipasarkan setiap tahun 130 AL																		
	2. Jumlah pengabdian Aulania Swarga Mera Laut																		
	3. Peningkatan pemahaman Aulania Swarga Mera Laut yang siap dipasarkan																		
1303 Kegiatan/pengabdian Pesud dan sasana perikanan perikanan Mera Laut							90.0	1.198.7	2.061.1	1.299.2	803.4		5.244.4						
	1. Peningkatan pemahaman Pesud beserta Sasana perikanan Mera Laut guna siap dipasarkan setiap tahun dan Kung TINAL	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket													
	2. Jumlah pengabdian pesud tahun TIN AL	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit													
	3. Peningkatan pemahaman Pesud beserta sasana perikanan Mera Laut yang siap dipasarkan																		
1304 Kegiatan Perikanan Perikanan Mera Laut							7%	20%	20%	23%	17%	142.2	960.2	942.0	1.686.0	820.2	4.291.2		
	1. Peningkatan pemahaman Pesud beserta Sasana perikanan Mera Laut guna siap dipasarkan setiap tahun dan Kung TINAL																		
	2. Jumlah pengabdian pesud tahun TIN AL																		
	3. Peningkatan pemahaman Pesud beserta sasana perikanan Mera Laut yang siap dipasarkan																		
1304 Waring dan Bonger							9.0	9.5	10.5	12.0	13.3		33.1						
	1. Jumlah perikanan yang telah selesai produksi perikanan	1.781 orang	1.489 orang	1.490 orang	2.021 orang	2.027 orang													

Program / Kegiatan	Indikator	Target									Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PROGNOSTIS N. R. K/L	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018				2019
1305. Pengembangan Fasilitas dan Sarana prasarana Profesi/Asosiasi Maritim	1. Ajaran personal malar yang tidak sedang pendidikan perkembangan. 2. Ajaran malar dengan PMS. 3. Penawaran jumlah personal yang tidak sedang dan malar dalam meningkatkan pendidikan personal. 4. Pengembangan fasilitas dan sarana prasarana Profesi/Asosiasi Maritim.	1.302 orang	817 orang	881 orang	1.279 orang	1.243 orang	120,0	340,8	423,8	1.086,3	173,7	2.346,8	Dinas fasilitas pendidikan	
		56 paket	56 paket	56 paket	56 paket	56 paket								
		28 paket	28 paket	28 paket	28 paket	28 paket								
		28 paket	28 paket	28 paket	28 paket	28 paket								
		28 paket	28 paket	28 paket	28 paket	28 paket								
		28 paket	28 paket	28 paket	28 paket	28 paket								
		28 paket	28 paket	28 paket	28 paket	28 paket								
1306. Pengembangan Fasilitas Operasi Maritim	1. Ajaran latihan malar laut. 2. Ajaran gelar Tugan Kemper Tingkat IV TNM AL. 3. Ajaran latihan beam area dengan sarana simulator dan arduubak XE. 4. Ajaran malar dalam rangka program Latihan beam area, seminar, ahjiponim dan workshop. 5. Penawaran latihan Maritim yang memuat malar dalam tugan operasi dengan kategori "High".	22 giat	22 giat	22 giat	22 giat	22 giat	80,3	247,3	260,0	271,6	283,9	1.143,3	SMA Operasi	
		2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket								
		46 paket	46 paket	46 paket	46 paket	46 paket								
		58 paket	58 paket	58 paket	58 paket	58 paket								
		58 paket	58 paket	58 paket	58 paket	58 paket								
		58 paket	58 paket	58 paket	58 paket	58 paket								
		58 paket	58 paket	58 paket	58 paket	58 paket								
1307. Dinas Pengembangan, Spesialisasi, Peningkatan dan Kemajuan serta Dukung Maritim	1. Ajaran pendidikan personal. 2. Ajaran pendidikan pembaruan. 3. Ajaran pendidikan pengembangan sarana. 4. Ajaran pendidikan spesialisasi/keahlian. 5. Ajaran pendidikan/keahlian/biaya. 6. Penawaran personal Dinas yang tidak dengan kategori "High" dan malar "sewa standar" kemampuan yang ditetapkan TNM AL. 7. Penawaran personal Dukung yang tidak dengan kategori "High" dan malar "sewa standar" kemampuan yang ditetapkan TNM AL.						129,0	137,8	243,3	310,7	341,8	1.221,8	Dinas Pendidikan	
		4 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket								
		3 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket								
		4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket								
		40 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket								
		28 paket	28 paket	28 paket	28 paket	28 paket								
		28 paket	28 paket	28 paket	28 paket	28 paket								

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Output)/ Sasaran Kegiatan (Output) Indikator	Target					Akhir Tahun (akhir tahun rencana)					Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PRIORITAS N. R. K/L				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019							
1308. Pengembangan Psikologi Mitra Lahir	8. Peningkatan peran Debagung yang lebih dengan kegiatan "Baliy" atau melalui "seni standar kompetensi yang dikembangkan TMI AL 9. Peningkatan peran Debagung yang lebih dengan kegiatan "Baliy/ atau melalui" seni standar kompetensi yang dikembangkan TMI AL 10. Peningkatan peran pendididhan prodi yang lebih dengan kegiatan "Teper Widher" sesuai standar prodi terakreditasi																	
							4.0	4.3	4.8	5.3	5.8	24.1	Disain Pendidikan					
1309. Pengembangan Administrasi Personel Mitra Lahir	Berwujudnya terdapat administrasi personel yang meliputi: pembibitan bawak, pembibitanan berbasah, pembibitanan dengan bakwan dan bawak serta pembibitanan modal 1. Pemetaan pemangku orang yang tepat pada jabatan yang tepat 2. Adanya pengembangan administrasi pengabdian personel 3. Adanya pembibitan personel terapan antara lain: 4. Peningkatan peranan bawakan personel dari Mokrana/Selur yang akurat dan tepat waktu 5. Peningkatan peranan dan peranan personel yang lebih dibawakan dengan pembibitan (seni) atau berbasah (seni) 6. Peningkatan administrasi kompetensi orang yang lebih dibawakan & lingkungan personal, di dalam aspek lain, bawakan bawakan. Banyak pembibitan dan, wai pembibitan di																	
							100%	100%	100%	100%	100%							
							4 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket							
							23 paket	23 paket	23 paket	23 paket	23 paket							
235. Pengembangan manajemen dan operasional Mitra Lahir	Berwujudnya dukungan kompetensi dan mandiri dalam mengabdikan bawakan bawakan personel Mitra Lahir agar siap melaksanakan OMSIP dan OMP Peningkatan bawakan personel Mitra Lahir yang siap melaksanakan tugas																	
							100%	100%	100%	100%	100%							
							10%	18%	20%	22%	24%	31.4	56.6	62.3	68.3	73.3	314.1	UO TMI AL

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Output)/ Sasaran Kegiatan (Output) Indikator	Target					Aktual (Output minimum optimal)					Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PROMOTIF N. R. K/L					
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019								
1310 Rehabilitasi/Perawatan peralatan Penguatan, Modifikasi, Susunan Peralatan dan perlengkapan LTGA	1. Penyelesaian bea cukai peralatan lengkap, finalisasi dan Serupa pengalihan LTGA yang siap digunakan secara efektif dan efisien sesuai Page LTGA 2. Penyelesaian peredaran barang dan Susunan untuk mendukung pelaksanaan tugas TNI AL 3. Jarak dan waktu yang diperlukan pemeliharaan dan pemantauan barang 4. Jarak dan waktu pemeliharaan barang	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Fasilitas pendukung		
		88 satuan	88 satuan	88 satuan	88 satuan	88 satuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		9.719 unit	9.719 unit	9.719 unit	9.719 unit	9.719 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1311 Pengembangan Peralatan Kesehatan	1. Perencanaan dan pengalangan peralatan kesehatan dan perawatan obat bagi personel Marina Laut beserta keluarga 2. Penyelesaian bea cukai obat dan peralatan layanan kesehatan 3. Jarak dan waktu layanan, meliputi dukungan operasi, pemeliharaan bea cukai operasi dan 4. Jarak dan waktu pemeliharaan kesehatan 5. Penyelesaian pelayanan penguatan LTGA di TNI AL 6. Penyelesaian tingkat layanan praport dan PNS TNI AL beserta keluarga yang mendapat layanan pemeliharaan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	
		3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1312 Pengembangan Peralatan Hidroam	1. Penyelenggaraan pemeliharaan dan bantuan badan serta penyediaan/pemeliharaan badan yang mendukung beraktivitas dan personel Marina Laut 2. Penyelenggaraan pemeliharaan dan bantuan badan serta pemeliharaan peralatan yang sesuai dan dilaksanakan TNI AL 3. Penyelenggaraan pemeliharaan badan di TNI AL 4. Jarak dan waktu pemeliharaan badan 5. Jarak dan waktu pemeliharaan badan 6. Jarak dan waktu pemeliharaan badan 7. Jarak dan waktu pemeliharaan badan wilayah maritim	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		10 satuan	10 satuan	10 satuan	10 satuan	10 satuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2 giat	2 giat	2 giat	2 giat	2 giat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3 giat	3 giat	3 giat	3 giat	3 giat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Output)/ Sasaran Kegiatan (Output) Indikator	Target							Akhir Tahun minimum capaian							Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PRIORITYS N, R, K/L					
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019												
1333 Pengembangan Administrasi, Perencanaan, Penganggaran dan Keuangan	- Penyelenggaraan kegiatan administrasi pemerintahan, penganggaran, dan keuangan Mera Larat yang akuntabel dan tepat waktu 1. Penetapan nilai laporan keuangan sesuai dengan SAK yang dan SAKM yang dilaksanakan tepat waktu 2. Akurasi penyediaan/masukan administratif pemenuhan, penganggaran dan keuangan mura larat 3. Nilai dokumen perencanaan program dan anggaran TN AL dengan kategori "baik" 4. Nilai dokumen pelaksanaan program dan anggaran TN AL dengan kategori "baik" 5. Nilai dokumen pengendalian dan pelaksanaan program serta anggaran INMIL dengan kategori "baik"	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		100%	100%	100%	100%	100%	43.0	49.3	54.3	59.5	63.5	274.7	Dinas Perkebunan										
		100%	100%	100%	100%	100%																	
		100%	100%	100%	100%	100%																	
		100%	100%	100%	100%	100%																	
1334 Pengembangan Administrasi, Perencanaan dan Dukungan Badan Mera Larat	- Penyelenggaraan dukungan becak dan becak yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran 1. Penetapan dukungan becak yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran 2. Akurasi penyediaan/penganggaran pemenuhan 3. Akurasi penyediaan/masukan administratif pemenuhan dan anggaran sesuai dengan kategori "baik" 4. Akurasi penyediaan dan penyaluran becak dan becak 5. Akurasi penyediaan untuk BMK dan pemenuhan becak 6. Akurasi waktu yang ditentukan dukungan pemenuhan/penganggaran becak 7. Pemenuhan dukungan becak (Packing, Clipping, Handling, Transporting)	100%	100%	100%	100%	100%	6.4	7.1	7.8	8.6	9.4	39.3	Dinas Perikanan										
		100%	100%	100%	100%	100%																	
		100%	100%	100%	100%	100%																	
1335 Pengembangan Produk dan Pemasaran	- Penyelenggaraan dukungan Pemasaran dan Pemasaran yang akurat dan terpercaya bagi pemenuhan Mera Larat dan masyarakat sehingga tercapai status yang mandiri serta cara baik TN AL 1. Akurasi produk pemenuhan 2. Akurasi penyediaan/pemasaran dan pemasaran pemenuhan 3. Pemenuhan produk Pemasaran dan Pemasaran dan dukungan dari dan becak yang becak sehingga tercapai status yang mandiri serta cara yang baik	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket																	
		14 paket	14 paket	14 paket	14 paket	14 paket																	
		14 paket	14 paket	14 paket	14 paket	14 paket																	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Output)/ Sasaran Kegiatan (Output) Indikator	Target					Akhir Tahun minimum capaian					Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PRIORITY N, R, K/L				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019							
1316 Pengembangan Administrasi Perawatan Perawat Mitra Lait	Berwujudnya kompetensi man power dan ASN TNI AL 1. Peningkatan jumlah pengikut dan ASN TNI AL yang ada atau pengalihan ke dinas lain 2. Adanya kunjungan ke rumah sakit 3. Adanya kunjungan ke rumah sakit 4. Adanya kunjungan ke rumah sakit 5. Adanya kunjungan ke rumah sakit 6. Adanya kunjungan ke rumah sakit 7. Adanya kunjungan ke rumah sakit 8. Adanya kunjungan ke rumah sakit	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perawatan Perawat		
		15 giat	15 giat	15 giat	15 giat	15 giat												
		3 giat	3 giat	3 giat	3 giat	3 giat												
		12 giat	12 giat	12 giat	12 giat	12 giat												
		4. Giat. Auditor Eksternal terhadap laporan keuangan TNI AL, sebagai bagian dari Laporan Keuangan Komando dan TNI																
		5. Peningkatan kemampuan soft skill yang dibutuhkan material																
		6. Peningkatan kemampuan soft skill yang dibutuhkan material																
		7. Tingkat partisipasi Sistem Pengendalian Beras Perawatan (SPBP)																
1318 Pengembangan Kapasitas Militer Mitra Lait	Berwujudnya kemampuan vertikal bawahan, dengan nilai dan Perilaku Perilaku yang diharapkan. 1. Adanya peningkatan bawahan, kearifan dan integritas yang diharapkan. 2. Adanya peningkatan nilai-nilai bawahan. 3. Peningkatan prestasi bawahan, peningkatan bawahan dan disiplin militer personal yang dilaksanakan POM TNI AL 4. Peningkatan prestasi bawahan, peningkatan bawahan dan disiplin militer personal yang dilaksanakan POM TNI AL	2 giat	2 giat	2 giat	2 giat	2 giat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pusat Militer		
		2 giat	2 giat	2 giat	2 giat	2 giat												
		2 giat	2 giat	2 giat	2 giat	2 giat												
		2 giat	2 giat	2 giat	2 giat	2 giat												
1317 Pengembangan Pengembangan Dan Perawatan	Berwujudnya peningkatan pengetahuan tentang dan berwujudnya kemampuan Mitra Lait yang efektif dengan peningkatan efektivitas 1. Adanya kegiatan pembinaan pengembangan dan peningkatan efektivitas 2. Adanya kegiatan operasi laporan keuangan/RSKA 3. Adanya kegiatan pembinaan data 4. Giat. Auditor Eksternal terhadap laporan keuangan TNI AL, sebagai bagian dari Laporan Keuangan Komando dan TNI 5. Peningkatan kemampuan soft skill yang dibutuhkan material 6. Peningkatan kemampuan soft skill yang dibutuhkan material 7. Tingkat partisipasi Sistem Pengendalian Beras Perawatan (SPBP)	15 giat	15 giat	15 giat	15 giat	15 giat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Keperawatan Jendral	
		3 giat	3 giat	3 giat	3 giat	3 giat												
		12 giat	12 giat	12 giat	12 giat	12 giat												
		4. Giat. Auditor Eksternal terhadap laporan keuangan TNI AL, sebagai bagian dari Laporan Keuangan Komando dan TNI																
		5. Peningkatan kemampuan soft skill yang dibutuhkan material																
		6. Peningkatan kemampuan soft skill yang dibutuhkan material																
		7. Tingkat partisipasi Sistem Pengendalian Beras Perawatan (SPBP)																
		8. Tingkat kemampuan personal TNI AL terhadap pengetahuan RSKA pengikut TNI AL																

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Output)/ Sasaran Kegiatan (Output)	Target					Aksi dan realisasi kegiatan					Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PRIORITYS N, R, K/L		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
1519 Pengembangan Administrasi Urutan Mitra Usaha	- Berdirinya mitra usaha administrasi pemerintahan sesuai MORA TIR dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Penemuan pasar modal dan surat berharga (seseuai klasifikasi) yang diterbitkan tepat waktu dan tepat akurat	4 giat	4 giat	4 giat	4 giat	4 giat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Adanya kegiatan administrasi urusan perijinan perindustri administrasi urusan, smpg, asuransi, dan Kotid gas ptinggikan.	4 giat	4 giat	4 giat	4 giat	4 giat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V TIR/ALU						7.716,9	15.915,2	15.618,4	17.087,3	15.800,9	72.208,6					
20 Dukungan Kelembagaan Mitra Usaha		12%	19%	21%	23%	26%	3.073,8	5.050,7	5.908,0	6.013,6	6.484,3	26.101,5	UG TIR/ALU			
	- Terwujudnya kelanjutan operasional TIR ALU untuk melaksanakan CMP dan OMBP sesuai Peraturan TIR															
	- Penemuan saham TIR ALU yang siap operasi															
1520 Pengembangan OMSIP Mitra Usaha																
	- Kegiatan tindakan nyata tanggapan kesulitan wilayah MSB dan terdapatnya hasil usaha yang bermutu															
	- Penemuan pemecahan masalah TIR ALU untuk melaksanakan OMSIP sesuai dengan kebutuhan	80%	84%	101%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1521 Perbaikan Perumahan Pwot Usaha, Sempaja & Aneka Usaha							2.078,5	3.182,4	3.541,6	3.906,1	4.240,9	18.049,6	Dinas Jasa			
	- Terwujudnya kelanjutan pemenuhan layanan dan Aneka Usaha lainnya untuk mendukung operasi, latihan dan pendidikan.															
	- Penemuan pasar modal, surat dan Aneka Usaha lainnya yang siap mendukung operasi, latihan dan pendidikan.	52%	19%	21%	23%	25%										
1522 Pengembangan Dukungan Operasional Peningkatan							14,7	242,1	266,4	293,0	322,3	1.138,4	Dinas Peningkatan Operasional			
	- Terwujudnya kelanjutan kegiatan dukungan operasi peningkatan untuk kegiatan operasi, latihan dan pendidikan.															
	- Penemuan Smpg yang siap mendukung operasi peningkatan untuk kegiatan operasi, latihan dan pendidikan.	1.29%	21.29%	23.40%	24.39%	24.31%										
1523 Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Mitra Usaha							16,2	92,8	69,6	71,6	73,7	323,9	Dinas Informasi dan Pengolahan Data			
	1. Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dan siap digunakan untuk mendukung tugas															
	1. Penemuan perangka kerja sistem informasi dan komunikasi yang lengkap dan siap digunakan.	40,7%	38,8%	42,00%	40%	50%										
	2. Penemuan perangka kerja dan aplikasi yang dapat dikintegrasikan menjadi satu sistem	40,7%	38,8%	42,00%	40%	50%										

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sasaran Kegiatan (Output) Indikator	Target					Aktual (data realisasi kegiatan)					Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PROGRES N. B. K/L		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
	3. Tingkat kepuasan pengguna aplikasi yang telah dibangun.	Sangat Puas : 20% Puas 70% Tidak puas : 10%	Sangat Puas : 20% Puas 65% Tidak puas : 15%	Sangat Puas : 20% Puas 70% Tidak puas : 10%	Sangat Puas : 20% Puas 70% Tidak puas : 10%	Sangat Puas : 20% Puas 70% Tidak puas : 10%										
		4. Persentase peningkatan dan aplikasi yang dapat dirangsang menjadi satu sistem.	45%	63%	61%	55%	55%									
524. Peningkatan Pemantauan Realiz. PSU & Altruisme Korlek Larinya.	Terwujudnya kegiatan ndak. PSU dan Altruisme Korlek Larinya untuk membangun general. lalinya dan pendidikan - Persentase realiz. PSU dan Altruisme Korlek Larinya yang siap untuk membangun general. lalinya dan pendidikan.	13%	20%	21%	22%	24%										
525. Peningkatan Ujikekutan Mawar dan Fasilitas Mawar Utara.	Terwujudnya materiil dan fasilitas Mawar Utara yang laik operasi 1. Persentase materiil dan fasilitas Mawar Utara yang menjadi serbisa laik operasi 2. Persentase fasilitas Mawar Utara yang menjadi serbisa laik operasi.	100%	100%	100%	100%	100%	19.0	28.9	33.0	36.3	39.7	156.9	Dinas Kesehatan Tembung dan Kerja			
526. Ulangan Mawar Utara	Terwujudnya hasil Ulangan (produksi) Mawar Utara yang berdaya guna 1. Persentase hasil Ulangan unggahan (produksi unggahan) Mawar Utara 2. Tingkat kepasan calon pengguna materiil terhadap produksi yang telah dibuat.	95%	80%	90%	100%	100%	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	3.7	Dinas Penelitian dan Pengendalian			
527. Peningkatan binaan dan Peningkatan Mawar Utara.	Terwujudnya materiil, kegiatan, dokumen, informasi dan personel yang aman dan dibarengi realisasi yang up date di TNI AU 1. Persentase materiil, kegiatan, dokumen, informasi dan personel yang dapat dibarengi. 2. Persentase dibarengi realisasi yang up date.						29.0	116.9	116.9	116.9	116.9	498.7	Dinas Peningkatan dan Saraf			

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Output)/ Sasaran Kegiatan (Output) Indikator	Target							Aktual (bukan termasuk rencana)							Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PROGRES N. R. K/L		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019									
5528 Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah: Pemerintahan Makra Utara	- Tersedianya ruang adat dan kendali (uang) dengan serta dilakukannya rehabilitasi TN MAU 1. Persentase tingkat minat dan keikutsertaan masyarakat pada kegiatan budidaya 2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan budidaya	80%	85%	86%	86%	87%														
		Sangat Puas : 80% Puan : 80% Tidak puas :-	Sangat Puas : 85% Puan : 85% Tidak puas :-	Sangat Puas : 84% Puan : 86% Tidak puas :-	Sangat Puas : 84% Puan : 86% Tidak puas :-	Sangat Puas : 83% Puan : 87% Tidak puas :-														
5529 Penyelenggaraan Sirta	- Tersedianya informasi tentang situasi udara dan topografi kawasan Lariut serta wilayah wilayah hidrologi yang lengkap dan up to date - Persentase ketepatan informasi tentang situasi udara dan topografi kawasan Lariut serta wilayah hidrologi hidrologi yang up date, akurat dan detail	9,99%	100%	99,70%	99,90%	99,90%														
21. Maklumi u Alusida Non Alusida - Pengangkutan Fasilitas dan Sampah Makra Utara	- Terpentingnya kebijakan Alusida non Alusida, fasilitas, dan Sampah TN MAU untuk siap melaksanakan operasi sesuai dengan kebutuhan yang terutang dalam dokumen KEF - Persentase capaian pemenuhan Alusida non Alusida, fasilitas, dan Sampah TN MAU yang siap melaksanakan operasi sesuai dengan kebutuhan yang terutang dalam dokumen KEF	10%	24%	22%	24%	20%	4.935,1	10.366,5	9.476,4	10.301,8	8.392,3	42.724,1	UO TN MAU							
5530 Pengadaan Alusida Sebagai Makra Utara	- Terpentingnya kebijakan Alusida (semua) yang terutang dalam dokumen KEF guna mendukung Tapolis TN MAU - Persentase Alusida yang dapat dipenuhi (semua) dengan kebutuhan yang terutang dalam dokumen KEF	37%	62%				392,2	691,0	-	-	-	1.052,2	Dinas Administrasi							
5531 Penyelenggaraan/pengadaan Pemasak udara dan dukungan lainnya	- Terpentingnya kebijakan pemasak udara (semua) yang terutang dalam dokumen KEF guna mendukung Tapolis TN MAU 1. Persentase pemasak udara yang siap digunakan 2. Persentase kapasitas pemasak udara yang built up pada semua sistem terumbu 3. Persentase keengkapan pemasak udara di Lariut Operasi	10%	24%	24%	26%	19%	1.790,0	4.349,0	4.420,5	4.709,1	2.817,3	19.076,8	Dinas Administrasi							

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) Indikator	Target					Aktual (data realisasi kegiatan)					Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PROJEK/AS N. R. K/L
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
532 Peningkatan/Perbaikan Fasilitas dan Sarana Mitra Udana	Peningkatan/Perbaikan Fasilitas dan Sarana Mitra Udana - guru mendukung TUpol TN/AU - Persentase beasiswa dan Sertifikasi yang siap digunakan TN/AU						465,6	1.703,6	1.373,0	1.408,3	1.534,6	6.566,1	Unit Organisasi dan Komunitas	
		7%	26%	20%	22%	25%								
							690,0	2.035,6	2.200,8	2.374,3	2.672,4	10.079,0	Dinas Komunikasi dan Elektronika	
533 Peningkatan/Perbaikan Riset, PSU dan Aktifitas Lainnya	Peningkatan/Perbaikan Riset, PSU dan Aktifitas Lainnya - Laporan guru mendukung TUpol TN/AU - Persentase Riset, PSU dan Aktifitas lainnya yang siap digunakan TN/AU													
		9%	20%	21%	24%	26%								
							341,4	1.042,8	1.245,1	1.442,3	1.599,6	6.279,2	Dinas Amambila	
534 Peningkatan/Perbaikan Sertifikasi	Peningkatan/Perbaikan Sertifikasi - TUpol TN/AU 1. Persentase Sertifikasi yang bersedia dan siap digunakan guru mendukung TUpol TN/AU 2. Persentase beasiswa anulus yang siap digunakan untuk mendukung TUpol TN/AU													
		6%	20%	24%	27%	23%								
		6%	20%	24%	27%	23%								
535 Peningkatan/Perbaikan Non Aktiva	Peningkatan/Perbaikan Non Aktiva - Laporan guru mendukung TUpol TN/AU - Persentase pendataan Aktiva yang siap digunakan untuk mendukung TUpol TN/AU													
		19,84%	30,07%	14,01%	20,05%	18,94%								
							305,8	505,8	206,0	307,7	208,5	1.603,9	Dinas Maritim	
22. Peningkatan Profesionalisme Personel Mitra Udana	Peningkatan Profesionalisme Personel Mitra Udana - Peningkatan profesionalisme personal staf pendidikan dan penelitian yang memenuhi standar mutu serta mampu memenuhi kebutuhan tugas TN/AU - Persentase peserta didik yang lulus sesuai standar mutu dengan kualifikasi "baik memuaskan"													
		53%	15%	19%	23%	30%								
							405,0	480,7	593,0	724,7	901,4	3.174,7	LO TN/AU	
536 Latihan Mitra Udana	Latihan Mitra Udana 1. Terjadinya kerjasama dan/atau yang diwujudkan personal/pejabat untuk/kegiatan, (di tingkat pusat dan pelaksanaan) melalui tempur/kegiatan (tugas) TN/AU 2. Persentase personal yang keberhasilannya mengikuti beasiswa/pendidikan dalam 6 (enam) bulan setelah berakhir studi dari latihan standar 3. Tingkat keparipatiran peserta latihan melalui pelaksanaan latihan standar 4. Persentase pencapaian hasil uji/kegiatan standar													
							80,0	423,2	189,7	292,2	455,6	1.148,7	Staf Operasional	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Output)/ Sasaran Kegiatan (Output) Indikator	Target									Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PROSEDUR N. B. K/L	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018				2019
537 Pengembangan Pendidikan Mitra Uda.	1. Terpenuhinya personel yang memiliki standar kompetensi sesuai kebutuhan TIK AU 2. Peningkatan jumlah mitra yang telah selesai mengikuti pendidikan 3. Peningkatan jumlah mitra yang telah selesai mengikuti pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%	77,6	83,3	93,9	103,2	113,6	472,6	Unit Organisasi pelaksana	PROSEDUR N. B. K/L
		100%	100%	100%	100%	100%	7,9	8,7	9,6	10,5	11,6	48,4	Unit Organisasi Personel	
		100%	100%	100%	100%	100%	7,9	8,7	9,6	10,5	11,6	48,4	Unit Organisasi Personel	
538	Perubahan Sistem Kelembagaan Personel Mitra Uda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1. Terpenuhinya kebutuhan Sarpras kepegawaian personel Mitra Uda yang telah dibayarkan 2. Terpenuhinya kebutuhan Sarpras kepegawaian personel Mitra Uda yang telah dibayarkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1. Peningkatan jumlah personel yang telah mengikuti pendidikan 2. Peningkatan jumlah personel yang telah mengikuti pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1. Peningkatan jumlah personel yang telah mengikuti pendidikan 2. Peningkatan jumlah personel yang telah mengikuti pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Output)/Sasaran Kegiatan (Output) Indikator	Target					Akhirus Tahun (akhir tahun anggaran)					Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PRIORITY N. R. K/L		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
	3. Gaji auditor eksternal (membayar) laporan keuangan (LK) Kantoran TN (termasuk didalamnya bahan laporan keuangan yang diserahkan kepada Kantoran TN AU) dan biaya lain-lain sesuai ketentuan dari (dari TN AU).	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP										
	4. Hasil perolehan evakuasi akreditasi lembaga (LAPOP Kantoran dan TN (termasuk didalamnya bahan laporan keuangan yang telah mendapat pemenuhan dari berbagai jenis dan dari TN AU).	69 (Cukup Baik)	69 (Cukup Baik)	69 (Cukup Baik)	75 (Baik)	85 (Baik)										
	5. Persentase belanja barang yang tidak terdapat dalam anggaran.															
	6. Persentase rekomendasi audit yang ditindaklanjuti.															
	7. Tingkat mutasi, Sisaun Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)															
55-43	Harapan/wali peradilan Fungsional, Fm & Sarpras serta LTGA															
	1. Terpekeranya kegiatan perbaikan fungsional, realisasi dan Sarpras untuk mendukung pelaksanaan tugas TN AU															
	1. Persentase dari penurunan jumlah kerusakan peralatan fungsional, realisasi, dan sarpras dalam bulan waktu 5 (lima) tahun.	7,9%	62,9%	8,8%	9,7%	10,7%										
	2. Persentase belanja peradilan fungsional, realisasi, dan sarpras untuk mendukung pelaksanaan tugas TN AU secara efektif.	15,5%	27,6%	17,2%	19,5%	23,2%										
	3. Persentase efisiensi perbelanjaan LTGA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.	21,7%	19,7%	20,8%	17%	20,8%										
	4. Persentase peradilan fungsional (realisasi dan Sarpras untuk mendukung pelaksanaan tugas TN AU															
	5. Persentase efisiensi perbelanjaan LTGA di TN AU															
	55-44	Pengembangan Pelayanan Konsultasi														
	1. Terpekeranya dengan konsultasi peradilan PNS TN AU sesuai kewenangannya															
	1. Persentase ketepatan waktu dan peradilan laporan konsultasi	100%	100%	100%	100%	100%	17,6	19,3	21,2	23,3	25,6	106,8	Dinas Konsultasi			
	2. Persentase tunjangan dan insentif yang telah realisasikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%										
	3. Persentase tingkat kepuasan peradilan dan PNS TN AU sesuai kewenangannya yang mendapat laporan pemenuhan	Sangat puas :- Puas :- Tidak puas :-	Sangat puas :- Puas :- Tidak puas :-	Sangat puas :- Puas :- Tidak puas :-	Sangat puas :- Puas :- Tidak puas :-	Sangat puas :- Puas :- Tidak puas :-										
	4. Persentase jasa layanan perantara/konsultasi kepada peradilan dan PNS TN AU sesuai kewenangannya sesuai standar	Optimal :- Cukup optimal :- Kurang optimal :- Tidak optimal :-	Optimal :- Cukup optimal :- Kurang optimal :- Tidak optimal :-	Optimal :- Cukup optimal :- Kurang optimal :- Tidak optimal :-	Optimal :- Cukup optimal :- Kurang optimal :- Tidak optimal :-	Optimal :- Cukup optimal :- Kurang optimal :- Tidak optimal :-										

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output/ Outcome/ Indikator)	Target					Akhir Tahun minimum capaian					Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PRIORITY N, R, K/L							
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019										
154) Penyelenggaraan Administrasi, Pengajaran dan Keuangan	Terwujudnya sistem pencatatan, pelaporan, pengendalian anggaran dan kinerja di TPA AU yang terintegrasi, akurat, valid, sesuai dan mampu memantau pelaksanaan. 2. Terselenggaranya tata kelola keuangan TPA AU yang bersih, tepat waktu, akurat, dan transparan. 1. Persentase laporan keuangan yang tidak menjadi binau ACP 2. Persentase jumlah dokumen pengendalian keuangan yang tidak menjadi binau ACP 3. Nilai dokumen pelaksanaan program dan anggaran TPA AU dengan binau ACP 4. Nilai dokumen pengendalian dan pelaksanaan pelaksanaan program serta anggaran TPA AU dengan binau ACP 5. Persentase nilai laporan keuangan sesuai dengan SA dan SAPA yang diselesaikan tepat waktu																				
154) Penyelenggaraan Pemerintahan Hiburan	Terjadi selesainya permasalahan hiburan yang melibatkan masalah maupun personel TPA AU 1. Persentase persentase hiburan di TPA AU yang selesai (mendapat perhatian dan tindak lanjut) 2. Persentase persentase hiburan perdan yang selesai dan ditangani TPA AU Persentase penyelesaian masalah hiburan di TPA AU 154) Penyelenggaraan Adhika Urahan dan Hal perantara perantara 1. Terwujudnya keuangan dibayar secara optimal dan mendaman dan secara berturut TPA AU 2. Persentase keberhasilan bidang Hutanary GAP (rata, pertanggung jawaban dan pengalihan masalah) 3. Persentase kegiatan pembinaan dan secara berturut 4. Tingkat kepuasan personel yang mengorganisasi masalah dan bidang perantara Persentase perantara perantara yang layak digunakan																				

Program / Kegiatan	Sasaran / Output / Indikator / Sub-indikator	Target					Aktual (dalam ribuan rupiah)					Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PROMOTIS N. B. K/L							
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019										
55.49 Penyelenggaraan Administrasi Personel Madya Utama	Terselenggaranya seluruh administrasi personal yang meliputi: penerimaan baru, pemindahan jabatan, pemindahan disiplin hukuman dan tata laksana serta kesejahteraan moral. 1. * Penetapan pemangkatan orang yang tepat pada jabatan yang tepat. 2. Tingkat kepuasan personal terhadap pelaksanaan administrasi personal TIRAU. 3. Penetapan pelaksanaan hukuman personal dari Kolonel Saker yang akurat dan tepat waktu. 4. Penetapan perkenan dan catatan personal yang valid dan akurat dengan peraturan (untuk rekaman dan validasi). 5. Penetapan administrasi kesejahteraan moral yang telah dilaksanakan (seperti: pensiun, duka, anak, pensiun, biaya urus sakit, biaya pemeliharaan duka, sel. pensiun dll).	80%	87%	89%	91%	92%															
		Sangat puas : 20% Puas : 45% Tidak puas : 30%	Sangat puas : 26% Puas : 47% Tidak puas : 28%	Sangat puas : 27% Puas : 47% Tidak puas : 26%	Sangat puas : 28% Puas : 48% Tidak puas : 24%	Sangat puas : 28% Puas : 47% Tidak puas : 25%															
55.50 Penyelenggaraan Pemetaan Personel Madya Utama	1. Terselenggaranya kesejahteraan prajurit dan ASN TIRAU. 2. Penetapan jumlah ASN dan prajurit TIRAU yang menerima gaji dan hak dengan tepat waktu. 3. QoH TIRAU di masyarakat umum. 4. Penetapan produk Papan dan Papan Cetak dan elektronik di Jajaran TIRAU yang didukung data dan bisa yang benar sehingga mencapai standar yang berkualitas serta etnis yang baik.	100%	100%	100%	100%	100%	6.5	7.2	7.9	8.7	9.5	38.7	Dinas Penerimaan								
		Sangat puas : 30% Puas : 55% Tidak puas : 10%	Sangat puas : 40% Puas : 52% Tidak puas : 8%	Sangat puas : 47% Puas : 51% Tidak puas : 0%	Sangat puas : 48% Puas : 50% Tidak puas : 4%	Sangat puas : 48% Puas : 50% Tidak puas : 2%															
55.50 Penyelenggaraan Pemetaan Personel Madya Utama	1. Terselenggaranya kesejahteraan prajurit dan ASN TIRAU	100%	100%	100%	100%	100%	11.0	12.1	13.3	14.6	16.1	67.0	Dinas Penerimaan Personel								
		Sangat puas : 45% Puas : 50% Tidak puas : 5%	Sangat puas : 48% Puas : 49% Tidak puas : 4%	Sangat puas : 52% Puas : 49% Tidak puas : 3%	Sangat puas : 52% Puas : 47% Tidak puas : 2%	Sangat puas : 50% Puas : 47% Tidak puas : 3%															

Program / Kegiatan	Sesuai Program (Output)/Sesuai Kegiatan (Output) Indikator	Target					Aktual (dalam ribuan rupiah)					Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PROGRES N. B. K/L		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
	2. Tingkat kepuasan personal ASN TPA AU dan pejabat TPA AU terhadap pemenuhan hak proyek TPA AU.	Sangat puas : 15% Puas : 45% Tidak puas : 40%	Sangat puas : 45% Puas : 50% Tidakpuas : 35%	Sangat puas : 35% Puas : 55% Tidakpuas : 30%	Sangat puas : 15% Puas : 60% Tidakpuas : 25%	Sangat puas : 15% Puas : 65% Tidakpuas : 0%										
		1581. Penyelenggaraan Administrasi Urusan/Manajemen														
	- Terwujudnya kelancaran surat menyurat guna pengendalian															
	- Persentase surat masuk (sesuai klasifikasi) yang															
	- ditinjau dari tingkat kelengkapan dan ketepatan waktu	100%	100%	100%	100%	100%										
TOTAL							47.605,9	93.298,0	92.678,4	99.409,7	84.386,0	418.408,2				

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA
RYAMAZARD RYACUDU

TTD

Matriks Kinerja dan Pendanaan Renstra Kemhan dan TNI Tahun 2015-2019

Sub lampiran I Peraturan Menteri Pertahanan
Nomor
Tangga

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output) Indikator	Target					Alokasi (dalam miliaran rupiah)				Jumlah	Unit Organisasi pelaksana	PRIORITAS N, B, K/L	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018				2019
KEMENTERIAN PERTAHANAN														
	1. Terwujudnya sumber daya nasional yang dapat digunakan dalam pertahanan negara.													
	- Persentase potensi sumber daya nasional yang dapat diperdanakan menjadi kekuatan pertahanan yang tangguh untuk mendukung kepentingan pertahanan negara.	14%	21%	24%	28%	32%								
	2. Terwujudnya sistem pertahanan negara yang terintegrasi.													
	- Persentase satuan kerja yang menerapkan manajemen yang terintegrasi, akurat dan akurat ditunjukkan kemhan dan TNI.	86%	87%	88%	89%	100%								
	3. Terwujudnya kekuatan pokok minimum TNI untuk menghadapi seluruh potensi ancaman yang bersumber dari perkembangan lingkungan strategis nasional, regional dan global													
	- Persentase kekuatan pokok minimum (MPP) TNI meliputi aspek alutsista, profesionalisme, sarana dan pasarana serta kesejahteraan yang di bangun.	16%	20%	20%	23%	25%								
	4. Terwujudnya wilayah pertahanan darat serta wilayah yurisdiksi laut dan udara memiliki batas yang jelas dan bebas dari pelanggaran kedaulatan negara													
	1. Persentase wilayah pertahanan negara darat, laut, udara yang memiliki batas yang jelas.													
	2. Persentase penurunan pelanggaran wilayah pertahanan dan daerah rawan.	25%	20%	15%	10%	5%								
	5. Seluruh objek vital nasional yang bersifat strategis aman													
	- Persentase ojek vital nasional bersifat strategis yang dinyatakan aman.	100%	100%	100%	100%	100%								
	6. Kekuatan laut yang mampu menjangkau wilayah pertahanan, pulau-pulau kecil tertuar/terdepan dan mengatasi berbagai bentuk pelanggaran maritim di wilayah laut yurisdiksi nasional.													
	1. Persentase kekuatan laut yang mampu mengamankan pulau-pulau kecil tertuar dan wilayah laut yurisdiksi nasional.	100%	100%	100%	100%	100%								
	2. Persentase penurunan pelanggaran hukum dan gangguan keamanan wilayah laut yurisdiksi nasional.	20%	17%	14%	11%	8%								

1354 Pengelolaan sistem informasi pertahanan negara	- Meningkatkan satuan kerja menerapkan teknologi informasi yang handal, aman dan terintegrasi dalam sistem informasi pertahanan negara. - Persentase satker Kemhan yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang handal, aman dan terintegrasi dalam sistem informasi pertahanan negara.	60%	70%	80%	90%	100%	232.7	202.7	216.8	238.4	261.1	1,151.7	Pusat Data dan Informasi
1355 Pelayanan dan pembinaan keuangan pertahanan	- Menginkatnya pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan keuangan pertahanan yang berdasarkan data yang terkini, terintegrasi, akurat/tepat dan tepat waktu. 1. Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan SAI dan SAKPA yang diselesaikan tepat waktu. 2. Jumlah Laporan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu.	28 dok	28 dok	28 dok	28 dok	28 dok	2.3	9.9	10.9	12.0	13.2	48.3	Pusat Keuangan
1357 Pelayanan bantuan hukum pertahanan	- Menginkatnya pelayanan bantuan hukum yang akurat/tepat. - Persentase penyelesaian perkara hukum.	100%	100%	100%	100%	100%	6.6	7.7	8.0	8.2	8.7	39.3	Biro Hukum
1358 Pelayanan rehabilitasi dan perumahsakitkan	1. Meningkatkan penyandang disabilitas Kemhan dan TNI memperoleh pelayanan rehabilitasi hingga mandiri. 1. Persentase penyandang disabilitas Kemhan dan TNI yang memperoleh rehabilitasi hingga mandiri.	100%	100%	100%	100%	100%	14.1	24.6	27.1	29.8	32.7	128.2	Pusat Rehabilitasi
1359 Dukungan pelayanan umum UO Kemhan	- Tercapainya standar pelayanan prima dalam bidang pengaman, kerumahainggaan dan poliklinik. 1. Persentase pelayanan bidang Pengamanan, kerumahainggaan dan poliklinik yang sesuai standar. 2. Persentase jumlah pengadaan perbaikan dan sarana perlengkapan perkantoran sesuai dengan kebutuhan 3. Persentase BMN yang tercatat dalam sistem secara tepat waktu dan akurat	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	15.8	4.6	7.8	9.1	37.4	Biro Umum
1360 Duk peningkatkan Sarpras aparatur UO Kemhan	- Terperuhnya sarana dan prasana dan Terperuhnya sarana, dan prasana perbaikan dan fasilitas bangunan U.O Kemhan sesuai kebutuhan. - Persentase Sarpras dan bangunan yang telah direnovasi sesuai dengan kebutuhan dan standar mutu	34 paket	33 paket	16 paket	20 paket	24 paket	90.0	145.0	78.9	83.7	88.6	486.2	

1372 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Rarahan Kemhan	- Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yang terkini dan akurat secara terintegrasi, akuratabel dan tepat waktu di lingkungan Badan Sarana Parahabana.								Sekretariat Baranahan Kemhan
1	Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan Satker dengan kategori baik	100%	100%	100%	100%	100%	1.2	4.8	4.4
2	Tingkat keselarasan perencanaan dengan penganggaran								
3	Persentase Satker dengan capaian kegiatan 100%								
4	Persentase Satker dengan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran tepat waktu								
03 Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemhan	- Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan kinerja aparatur Kemhan yang bersih, akuratabel, efektif dan efisien						3.8	4.6	5.1
1.	Opini Auditor Eksternal terhadap laporan keuangan Kemhan dan TNI								Inspektorat Jenderal Kemhan
2.	Persentase Satker yang bebas dari temuan material								
3	Persentase rekomendasi audit yang ditindaklanjuti								
4	Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SIP)								
1373 Dukungan manajemen & pelaksanaan tugas teknis lainnya Ijen Kemhan	- Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yang terkini dan akurat secara terintegrasi, akuratabel dan tepat waktu di lingkungan Ijen Kemhan.						1.4	1.3	1.3
1	Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan Satker dengan kategori baik	100%	100%	100%	100%	100%	1.4	1.3	1.3
2	Tingkat keselarasan perencanaan dengan penganggaran								
3	Persentase Satker dengan capaian kegiatan 100%								
4	Persentase Satker dengan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran tepat waktu								
1374 Pengawasan umum Kemhan/TNI	- Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang kelembagaan, SDM, dan peraturan perundang-undangan.						0.6	0.9	1.1
-	Persentase kegiatan bidang pengawasan umum yang bebas temuan material	60%	65%	70%	75%	80%	0.2	0.2	0.2
									1.0
									1.8
									4.78
									Inspektorat Umum Kemhan

1381 Penelitian dan pengembangan sumber daya pertahanan	- Tersusunnya pemetaan sumber daya pertahanan yang mampu memenuhi kebutuhan pertahanan sesuai kemajuan IPTEK.								202.3	3.2	3.9	4.5	5.0	218.8	Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan
	- Jumlah rekomendasi sumber daya pertahanan yang mampu memenuhi kebutuhan pertahanan sesuai kemajuan IPTEK.	7 rekomendasi	6 rekomendasi	6 rekomendasi	6 rekomendasi	6 rekomendasi	6 rekomendasi	6 rekomendasi	202.3	3.2	3.9	4.5	5.0	218.8	
1382 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Balitbang Kemhan	- Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yang terkini dan akurat secara terintegrasi, akurat/tepat dan tepat waktu di lingkungan Balitbang Kemhan.														Sekretariat Balitbang Kemhan
	1. Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan Satker dengan <small>Indikator: Waktu</small>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.9	3.4	3.5	1.7	2.2	12.7	
	2. Tingkat kejelasan perencanaan dengan <small>Indikator: Kualitas</small>														
	3. Persentase Satker dengan capaian kegiatan														
	4. Persentase Satker dengan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran tepat waktu														
05 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemhan	- Tersedianya lulusan pendidikan dan pelatihan Kemhan/TNI memenuhi standar mutu.								114.9	322.2	63.1	67.6	75.0	642.8	Badan Pendidikan dan Pelatihan
	- Persentase peserta diklat yang lulus standar mutu yang profesional dengan kualifikasi "Baik/memuaskan" dan mampu menjawab tantangan tugas	80%	85%	90%	93%	96%									
1383 Pendidikan dan pelatihan bahasa	- Tersedianya lulusan yang memiliki kemampuan dan keterampilan bahasa.								9.0	10.2	11.2	12.3	13.5	56.2	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bahasa
	- Persentase peserta diklat yang memenuhi standar kompetensi guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan	80%	83%	86%	89%	92%			9.0	10.2	11.2	12.3	13.5	56.2	
1384 Pendidikan dan latihan manajemen pertahanan	- Tersedianya lulusan yang mampu menjawab tantangan tugas di bidang manajemen pertahanan.								8.2	9.0	9.9	10.9	12.0	50.0	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan
	- Manajemen Pertahanan sesuai standar. guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai jabatan	80%	83%	86%	89%	92%			8.2	9.0	9.9	10.9	12.0	50.0	

1385 Pendidikan pelatihan teknis fungsional dan pertahanan	- Tersedianya lulusan yang mampu menjawab tantangan tugas di bidang fungsional pertahanan.						6.9	7.6	8.4	9.2	10.1	42.3	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan
	- Persentase peningkatan kompetensi lulusan Teknifung yang sesuai standar, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai jabatan	80%	83%	86%	89%	92%	6.9	7.6	8.4	9.2	10.1	42.3	
1386 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pertahanan	- Tersedianya lulusan pendidikan tinggi bidang pertahanan sesuai standar nasional dan internasional						88.1	292.5	30.4	31.6	35.5	478.1	Universitas Pertahanan
	- Persentase peningkatan kompetensi lulusan Universitas Pertahanan (Unhan) sesuai standar nasional dan internasional	80%	83%	86%	89%	92%	88.1	292.5	30.4	31.6	35.5	478.1	
1387 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara	- Tersedianya lulusan yang memiliki sikap dan perilaku yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme guna menjalankan hak dan kewajiban Bela Negara						2.7	2.9	3.2	3.5	3.9	16.2	Sekretariat Badiklat Kemhan
	- Persentase Peningkatan kompetensi lulusan diklat Bela Neger yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme sesuai dengan nilai nilai dasar Bela Negara	100%	100%	100%	100%	100%	2.7	2.9	3.2	3.5	3.9	16.2	
1559 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badiklat Kemhan													
- Terwujudnya perencanaan umum dan penganggaran pertahanan yang terintegrasi, akurat, tepat waktu dan mampu memenuhi kebutuhan.													
- Persentase perencanaan dan penganggaran pertahanan negara yang terintegrasi, akurat dan tepat waktu.													
06 Strategi Pertahanan							49.0	64.4	67.8	67.0	69.5	317.7	Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan
- Terwujudnya kebijakan strategi pertahanan negara yang terintegrasi dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional dan global.													
- Jumlah kebijakan pertahanan negara yang mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor.													

1388 Analisis Strategis - Tersusunnya prediksi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global secara tepat waktu dengan data yang terkini dan akurat. - Jumlah produk Analisa Strategis yang dimantapkan/dijadikan dasar kebijakan/ditindaklanjuti							7.1	9.4	9.7	8.7	9.6	44.5	Direktorat Analisa Strategis
1389 Perumusan kebijakan strategis dan kebijakan implementatif - Tersusunnya kelengkapan kebijakan pertahanan negara yang mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor. 1. Jumlah Kebijakan Strategis yang diimplementasikan		13 dokumen	13 dokumen	9 dokumen	7 dokumen	9 dokumen	6.7	6.5	7.1	6.0	6.9	33.2	Direktorat Kebijakan Strategis
1390 Kerjasama Internasional - Terwujudnya Keberhasilan pencapaian kepentingan nasional dalam bidang pertahanan di forum internasional. - Jumlah kerjasama bidang pertahanan dengan negara sahabat.		22 negara	22 negara	22 negara	22 negara	22 negara	12.6	15.5	17.2	17.9	18.8	81.9	Direktorat Kerjasama Internasional
1391 Perumusan kebijakan penggerakan komponen Pertahanan Negara - Tersusunnya rumusan kebijakan penggerakan komponen pertahanan negara dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik nasional, regional maupun global secara terintegrasi. 1. Jumlah kebijakan penggerakan komponen pertahanan negara yang diimplementasikan		8 dokumen	8 dokumen	5 dokumen	4 dokumen	5 dokumen	6.3	7.8	8.0	8.3	8.1	38.4	Direktorat Penggerakan
1392 Perumusan hukum strategi pertahanan negara - Tersusunnya peraturan perundang-undangan bidang pertahanan negara. 1. Jumlah peraturan perundang-undangan bidang pertahanan negara yang ditindaklanjuti		12 RUU	20 RUU	12 RUU	7 RUU	6 RUU	9.3	10.6	10.0	8.7	7.0	45.6	Direktorat Hukum Strategi
1393 Pengelolaan wilayah pertahanan - Terwujudnya wilayah pertahanan yang memiliki batas yang jelas, tata ruang serta survey dan pemetaan yang terintegrasi, akurat, dan terkini 1. Persentase penanganan batas wilayah dengan data batas tata ruang dan survei pemetaan yang terintegrasi dan terkini		3 kajian	13 kajian	7 kajian	7 kajian	7 kajian	4.8	10.4	11.5	12.4	13.6	52.8	Direktorat Wilayah Pertahanan

5.	Jumlah wilayah yang menerima Moner tentang Rencana penyusunan RKA PVBPP	9 wilayah	9 wilayah	9 wilayah	9 wilayah	9 wilayah	9 wilayah	9 wilayah	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	1,3	
6.	Jumlah kegiatan administrasi dalam rangka penyusunan PVBPP	5 UO.	5 UO.	5 UO.	5 UO.	5 UO.	5 UO.	5 UO.	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	4,3	
1398 Perencanaan Pembangunan Pertahanan																
Tersusunnya perencanaan pembangunan pertahanan jangka menengah dan jangka pendek yang terintegrasi, akurat, tepat waktu.																
1.	Persentase dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek yang diselesaikan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,8	1,9	2,1	2,3	2,5	9,6		
2.	Bahan pidato kepegawaian Presiden RI															
3.	Jumlah Peraturan Menteri Pertahanan yang disusun	3 Permenhan	1 Permenhan	2 Permenhan	3 Permenhan	4 Permenhan	3 Permenhan	5 Kepmenhan	0,5	0,3	0,3	0,3	0,4	1,8		
4.	Jumlah Keputusan Menteri Pertahanan yang disusun (renbang)	1 Kepmenhan	3 Kepmenhan	3 Kepmenhan	3 Kepmenhan	4 Permenhan	3 Kepmenhan	5 Kepmenhan	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	1,5		
5.	Jumlah Peraturan Dirjen Renhan yang disusun	2 Perdirjen	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,3		
6.	Jumlah wilayah yang menerima sosialisasi	13 wilayah	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	0,4		
7.	Jumlah wilayah yang menerima himnis	13 wilayah	-	-	-	-	-	-	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	2,7		
8.	Jumlah wilayah yang menerima Moner tentang	20 wilayah	20 wilayah	20 wilayah	20 wilayah	20 wilayah	20 wilayah	20 wilayah	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	4,8		
9.	Penyelenggaraan Rarum Kemhan (sisnet)	1 giat	-	-	-	-	-	-	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4		
10.	Jumlah Evaluasi pelaksanaan evaluasi Renja	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1		
11.	Jumlah kegiatan Workshop Defense Strategy Plan Mapping and workshop Kemhan data management using Focus	5 giat	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	0,6		
12.	Laporan kegiatan Lithuania	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	0,1	0,4	0,4	0,5	0,5	1,9		
13.	Penyerasian proposal kegiatan Lithuania	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	1,0		
14.	Rakor Lithuania	1 giat	1 giat	1 giat	1 giat	1 giat	1 giat	1 giat	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	1,5		
15.	Road Map Lithuania	1 Peraturan	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,1		
16.	Jumlah wilayah yang menerima sosialisasi Permenhan tentang Lithuania dan Asmik Lithuania	8 wilayah	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2		
17.	Jumlah wilayah yang menerima sosialisasi	-	13 wilayah	13 wilayah	13 wilayah	13 wilayah	13 wilayah	13 wilayah	0,0	0,5	0,5	0,6	0,7	2,3		
50 66 7,3 80 88 356																
Direktorat Perencanaan Pembangunan Pertahanan																

1399	Perencanaan Program dan Anggaran	6.0	7.5	8.3	9.1	10.9	41.8	Direktor Perencanaan Program dan Anggaran					
-	Terwujudnya hasil perencanaan program dan anggaran tahunan unit organisasi Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.												
1.	Persentase dokumen rencana kerja dan anggaran (RKN) dan DIPA yang diselesaikan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	1.1	1.3	1.4	1.5	1.6	6.9	
2.	Jumlah Pedoman Perencanaan Program dan Anggaran yang disusun	19 dokumen	19 dokumen	19 dokumen	19 dokumen	19 dokumen	2.0	2.2	2.7	3.0	4.1	14.0	
3.	Jumlah kegiatan Bimbingan Teknis Revisi Anggaran yang dilaksanakan	4 giat	4 giat	4 giat	4 giat	4 giat	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	4.0	
4.	Jumlah wilayah yang menerima Money tentang Standar Biaya Khusus Bidang Hukum, Anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Ops Kemhan dan TNI serta PNBP	-	13 wilayah	13 wilayah	13 wilayah	13 wilayah	-	0.4	0.4	0.5	0.5	1.8	
5.	Jumlah wilayah yang menerima Money tentang Anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Ops Kemhan TNI	-	13 wilayah	13 wilayah	13 wilayah	13 wilayah	-	0.4	0.4	0.5	0.5	1.8	
6.	Jumlah Evaluasi Program dan Anggaran yang disusun	4 lap	4 lap	4 lap	4 lap	4 lap	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	2.7	
7.	Jumlah Evaluasi RKA-KL/DIPA Revisi yang disusun	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	1.3	
8.	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis RKA-KL yang dilaksanakan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0.7	1.0	0.9	0.9	1.0	4.6	
9.	Sumbangan Bahan Nona Keuangan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.6	
10.	Jumlah Peraturan Dirjen yang disusun	1 Perdijen	1 Perdijen	1 Perdijen	1 Perdijen	1 Perdijen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
11.	Jumlah wilayah yang menerima Money tentang Indhan	1 Wilayah	1 Wilayah	1 Wilayah	1 Wilayah	1 Wilayah	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	
12.	Jumlah wilayah yang menerima Money tentang Pamas dan Pamahwan	-	3 Wilayah	3 Wilayah	3 Wilayah	3 Wilayah	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	
13.	Review Baseline RKA-KL Kemhan dan TNI yang disusun	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.9	
14.	Aritektur dan Informasi Kinerja yang disusun	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.9	
15.	Penataan ulang Satker dan penetapan akun satker daerah	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	1.3	
1400	Dakungar mndngemur uar pemsanaan ugar tekns rannya Dirjen Babhan Kemhan	1.7	4.5	1.5	2.0	2.2	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	Setra/ra/ra
-	Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yang terdapat dan akurat secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Dirjen Kemhan Kemhan.												
1.	Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan Satker dengan kategori baik	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	1.7	4.5	1.5	2.0	2.2	11.8	
2.	Tingkat kejelasan perencanaan dengan penganggaran												
3.	Persentase Satker dengan capaian kegiatan 100%												
4.	Persentase Satker dengan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran tepat waktu												
8	Pengembangan teknologi dan industri pertanian	2.100.0	5.109.3	4.703.8	5.089.5	4.597.4	21.600.0	21.600.0	21.600.0	21.600.0	21.600.0	21.600.0	
-	Terwujudnya jumlah kebutuhan Alatista Produksi dalam Negeri secara bertahap dan terwujudnya hasil pengembangan teknologi (First Article) Alphanamam												
-	Persentase pemenuhan kebutuhan Alatista Produksi dalam Negeri secara bertahap dan terwujudnya hasil pengembangan teknologi (First Article) Alphanamam												
1401	TRUBUSAT ZAKUNSAT VARIAN NEGERT VARIAN PENGEMBANGAN PERUK TINDUSAT	2.100.0	5.109.3	4.703.8	5.089.5	4.597.4	21.600.0	21.600.0	21.600.0	21.600.0	21.600.0	21.600.0	
-	Meningkatnya jumlah kebutuhan Alatista produksi dalam negeri terpenuhi secara bertahap												
-	Jumlah Alatista yang diadakan dari industri dalam negeri												
a.	Rupiah Murni (RM)												
		35 Paket											
b.	Pinjaman Dalam Negeri (PDN)												
		60 Paket											
-	Meningkatnya kemandirian Alatista TNI produksi dalam negeri dan pengembangan Pabrik Jiplah.												
-	Jumlah pengadaan Alatista Produksi dalam negeri.												
		600.0	1.500.0	1.500.0	1.500.0	1.500.0	6.600.0	6.600.0	6.600.0	6.600.0	6.600.0	6.600.0	
		1.500.0	3.609.3	3.203.8	3.589.5	3.097.4	15.000.0	15.000.0	15.000.0	15.000.0	15.000.0	15.000.0	

09 Potensi Pertahanan		293,9	445,8	336,5	382,8	687,1	2.146,2	Direktorial Jenderal Potensi
-	Setelah masyarakat sumber daya alam/duaran dan sarana/parasarana nasional berdasarkan secara - Perentase kebijakan pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam/buatan dan sarana/prasarana nasional yang mendukung pertahanan Negara.							
1402 Pembinaan kevetteranan		9,6	12,4	12,6	11,6	11,7	57,9	Direktorial Veteran
-	Terwujudnya komunikasi sosial, pelayanan serta pendataan dan dokumentasi Keweteranan RI yang akurat/bel dan tepat waktu.							
1.	Perentase Veteran RI yang memperoleh pelayanan secara akurat/bel dan tepat waktu.	100%						
2.	Jumlah kebijakan kevetteranan RI.	4 Jdk	4 Jdk	4 Jdk	4 Jdk	4 Jdk	4 Jdk	1,6
3.	Jumlah wilayah yang menerima sosialisasi/bimins meliputi UU Nomor 15 tahun 2012, bimins penyelesaian administrasi hak-hak veteran, bimins dan verifikasi pendataan veteran RI	12 wilayah	12 wilayah	12 wilayah	12 wilayah	12 wilayah	12 wilayah	56,3
1403 Pembinaan kesadaran bela negara		66,5	14,6	16,0	17,4	18,4	132,9	Direktorial
-	Terwujudnya penerapan nilai-nilai bela negara pada pada lingkup pendidikan, masyarakat dan pekerjaan.							
1.	Jumlah wilayah yang melaksanakan pembentukan kader bela negara.	47 Wil						48,0
2.	Jumlah buku pedoman penataan dan pembinaan kesadaran bela negara	2 ped	1 ped	1 ped	1 ped	1 ped	1 ped	1,5
3.	Jumlah wilayah yang menerima bimins, aktualisasi, implementasi, revitalisasi pembinaan kesadaran bela negara	16 daerah	27 daerah	26 daerah	26 daerah	26 daerah	26 daerah	82,5
4.	Jumlah FGD dengan negara sahabat	2 negara	-	-	-	-	-	0,9
1404 Pembentukan dan pembinaan komponen cadangan		13,3	9,5	12,0	65,3	191,9	291,9	Direktorial Komponen Cadangan
-	Terbentuknya komponen cadangan sesuai postur pertahanan.							
1.	Jumlah kebijakan pembentukan dan pembinaan komponen cadangan.	22 wilayah	-	-	-	-	-	11,4
2.	Jumlah wilayah yang menerima sosialisasi tentang pengelolaan SDW untuk Haneg yang dilaksanakan	-	25 wilayah	27 wilayah	33 wilayah	33 wilayah	33 wilayah	4,8
3.	Jumlah kebijakan pembentukan dan pembinaan komponen cadangan	4 kebijakan	9 kebijakan	7 kebijakan	33 wilayah	33 wilayah	33 wilayah	4,8
4.	Jumlah komponen cadangan yang dibentuk	-	-	-	1.000 orang	3.000 orang	3.000 orang	215,4
5.	Pembinaan lanjutan komponen cadangan	-	-	-	-	1.000 orang	18,0	18,0
1405 Penataan dan pembinaan komponen pendukung		10,7	7,2	7,3	7,8	8,4	41,3	Direktorial Komponen Pendukung
-	Tertata dan terbinaanya komponen pendukung secara terintegrasi.							

	1.	Jumlah wilayah yang menerima sosialisasi komponen pendukung meliputi bidang SDM, SDAB dan Satpras nasional	13 wilayah	12 wilayah	11 wilayah	10 wilayah	10 wilayah	10 wilayah	4,5	3,7	2,0	3,7	4,6	18,6		
	2.	Jumlah kebijakan penetapan dan pembinaan komponen pendukung	11 kebijakan	10 kebijakan	17 kebijakan	11 kebijakan	3 kebijakan		1,6	2,0	3,7	2,4	2,0	11,6		
	3.	Jumlah wilayah yang dilaksanakan pendataan meliputi bidang SDM, SDAB dan Satpras nasional	15 wilayah	16 wilayah	18 wilayah	15 wilayah	10 wilayah		1,3	1,4	1,7	1,7	1,9	7,9		
	4.	Jumlah kebijakan pengembangan sistem pertahanan siber	3 kebijakan	-	-	-	-		0,6				0,6			
	5.	Jumlah kerjasama nasional dan internasional pertahanan siber	3 paket	-	-	-	-		1,5				1,5			
	6.	Jumlah wilayah yang menerima sosialisasi dan bimus pertahanan siber	13 Kodam	-	-	-	-		1,3				1,3			
	1406 Pembiayaan potensi teknologi dan industri pertahanan															
		Tersedianya teknologi industri pertahanan sesuai kebutuhan pengguna yang mengikuti perkembangan kemajuan IPTEK yang diupayakan dapat								192,2	335,7	222,5	214,3	386,0	1.350,6	Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan
	1.	Jumlah kebijakan pengembangan industri pertahanan sesuai kemajuan Ipek yang dikembangkan secara mandiri.	7 kebijakan	-	-	-	-		8,9	7,2	7,5	8,1	8,5	40,2		
	2.	Persentase pemenuhan kebutuhan Operasional KIP	-	100%	100%	100%	100%		-	62,8	62,8	62,8	66,5	254,9		
	3.	Jumlah pedoman penataan dan pembinaan teknologi dan industri pertahanan	4 ped	3 ped	3 ped	3 ped	3 ped		1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	4,4		
	4.	Jumlah pelaksanaan TOT meliputi penguasaan teknologi kapal selam, Rudal C-705, medium tank dan PTV/ nision sistem	4 paket	3 paket	4 paket	3 paket	2 paket		180,9	264,9	151,4	142,6	310,2	1.050,0		
	1407 Duk manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dengan Potensi Kemhan															
		Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yang terkini dan akurat secara terintegrasi, akuratabel dan tepat waktu di lingkungan Dityen Pothan Kemhan.								1,7	3,7	3,4	3,6	4,2	16,5	Sekretariat
	1.	Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan Satker dengan kategori baik	100%	100%	100%	100%	100%		1,7	3,7	3,4	3,6	4,2	16,5		
	2.	Tingkat keselarasan perencanaan dengan penganggaran														
	3.	Persentase Satker dengan capaian kegiatan 100%														
	4.	Persentase Satker dengan pelaksanaan kegiatan dan penyertaan anggaran tepat waktu														
	10. Kekuatan Pertahanan									64,3	126,6	120,5	122,6	118,3	552,3	Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan
		Terwujudnya kebijakan kekuatan pertahanan negara yang mampu mengidentifikasi, menanggapi, meniadakan ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu.														
	1.	Jumlah kebijakan dibidang kekuatan pertahanan yang mampu mengidentifikasi, menanggapi, meniadakan ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu.														

1408 Pembiayaan Fasilitas dan Jasa Pertahanan													
-	Tersusunnya kebijakan dan implementasinya dalam pengembangan sistem pertahanan negara di bidang fasilitas dan jasa.												
1.	Jumlah kebijakan pertahanan negara di bidang fasilitas dan jasa dengan pemetaan yang terkini dan akurat.	8 Naskah	6 Naskah	2 Naskah	3 Naskah	-	0,7	0,9	0,2	0,4	2,2		
2.	Jumlah Peraturan tentang pembiayaan fasilitas dan jasa pertahanan yang disosialisasikan	9 Peraturan	7 Peraturan	6 Peraturan	5 Peraturan	3 Peraturan	0,8	1,8	1,3	1,0	5,2		
3.	Jumlah laporan tentang verifikasi, cekiht, registrasi, monitoring dan evaluasi, rapat, pengembangan Jarsiskonta, Roadmap dan pemetaan	22 Laporan	19 Laporan	18 Laporan	19 Laporan	20 Laporan	3,1	89,1	89,6	89,5	361,6		
4.	Jumlah dokumen MoU, PKS dan Kajian bidang fasilitas dan jasa	3 Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0,2	0,3	0	0	0,6		
1409 Pembiayaan kesehatan pertahanan													
-	Tersusunnya kebijakan dan implementasinya dalam pengembangan sistem pertahanan negara di bidang kesehatan.												
1.	Jumlah kebijakan pertahanan negara di bidang kesehatan dengan pemetaan yang terkini dan akurat.	2 Naskah	6 Naskah	8 Naskah	5 Naskah	5 Naskah	0,24	0,72	1,12	0,73	3,60		
2.	Jumlah Peraturan tentang kesehatan yang disosialisasikan	9 Peraturan	8 Peraturan	10 Peraturan	9 Peraturan	7 Peraturan	0,94	6,18	1,39	1,59	11,41		
3.	Jumlah laporan tentang Rapat, Sosialisasi, Inventarisasi, Bimtek, Pendataan, Bimtis dan Bangunan, Verifikasi, Workshop, Roadmap dan Supervisi serta Binaht Kesehatan	15 Laporan	15 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	1,81	9,75	10,05	11,16	44,87		
4.	Jumlah dokumen MoU, PKS, Kajian dan Naskah Akademis bidang Kesehatan	5 Dokumen	9 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0,66	1,65	0,14	0,32	2,77		
5.	Jumlah pengadaan Alkes <i>Cellulare Cellular</i>	1 Unit	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00		
6.	Jumlah kegiatan penyelenggaraan <i>International Congress Military Medicine (ICMM)</i>	1 Giat	-	-	-	-	15,00	-	-	-	15,00		
7.	Jumlah kegiatan penyelenggaraan Sail Bahari	1 Giat	-	-	-	-	0,35	-	-	-	0,35		
1410 Pembiayaan materil pertahanan													
-	Tersusunnya kebijakan dan implementasinya dalam pengembangan sistem pertahanan negara di bidang materil.												
1.	Jumlah kebijakan di bidang materil pertahanan dengan pemetaan yang terkini dan akurat.	10 Naskah	5 Naskah	6 Naskah	7 Naskah	2 Naskah	1,17	1,05	1,25	1,80	5,92		
2.	Jumlah Peraturan tentang materil yang disosialisasikan	4 Peraturan	16 Peraturan	11 Peraturan	10 Peraturan	9 Peraturan	0,56	4,10	4,15	7,57	20,31		
3.	Jumlah laporan tentang Rapat, Inventarisasi, Monitoring, Verifikasi, Evaluasi, Workshop, PGD, Studi Kelayakan, Akseletrasi dan Roadmap	10 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	1,96	6,53	6,69	3,33	22,36		
4.	Jumlah dokumen MoU, PKS dan Kajian bidang Materil	3 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	0,31	0,82	1,81	2,00	7,11		
							4,9	92,0	91,1	90,9	90,8	369,6	Direktorat Fasilitas dan Jasa
							49,0	18,3	12,7	13,8	14,2	108,2	Direktorat Kesehatan
							4,0	12,5	13,9	14,7	10,6	55,712	Direktorat Materil

1412	Pembinaan personel/sumber daya manusia pertahanan	- Tersusunnya kebijakan dan implementasinya dalam pengembangan sistem pertahanan negara di bidang SDM.					2.2	2.0	1.5	1.7	1.3	8.8	Direktoral Sumber Daya Manusia				
		1. Jumlah kebijakan bidang SDM komponen utama dipetakan yang terkini dan akurat.	4 Naskah	1 Naskah	1 Naskah	2 Naskah	2 Naskah	2 Naskah	3 Peraturan	3 Peraturan	2 Laporan	0.6	0.3	0.1	0.2	0.2	1.4
		2. Jumlah Peraturan tentang SDM pertahanan yang disosialisasikan	3 Peraturan	3 Peraturan	5 Peraturan	3 Peraturan	3 Peraturan	3 Peraturan	0.3	0.5	0.8	0.3	0.5	1.0	0.7	0.7	3.1
		3. Jumlah laporan tentang Rapat, Pendidikan, Evaluasi, Pembevelan, FGD, Roadmap, dan Survei	7 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0.8	0.8	0.4	0.8	0.8	0.4	0.8	0.4	3.3
		4. Jumlah dokumen MoU, PKS, kajian dan Naskah Akademis bidang SDM	5 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	0.3	-	-	0.3	0.4	-	-	-	0.7
		5. Jumlah kegiatan penyelenggaraan Sail Bahari	1 Giat	-	-	-	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	-	-	0.2
		6. Jumlah kegiatan Hari Nusantara	1 Giat	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	-	-	0.1
1413	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Dengan Kualifikasi Kemhan	- Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yang terkini dan akurat secara terintegrasi, akurat/tepat dan tepat waktu di lingkungan Difen Pothan Kemhan.					4.2	1.7	1.4	1.4	1.4	1.4	10.1	Sekretariat			
		1. Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan Satker dengan kategori baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4.2	1.7	1.3	1.4	1.4	1.4	10.0		
		2. Tingkat keselarasan perencanaan dengan penganggaran															
		3. Persentase Satker dengan capaian kegiatan															
		4. Persentase Satker dengan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran tepat waktu															
27	Pembinaan Instalasi Strategis Nasional	- Terwujudnya pengendalian, pemeliharaan, pengembangan dan pelaksanaan kawasan instalasi.					3.0	40.0	7.5	8.3	9.1	67.8	Bainstranas Kemhan				
		- Persentase sarana dan prasarana pertahanan yang memenuhi kebutuhan dan standar mutu sesuai kemajuan Iptek serta dapat dikembangkan secara mandiri	80%	80%	80%	80%	80%	80%									
		- Persentase Pengembangan dan Kerjasama Kawasan yang terintegrasi															
5364	Pembinaan Pengamanan dan Pemeliharaan	- Terwujudnya pengamanan dan pemeliharaan kawasan instalasi strategis nasional di Sentul.					1.5	23.5	4.6	5.2	5.2	40.0	Pusat Pembar Bainsanas Kemhan				
		- Persentase pengamanan dan ketertiban yang kondusif, terpeliharanya sarana dan prasarana kawasan serta Pengelolaan keprotokolan di kawasan instalasi strategis nasional di Sentul	30%	30%	30%	30%	30%	30%									

5365 Pembinaan Pengembangan dan Kejasama	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya pengembangan dan kerjasama kawasan istalasi strategis nasional di Sentul. - Persentase pengembangan dan kerja sama antar Kementerian/Lembaga di kawasan Instalasi Strategis Nasional di Sentul yang memenuhi standar sesuai tuntutan tugas 	60%	60%	60%	60%	60%	0,9	1,5	1,6	1,6	1,6	1,7	7,3	Pusat Kerma Bainstranas Kemhan
5366 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yang terkin dan akurat secara terintegrasi, akurat/tepat dan tepat waktu di lingkungan Difjen Potihan Kemhan. 	100%	100%	100%	100%	100%	0,6	15,0	1,3	1,4	1,5	19,9	Sekretariat Bainstranas Kemhan	
1	Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan Satker dengan kategori baik	100%	100%	100%	100%	100%	0,6	15,0	1,3	1,4	1,5	19,9		
2	Tingkat keselarasan perencanaan dengan penganggaran													
3	Persentase Satker dengan capaian kegiatan 100%													
4	Persentase Satker dengan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran tepat waktu													
II. MABES TNI							7.476,6	7.290,5	9.622,7	11.759,0	12.441,9	48.590,7		
11. Penggunaan kekuatan pertahanan integratif	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa dari ancaman nyata. - Persentase pencapaian tugas TNI sesuai prediksi ancaman TNI. 	65%	8%	9%	9%	9%	1.889,4	2.314,1	3.077,2	3.636,7	3.745,9	14.663,3		
1414 Operasi Militer untuk Perang (OMP).	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya pencapaian tugas OMP secara efektif 						1.361,1	1.432,1	1.924,4	2.116,8	2.172,7	9.007,1	Staf Umum TNI	
1	Jumlah satuan yang siap melaksanakan OMP	6 Sat	6 Sat	6 Sat	6 Sat	6 Sat								
2	Jumlah Pelaksanaan OMP (4 giat)	4 giat	4 giat	4 giat	4 giat	4 giat								
1415 Operasi Militer Selain Perang (OMSP).	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya pencapaian tugas OMSP secara efektif 						418,9	758,7	1.002,6	1.353,5	1.402,0	4.935,7	Staf Umum TNI	
1	Jumlah satuan yang siap melaksanakan OMSP	21 Sat	21 Sat	21 Sat	21 Sat	21 Sat								
2	Jumlah pelaksanaan OMSP	10 giat	10 giat	10 giat	10 giat	10 giat								
3	Bekal awal OMSP	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket								
4	Bekal kesehatan OMSP	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket								

1416	Ops Galatib dan Ops Yustisi.	- Terwujudnya keataan prajurit TNI terhadap hukum, disiplin dan tata tertib	24 satker	24 satker	24 satker	24 satker	24 satker	24 satker	24 satker	23,0	24,2	33,5	38,6	39,8	159,1	Staf Intelijen
		1. Jumlah Satker yang melaksanakan operasi	20 satker	20 satker	20 satker	20 satker	20 satker	20 satker	20 satker							
		2. Jumlah Satker yang melaksanakan operasi														
1417	Operasi Intelijen strategis.	- Terwujudnya materiil, kegiatan, dokumen, informasi dan personel yang aman dan intelijen yang up date								39,7	41,7	43,7	45,7	47,8	218,6	
		1. Penerapan sistem deteksi dini konflik	100% pemetaan wilayah	100% FGD di wilayah konflik	30% sosialisasi sistem deteksi dini konflik	60% Habituasi deteksi dini konflik	100% wilayah konflik, bebas konflik									
		2. Persentase data intelijen yang dapat digunakan dalam rangka menangkal ATHG Hamneg.	80%	80%	80%	90%	90%									
		3. Jumlah operasi intelijen yang dilaksanakan	5 giat	5 giat	5 giat	5 giat	5 giat	5 giat	5 giat							
1418	Operasi SAR TNI.	- Terwujudnya pencapaian tugas operasi SAR TNI secara efektif.								7,0	7,4	10,1	11,7	8,9	45,1	Staf Operasi
		- Persentase operasi pencarian dan penyelamatan kecelakaan bencana sesuai Peraturan Pemerintah.	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
1419	Operasi Bantuan TNI	- Terwujudnya pencapaian tugas operasi Bantuan TNI secara efektif.								12,2	13,2	18,2	21,0	37,6	102,2	Staf Operasi
		1. Persentase pencapaian tugas operasi Bantuan TNI yang dilaksanakan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		2. Jumlah Satuan wilayah Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB)	2 Satwil	2 Satwil	2 Satwil	2 Satwil	2 Satwil	2 Satwil								
1420	Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan	- Terwujudnya ruang alat dan kondisi ruang pertahanan yang efektif.								10,0	18,4	25,4	29,2	16,1	99,1	Staf Teritorial
		- Persentase Kotana Ops yang melaksanakan operasi pemberdayaan wilayah pertahanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
1421	Pemeliharaan Alutisista Integratif	- Terwujudnya kesiapan Alut integratif								11,0	11,6	12,1	12,7	13,2	60,6	Staf Logistik
		- Persentase kesiapan Alut integratif	20%	20%	20%	20%	20%	20%								
1422	Pemeliharaan non Alutisista Integratif	- Meningkatkan Kualitas Pemeliharaan Randis/Ransus, Alkom, K4l, Alpalsus, Alkes, Alkomputer, mesin stationer, dan Asintor.								6,5	6,8	7,2	7,5	7,8	35,8	Staf Logistik dan Komunikasi Elektronik
		- Jumlah Randis, Ransus, Alkom, K4l, Alpalsus, Alkes, Alkomputer, mesin stationer, dan Asintor yang dipelihara	9 Paket	9 Paket	9 Paket	9 Paket	9 Paket	9 Paket								Pusat Kesehatan

12.	Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/Sarpras Integratif	26%	18%	19%	19%	19%	19%	1,287.2	2,406.7	1,569.8	1,663.2	1,743.9	8,670.8	
	- Terperuhnya kebutuhan alutsista/non-alutsista/sarpras Integratif untuk siap melaksanakan operasi sesuai dengan kebutuhan MEF. - Persentase alutsista/non-alutsista/sarpras integratif yang siap melaksanakan operasi sesuai dengan kebutuhan MEF.													UO Mabes TNI
1423	Pengadaan Rantis, Suced Ranpur dan Suced Rantis.							22.0	23.1	24.2	25.3	26.5	121.1	
	- Terperuhnya kebutuhan Rantis, Suced Ranpur dan Suced Rantis yang sesuai DSPP													Staff Logistik
	1. Jumlah pengadaan Rantis.	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket							
	2. Jumlah pengadaan Suced Rantis.	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket							
	3. Jumlah pengadaan Suced Ranpur	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket							
1424	Pengadaan Non-Alutsista/Senjata.							45.4	47.7	50.1	52.3	54.6	250.1	
	- Terperuhnya kebutuhan non-Alutsista/Senjata yang sesuai DSPP													Staff Logistik
	- Jumlah pengadaan materil non Alutsista.	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket							
1425	Pengadaan MKK							106.9	110.1	113.4	116.2	119.8	566.4	
	- Terperuhnya kebutuhan bekal pokok MKK													Staff Logistik
	- Jumlah pengadaan MKK.	17 paket	17 paket	17 paket	17 paket	17 paket	17 paket							
1426	Pengadaan Munisi Khusus							25.0	26.3	27.6	28.8	30.1	137.8	
	- Terperuhnya kebutuhan bekal pokok munisi khusus													Staff Logistik
	- Jumlah pengadaan munisi khusus.	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket							
1427	Pengadaan Materil Khusus							279.8	288.2	296.8	303.2	312.4	1,480.4	
	- Terperuhnya kebutuhan Matsus untuk latihan dan bekal pokok													Staff Logistik
	- Jumlah pengadaan materil khusus.	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket							
1428	Pengadaan MKB							626.4	657.7	690.6	721.7	754.1	3,450.5	
	- Terperuhnya kebutuhan MKB untuk latihan dan bekal pokok													Staff Logistik
	- Jumlah pengadaan MKB non Dagri	45 paket	45 paket	45 paket	45 paket	45 paket	45 paket							
1429	Pengadaan Senjata							39.3	41.3	43.4	45.4	47.4	216.8	
	- Terperuhnya kebutuhan Senjata sesuai kebutuhan TOP/DSPP													Staff Logistik
	- Jumlah pengadaan senjata	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket							
1430	Pengadaan Non Alutsista							73.7	77.4	81.3	85.0	88.8	406.2	
	- Terperuhnya Alpalus dan Alkom sesuai kebutuhan													Staff Logistik
	- Jumlah pengadaan Alpalus dan Alkom	13 Paket	13 Paket	13 Paket	13 Paket	13 Paket	13 Paket							

1431	Pembangunan Sarpras Pendukung	- Terlaksananya renovasi dan pembangunan fasilitas pendukung operasi, fasilitas lembaga pendidikan, sarpras, dan fasilitas pendukung lainnya. 1. Jumlah renovasi dan pembangunan fasilitas pendidikan, operasi, fasilitas lembaga pendidikan, sarpras, dan fasilitas pendukung 2. Pembangunan Perumahan Integratif I 3. Pembangunan Perumahan Integratif II 4. Pembangunan Perumahan Integratif III 5. Sarpras Pendukung 6. Pembangunan Kekuatan TNI Tanjung Daru	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	7 paket	-	1,134.9	242.4	285.3	310.2	2,041.5	Staff Logistik
1432	Pengadaan Alutsista Strategis Integratif (tidak ada lokasi)	- Terperuhinya jumlah Alutsista Strategis Integratif sesuai kebutuhan - Persentase Alutsista Strategis Integratif yang dapat terpenuhi.	-	-	-	-	-	1,000.0	9,573.4	116.9	152.0	124.9	10,967.2	Staff Logistik
13.	Profesionalisme Prajurit Integratif	- Terwujudnya profesionalisme prajurit integratif untuk melaksanakan OMPSP dan OMP - Persentase capaian profesionalisme prajurit integratif untuk melaksanakan OMPSP dan OMP	11%	12%	19%	25%	33%	372.6	403.2	617.8	819.9	1,095.4	3,308.9	UO Mabes TNI
1433	Pendidikan Pertama Dikma Perwira TNI (<i>Wenang</i>)	- Terperuhinya kebutuhan personel TNI/PNS dari masyarakat sipil yang memenuhi prasyarat Dikma. 1. Jumlah Pendidikan Pertama 2. Jumlah <i>Wenang</i> 3. Pengadaan Sarpras Pendidikan	5 dik	5 dik	5 dik	5 dik	5 dik	170.6	150.0	206.8	248.2	285.4	1,061.0	Staff Personnel
1434	Pendidikan pengembangan/ spesialisasi	- Terperuhinya kebutuhan personel TNI dari hasil Dikbangpjs - Jumlah pendidikan spesialisasi	17 dik	17 dik	17 dik	17 dik	17 dik	77.2	95.6	112.8	135.4	155.7	576.7	Staff Personnel
1435	Latihan kesiapsiagaan Ops/Latgab/Latma Internasional	- Menguji kemampuan unsur-unsur TNI dalam rangka tugas OMP dan OMPSP. 1. Persentase porsi dan jenis kesiapsiagaan yang sesuai standar 2. Jumlah latihan gabungan 3. Jumlah latihan kesiapsiagaan 4. Jumlah latihan bersama dengan negara lain	20%	20%	20%	20%	20%	51.0	88.1	152.2	263.0	456.2	1,010.5	Staff Operasi

1436	Latihan Pembinaan Balakprus TNI	- Terpeliharanya kemampuan personel di tingkat Balakprus TNI									7.3	7.7	8.0	8.4	8.8	40.2	Staf Operasi
		- Jumlah latihan pembinaan Balakprus	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket								
1437	Latihan Pratugas Operasi	- Terperuhnya kebutuhan Latihan Praturgas Operasi bagi unsur TNI yang akan melaksanakan tugas operasi									4.2	4.4	4.6	4.8	5.1	23.1	Staf Operasi
		- Jumlah satuan yang melaksanakan latihan praturgas	26 satuan	26 satuan	26 satuan	26 satuan	26 satuan	26 satuan	26 satuan								
1438	Pembangunan Sarana Prasarana Profesionalisme Personel Integratif	- Terperuhnya kebutuhan Sapras untuk Peningkatan Profesionalisme Personel Integratif									62.3	57.4	133.4	160.1	184.2	-	Staf Logistik
		- Jumlah pembangunan Sapras Integratif	14 paket	14 paket	14 paket	14 paket	14 paket	14 paket	14 paket								Staf Personel
23.	Penyelenggaraan manajemen dan operasional integratif										3,927.4	2,166.5	4,357.9	5,639.2	5,856.7	21,947.7	
1439	Penyelenggaraan administrasi dan perawatan personel integratif	- Terwujudnya manajemen yang terintegrasi dan akurat/bel berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan TNI									1,853.2	1,835.7	2,425.5	2,537.1	2,537.1	11,188.6	Staf Personel
		- Perentase Satker yang menerapkan manajemen yang terintegrasi dan akurat/bel berdasarkan data yang terkini dan akurat di	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
1440	Penyelenggaraan operasional perkantoran	- Terlaksananya kegiatan dalam rangka mendukung tugas-tugas TNI									1,803.3	1.2	1,494.7	2,212.1	2,407.2	7,918.5	Staf Umum TNI
		- Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas-tugas TNI	11 paket	11 paket	11 paket	11 paket	11 paket	11 paket	11 paket								
1441	Penyelenggaraan pemeliharaan/perawatan perkantoran integratif	- Terperuhnya kebutuhan perkantoran Integratif yang siap pakai									245.4	297.8	395.3	790.6	810.4	2,539.5	Staf Logistik
		- Jumlah pemeliharaan gedung perkantoran	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket								
1442	Perawatan sarana dan prasarana	- Terperuhnya kebutuhan Sarana dan Prasarana yang siap pakai									22.7	21.8	29.1	72.8	74.7	221.1	Staf Logistik
		- Jumlah sarana dan prasarana satker yang dipelihara	34 satker	34 satker	34 satker	34 satker	34 satker	34 satker	34 satker								

1443	Pengeembangan sistem dan evaluasi kinerja integratif	- Peningkatan pengembangan sistem dan evaluasi kinerja, administrasi perencanaan, penganggaran, dan keuangan. - Jumlah produk sistem dan evaluasi kerja, administrasi perencanaan, penganggaran dan keuangan yang disusun	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket		2.8	10.0	13.3	26.6	27.3	80.0	Staf Kebijakan Strategis dan Kebijakan Umum Inspektoral Jenderal
III	TNI AD									44,154.0	54,748.7	65,844.5	70,468.8	73,851.0	309,067.1	
14.	Dukungan Kesiapan Matra Darat									2,580.9	3,789.9	4,144.3	4,386.5	4,757.4	19,658.8	UO TNI AD
	- Terwujudnya kesiapan operasional TNI AD															
	- Persentase satuan TNI AD yang siap operasi		59.00%	60.30%	58.20%	100.00%	100.00%									
1444	Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Darat									264.1	421.4	440.0	455.0	471.7	2,052.2	Staf Pengamanan
	- Terwujudnya materiil, kegiatan, dokumen, informasi dan personel yang aman dan intelijen yang up date di TNI AD									264.1	421.4	440.0	455.0	471.7	2,052.2	
	- Persentase materiil, kegiatan, dokumen, informasi dan personel yang dapat diamankan		94.03%	94.05%	94.09%	94.23%	94.37%									
1446	Penyelenggaraan Survei dan Pemetaan									4.2	4.4	4.5	4.6	4.8	22.5	Direktorat Topografi
	- Tersedianya informasi kondisi geografis wilayah darat NKRI untuk mendukung tugas pokok Matri Darat									4.2	4.4	4.5	4.6	4.8	22.5	
	- Persentase ketersediaan informasi aktual tentang kondisi geografis wilayah darat NKRI		95.00%	118.00%	113.00%	48.00%	41.00%									
1447	Pemeliharaan/Perawatan Ranpur									150.0	172.5	198.4	228.1	262.4	1,011.4	Direktorat Peralatan
	- Terwujudnya Ranpur yang siap mendukung operasi, latihan dan pendidikan.									150.0	172.5	198.4	228.1	262.4	1,011.4	
	- Persentase kesiapan Ranpur untuk mendukung operasi, latihan dan pendidikan.		85.00%	87.00%	90.00%	92.00%	95.00%									
1448	Pemeliharaan/Perawatan Pesawat Terbang									330.0	529.5	573.9	479.3	478.2	2,391.0	Pusat Penerbangan
	- Terwujudnya kesiapan pesawat terbang untuk mendukung operasi, latihan dan pendidikan.									330.0	529.5	573.9	479.3	478.2	2,391.0	
	- Persentase kesiapan pesawat udara untuk mendukung operasi, latihan dan pendidikan.		44.00%	50.00%	56.00%	62.00%	65.00%									

1449	Pemeliharaan/Perawatan Alat Angkut Air	- Terwujudnya kesiapan alat angkut air untuk mendukung operasi, latihan dan pendidikan. - Persentase kesiapan alat angkut air untuk mendukung operasi, latihan dan pendidikan.	89,00%	90,00%	95,00%	97,00%	100,00%		40,0	61,2	67,3	74,1	81,5	324,1	Direktorat Pembekalan Angkatan
1450	Pemeliharaan/Perawatan Senjata dan Munisi/Alpel	- Terwujudnya kesiapan senjata dan munisi/alpel untuk mendukung operasi, latihan dan pendidikan. - Persentase kesiapan senjata dan munisi/alpel untuk mendukung operasi, latihan dan pendidikan.	83,52%	86,52%	88,52%	91,52%	98,52%		1,264,5	1,779,4	1,957,4	2,153,1	2,368,4	9,522,7	Direktorat Peralatan
1451	Pemeliharaan/Perawatan Non Alutsista	- Terwujudnya kesiapan materiil Non Alutsista untuk mendukung operasi, latihan dan pendidikan. - Persentase kesiapan materiil non alutsista untuk mendukung operasi, latihan dan pendidikan.	93,24%	95,00%	96,00%	97,00%	100,00%		512,8	805,4	885,9	974,5	1,071,9	4,250,5	Direktorat Peralatan, Zeni, Perhubungan, Kesehatan, Topografi, Pembekalan Angkatan, Bantuan Jenderal, Penelitian dan Pengembangan
1453	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra Darat	- Terwujudnya Sistem yang Berbasis teknologi Informasi dalam rangka mendukung kinerja dan evaluasi satuan yang efektif, efisien dan bermanfaat - Persentase pengembangan/pengembangan sistem informasi yang tergelar dan siap operasional	39,58%	45,83%	51,03%	57,28%	62,49%		15,3	16,1	16,9	17,7	18,6	84,5	Staf Perencanaan Dinas Informasi dan Pengolahan Data
15.	Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista, Sarpras Matra Darat								4,645,0	14,118,5	17,333,3	17,554,9	18,351,9	72,003,5	
	- Terpenuhinya kebutuhan alutsista, non-alutsista, fasilitas, dan sarpras TNI AD untuk siap melaksanakan operasi sesuai dengan standarisasi TNI AD		69,82%	74,82%	79,82%	84,82%	89,82%								
	- Persentase Alut/Non Alut/ Sarpras Matra Darat yang modern														
1458	Pengadaan/Penggantian Kendaraan Tempur								247,4	1,972,8	2,006,1	2,148,1	2,190,1	8,564,7	Staf Logistik
	- Terpenuhinya Jumlah Rampur yang sesuai kebutuhan TOP/DSP								247,4	1,972,8	2,006,1	2,148,1	2,190,1	8,564,7	Direktorat Peralatan
	- Prosentase Rampur untuk memenuhi TOP/DSP		26,45%	41,45%	56,45%	71,45%	86,45%								

1459	Pengadaan/Penggantian Pesawat Terbang (Sabang)	- Terperuhnya jumlah pesawat terbang (Sabang) yang sesuai kebutuhan TOP/DSPP	62.50%	75.00%	85.16%	92.00%	95.00%	275.3	330.3	396.4	475.7	570.8	2,048.5	Staf Logistik Pusat Penerbang
		- Persentase pesawat terbang (Sabang) untuk memenuhi TOP/DSPP												
1460	Pengadaan/Penggantian Alat Angkut Air	- Terperuhnya jumlah alat angkut air yang sesuai kebutuhan TOP/DSPP	93.24%	95.00%	96.00%	97.00%	100%	146.5	241.3	218.2	242.2	268.8	1,117.0	Staf Logistik, Direktorat Pembekalan Angkatan
		- Persentase alat angkut air untuk memenuhi TOP/DSPP						146.5	206.1	228.7	253.9	281.8	1,117.0	
1461	Pengadaan/Penggantian Senjata, Munisi dan Optik	- Terperuhnya jumlah senjata dan munisi yang sesuai kebutuhan TOP/DSPP	83.52%	86.52%	88.52%	91.52%	98.52%	328.1	986.4	1,142.1	1,322.7	1,532.3	5,311.6	Staf Logistik, Direktorat Peralatan
		1. Persentase senjata dan munisi untuk memenuhi TOP/DSPP						328.1	986.4	1,142.1	1,322.7	1,532.3	5,311.6	
		2. Persentase Aloptik untuk memenuhi TOP/DSPP												
1462	Pengadaan/Penggantian Materil Alutsista	- Terperuhnya jumlah materil Alutsista yang sesuai kebutuhan TOP/DSPP	93.24%	95.00%	96.00%	97.00%	100.00%	110.3	1,034.2	1,160.5	1,308.5	1,475.2	5,088.7	Staf Logistik, Direktorat Peralatan, Perhutungan, Zeni, Pembekalan Angkatan
		- Persentase pengadaan / penggantian materil Alutsista untuk memenuhi TOP/DSPP						110.3	1,034.2	1,160.5	1,308.5	1,475.2	5,088.7	
1463	Pengadaan/Penggantian Materil Non Alutsista	- Terperuhnya jumlah materil non Alutsista yang sesuai kebutuhan TOP/DSPP	83.52%	86.52%	88.52%	91.52%	98.52%	745.7	2,652.0	3,023.4	3,300.8	3,550.2	13,272.2	Staf Logistik, Direktorat Kesehatan, Peralatan, Zeni
		- Persentase pengadaan / penggantian materil Non Alutsista untuk memenuhi TOP/DSPP						745.7	2,652.0	3,023.4	3,300.8	3,550.2	13,272.2	
1464	Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Matra Darat	- Tersedianya sarpras yang dibangun sesuai kebutuhan DSPP	869.1	4,099.7	4,653.4	4,653.4	4,637.2	869.1	4,099.7	4,653.4	4,637.2	7,658.9	21,918.3	Staf Logistik, Direktorat Zeni

	-	Persentase pengadaan fasilitas perkantoran, fasilitas pendukung, fasilitas umum, pembangunan perumahan serta sarana dan prasarana pangkalan untuk memenuhi DSPP	26,23%	48,11%	54,88%	65,00%	72,50%													Staf Logistik, Direktorat Perhubungan, Perhubungan, Zeni
1465	Pengadaan Alutsista Strategis Matra Darat																			
	-	Terwujudnya Alutsista Strategis Matra Darat sesuai kebutuhan DSPP																		
	-	Persentase penjabaran pengadaan Alutsista Strategis Matra Darat	62,30%	79,65%	91,64%	98,74%	99,45%													
16. Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat																				
	-	Terwujudnya profesionalisme personel TNI AD untuk melaksanakan OMP dan OMSP																		
	-	Persentase capaian profesionalisme personel TNI AD sesuai Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP) untuk melaksanakan OMP dan OMSP	82,41%	76,33%	80,21%	90,00%	90,00%													
1466	Latihan Matra Darat																			
	-	Terwujudnya profesionalisme prajurit tingkat perorangan sampai dengan kecabangan satuan Matra Darat																		
	-	Persentase prajurit yang memenuhi persyaratan kelulusan Lator	89,41%	90,23%	92,03%	100,00%	100,00%													
	-	Persentase latihan antar kecabangan yang memenuhi tujuan penyelenggaraan latihan dan sasaran latihan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%													
1467	Latihan Bersama Internasional																			
	-	Terwujudnya kerja sama militer dengan negara sahabat Matra Darat																		
	-	Persentase terwujudnya kerja sama militer dan hubungan bilateral yang kondusif dengan negara sahabat Matra Darat	75,00%	92,85%	85,71%	100,00%	100,00%													
1468	Pendidikan Pertama Matra Darat																			
	-	Terperuhnya kebutuhan personel TNI AD dari hasil Dikma																		
	-	Persentase lulusan Dikma dalam memenuhi kebutuhan personel TNI AD dari hasil Dikma	99,80%	61,70%	67,90%	100,00%	100,00%													

1469	Pendidikan Pembentukan Matra darat	- Terpenuhinya kebutuhan personel TNI AD dari hasil Diktruk									167.0	175.4	184.2	193.4	203.0	922.9	Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan
		- Persentase lulusan Diktruk dalam memenuhi kebutuhan personel TNI AD dari hasil Diktruk	96.10%	93.20%	101.30%	100.00%	100.00%	100.00%			167.0	175.4	184.2	193.4	203.0	922.9	
1470	Pendidikan Pengembangan Umum/Rutin Matra Darat	- Terpenuhinya kebutuhan personel TNI AD dari hasil Dikbang Umum/ Rutin									53.3	56.0	58.8	61.7	64.8	294.5	Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan
		- Persentase lulusan Dikbangum/rutin dalam memenuhi kebutuhan personel TNI AD dari hasil Dikbangum/rutin	67.80%	85.10%	93.70%	100.00%	100.00%	100.00%			53.3	56.0	58.8	61.7	64.8	294.5	
1471	Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Matra Darat	- Terpenuhinya kebutuhan personel TNI AD dari hasil Dikbangspes									100.3	105.3	110.6	116.1	121.9	554.3	Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan
		- Persentase lulusan Dikbangspes dalam memenuhi kebutuhan personel TNI AD dari hasil Dikbangspes	101.40%	60.50%	93.20%	100.00%	100.00%	100.00%			100.3	105.3	110.6	116.1	121.9	554.3	
1472	Pendidikan Profesi dan Keahlian Matra Darat	- Terpenuhinya kebutuhan personel TNI AD dari hasil pendidikan profesi dan keahlian Matra Darat.									96.8	101.6	106.7	112.0	117.6	534.7	Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan
		- Persentase lulusan pendidikan profesi dan keahlian Matra Darat dalam memenuhi kebutuhan personel TNI AD dari hasil pendidikan profesi dan keahlian Matra Darat	94.60%	79.70%	68.30%	100.00%	100.00%	100.00%			96.8	101.6	106.7	112.0	117.6	534.7	
1473	Pembangunan Sarana-Prasarana Profesionalisme Personel Matra Darat	- Terpenuhinya kebutuhan sarpras pendidikan personel Matra Darat									35.0	36.8	38.6	40.5	42.5	193.4	Staf Personel, Staf Logistik dan Direktorat Zeni
		- Persentase pemenuhan kebutuhan sarpras pendidikan personel Matra Darat	100%	100%	100%	100%	100%	100%			35.0	36.8	38.6	40.5	42.5	193.4	
24. Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat		- Terwujudnya taraketola sumber daya TNI AD secara efektif dan efisien agar siap melaksanakan OMP dan OMSP	7.33%	13.52%	68.22%	22.80%	28.09%				35,523.9	35,344.2	42,772.2	46,826.7	48,927.1	209,394.1	UO TNI AD
		- Persentase tingkat efektifitas organisasi	7.33%	13.52%	68.22%	22.80%	28.09%				35,523.9	35,344.2	42,772.2	46,826.7	48,927.1	209,394.1	

1474	Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Darat	- Meningkatkan dukungan perawatan personel Matra Darat.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	28.870,6	30.649,3	30.916,3	30.916,3	29.752,3	151.104,8	Staf Personel
		- Persentase pemenuhan hak-hak Prajurit dan PNS yang diterima tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	28.870,6	30.649,3	30.916,3	30.916,3	29.752,3	151.104,8	Staf Personel
1475	Penggiatan Fungsi Matra Darat	- Meningkatkan dukungan penggiatan fungsi Matra Darat.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	448,7	489,7	539,1	1.539,1	3.847,4	6.864,0	Seluruh Satker
		- Persentase penyelesaian administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	448,7	489,7	539,1	1.539,1	3.847,4	6.864,0	Seluruh Satker
1476	Penyelenggaraan Kepolisian Militer Matra Darat	- Meningkatnya penyelesaian hukum dan disiplin personel TNI AD.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,2	10,1	16,2	20,2	23,0	71,7	Pusat Polisi Militer
		- Persentase penyelesaian pelanggaran hukum dan disiplin personel TNI AD.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,2	10,1	16,2	20,2	23,0	71,7	Pusat Polisi Militer
1477	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum	- Meningkatkan pembinaan dan bantuan hukum bagi personel TNI AD.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	7,2	20,8	29,4	31,4	49,4	138,2	Direktorat Hukum
		1. Persentase perkara yang mendapatkan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	7,2	20,8	29,4	31,4	49,4	138,2	Direktorat Hukum
		2. Persentase satek yang menerima penyuluhan hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	7,2	20,8	29,4	31,4	49,4	138,2	Direktorat Hukum
1478	Penyelenggaraan Administrasi Personel	- Meningkatnya dukungan administrasi personel Matra Darat.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	134,4	248,7	285,3	285,2	193,4	1.147,0	Seluruh Satker
		- Persentase PNS yang menerima uang makan dan penambahan daya tahan tubuh PNS yang tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	134,4	248,7	285,3	285,2	193,4	1.147,0	Seluruh Satker
1479	Pemeliharaan/perawatan peralatan Fungsional, Fasilitas dan Sarpras Perkantoran	- Meningkatnya kesiapan operasional secara kualitatif Peralatan Fungsional, Fasilitas dan Sarpras Perkantoran.	5.203 KK/Unit	5.225 KK/Unit	5.159 KK/Unit	5.327 KK/Unit	5.303 KK/Unit			793,6	726,6	3.473,2	5.891,4	6.868,6	17.753,4	Staf Logistik, Direktorat Zeni
		- Jumlah bangunan gedung dan rumah dinas yang di pilihara.	5.203 KK/Unit	5.225 KK/Unit	5.159 KK/Unit	5.327 KK/Unit	5.303 KK/Unit			793,6	726,6	3.473,2	5.891,4	6.868,6	17.753,4	Staf Logistik, Direktorat Zeni
1480	Penyelenggaraan Administrasi Perbekalan dan Dukungan Bekal	- Meningkatnya dukungan administrasi perbekalan dan dukungan bekal Matra Darat.	28%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	4.621,7	2.352,5	6.664,0	6.492,9	7.302,5	27.433,6	Staf Logistik, Direktorat Pembekalan Angkatan
		1. Persentase pemakaian BMP sesuai pagu.	28%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	4.621,7	2.352,5	6.664,0	6.492,9	7.302,5	27.433,6	Staf Logistik, Direktorat Pembekalan Angkatan
		2. Presentasi pemakaian LTGA sesuai pagu	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	4.621,7	2.352,5	6.664,0	6.492,9	7.302,5	27.433,6	Staf Logistik, Direktorat Pembekalan Angkatan
		3. Persentase pengadaan Kapordlap sesuai dengan norma	16,6%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	4.621,7	2.352,5	6.664,0	6.492,9	7.302,5	27.433,6	Staf Logistik, Direktorat Pembekalan Angkatan

1481	Penyelenggaraan Perpas dan Perum	- Meningkatkan dukungan perancangan pasukan dan perancangan umum. - Jumlah produk penerangan.	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	27.9	41.6	47.9	57.9	74.0	249.3	Dinas Penerangan
1482	Penyelenggaraan Administrasi Umum	- Meningkatkan dukungan administrasi umum Matrik Darat. - Jumlah kegiatan dukungan administrasi umum meliputi kegiatan pendidikan dan latihan fungsional, pembinaan mental, rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan/kelompok kerja/konsultasi, pembinaan olah raga dan kesenian, kegiatan anggaran rutin dan	30 paket	30 paket	30 paket	30 paket	30 paket	601.1 601.1	787.9 787.9	783.3 783.3	1,574.3 1,574.3	797.9 797.9	4,544.5 4,544.5	Seluruh Satker	
1483	Penyelenggaraan administrasi pembinaan, perencanaan, penganggaran dan keuangan	- Terwujudnya validitas organisasi di jajaran TNI AD sesuai perkembangan lingkungan strategis dan ilmu pengetahuan teknologi dengan didukung tersusunnya pranti lunak yang berkaitan dengan kebijakan, peraturan serta petunjuk yang berhubungan dengan tata cara pembinaan TNI AD 1. Persentase penyusunan dokumen pembentukan organisasi baru sesuai Renstra 2. Persentase pemenuhan Doktrin dan petunjuk dalam rangka mendukung operasional Matrik	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	16.5 16.5	17.0 17.0	17.5 17.5	18.0 18.0	18.6 18.6	87.6 87.6	Staf Perencana, Direktorat Keuangan, Staf Operasi, Kodiklat	
1484	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemerintahan	- Meningkatkan kinerja dan tertib administrasi perbendaharaan Sakter Matrik Darat. - Jumlah satuan yang menjadi obyek pemeriksaan.	51 Satuan	51 Satuan	51 Satuan	51 Satuan	2.9 2.9	3.6 3.6	5.5 5.5	6.5 6.5	8.0 8.0	26.5 26.5	Inspektorat Jenderal		
IV	TNI AL														
17	Dukungan Kesiapan Matrik Laut	- Terwujudnya kemampuan dan kekuatan TNI AL yang siap operasional dalam menghadapi setiap ancaman. - Persentase satuan TNI AL yang siap melaksanakan operasi.	17%	19%	20%	22%	22%	24,442.0 2,332.5	32,184.1 2,550.4	36,615.6 2,703.0	30,751.9 2,933.3	30,357.4 3,049.3	154,351.0 13,568.5	UO TNI AL	
1485	Penyelenggaraan Surta Hidros	- Meningkatnya penyelenggaraan Surta Hidros Laut. 1. Jumlah data Peta Laut yang dibuat/revisi, meliputi Peta kertas dan Peta Elektronik (Electronic Navigational Charts /ENC) 2. Jumlah pelaksanaan survei 3. Jumlah layanan pemeliharaan alat surta.	20 data 20 giat 1 paket	20 data 20 giat 1 paket	20 data 20 giat 1 paket	20 data 20 giat 1 paket	20 data 20 giat 1 paket	15.0 15.0	16.5 16.5	18.1 18.1	20.0 20.0	22.0 22.0	91.6 91.6	Dinas Hidrografi dan Oceanografi	

1486	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja MaTra Laut	- Meningkatkan Sistem dan Metodologi Evaluasi Kinerja TNI AL.									15.0	16.5	18.1	20.0	22.0	91.6	Dinas Informasi dan Pengolahan Data
		1. Jumlah sistem aplikasi dan metode kinerja TNI AL	14 Sistem Aplikasi	14 Sistem Aplikasi	14 Sistem Aplikasi	14 Sistem Aplikasi	14 Sistem Aplikasi	14 Sistem Aplikasi	14 Sistem Aplikasi								
		2. Jumlah layanan pemeliharaan Infolabta	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket								
1487	Penyenggaraan Uji Kelainan Materil dan Fasilitas MaTra Laut	- Meningkatkan kualitas dan kuantitas uji kelainanTNI AL.									10.0	11.0	12.1	13.3	18.9	65.3	Dinas Kelainan Materil
		1. Jumlah sertifikat uji kelainan	584 unit	706 unit	710 unit	712 unit	714 unit										
		2. Jumlah layanan pembaikan material	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket										
		3. Jumlah peningkatan dan pemeliharaan alat uji kelainan	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket										
1488	Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Komplek	- Meningkatkan kesiapan sarana prasarana komunikasi, persandian dan periksa komunikasi TNI AL.									30.0	35.0	60.5	66.5	73.2	305.2	Dinas Komunikasi dan Elektronika
		1. Jumlah peralatan komunikasi yang diperbaiki/dipelihara	425 set	425 set	425 set	425 set	425 set										
		2. Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket										
1489	Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Senjak dan Amunisi	- Meningkatkan kesiapan peralatan senjata, elektronika dan amunisi TNI AL.									50.0	55.0	60.5	66.5	73.2	305.2	Dinas Materil Senjata dan Elektronika
		1. Jumlah peralatan senjata elektronika dan amunisi yang dipelihara	432 set	432 set	432 set	432 set	432 set										
		2. Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket										
1490	Pemeliharaan/perawatan KRI/Alpung dan Ranpur/Rantis	- Meningkatkan kesiapan KRI, KAL, Alpung, Ranpur dan Rantis MaTra Laut.									1.980.0	2.079.0	2.182.9	2.281.2	2.383.9	10.907.0	Dinas Materil
		Jumlah pemeliharaan dan perawatan KRI, KAL, Alpung, Ranpur dan Rantis MaTra Laut.	310 paket	310 paket	310 paket	310 paket	310 paket										
1491	Penyenggaraan OMSP Matra, Galakum dan Jaga Kamla di wilayah laut Yunas	- Terwujudnya keamanan laut di perairan yurisdiksi nasional Indonesia.									57.5	132.7	150.0	247.7	219.00	806.9	Staf Operasi
		1. Persentase penyelesaian pelanggaran hukum di laut.	100%	100%	100%	100%	100%										
		2. Jumlah penyelenggaraan OMSP	80 giat	78 giat	80 giat	78 giat	80 giat										
		3. Jumlah penyelenggaraan International Maritime Security Symposium (IMSS)	1 giat	-	1 giat	-	1 giat										
		4. Jumlah penyelenggaraan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK)	-	1 giat	-	1 giat	-										
		5. Jumlah penyelenggaraan Sali Bahari	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket										
		6. Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket										

1503	Peningkatan/pengadaan Pesud dan sarana prasarana perubahan Matra Laut	- Peningkatan kemampuan dan penambahan Pesud beserta sarpras perubahan TNI AL. 1. Jumlah pengadaan suku cadang pesawat udara TNI AL. 2. Jumlah pengadaan pesawat udara TNI AL.	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	90.0	1,498.7	2,061.1	1,299.2	895.4	5,844.4	Pusat Perencanaan
19	Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut	- Kinerja organisasi semakin meningkat dan diawaki oleh personel yang berkualitas, sesuai SKP dan dengan jumlah yang mencukupi sesuai DSP. - Persentase personel yang kompeten.	7%	20%	20%	35%	17%	342.5	960.3	982.0	1,686.0	820.5	4,791.3	UO TNI AL		
1504	Werving dan Seleksi	- Terlaksananya kegiatan pendaftaran dan seleksi personel untuk mengikuti pendidikan sesuai 1. Jumlah personel yang lulus seleksi pendidikan pertama 2. Jumlah personel militer yang lulus seleksi pendidikan pembentukan 3. Jumlah alih golongan PNS	1,781 orang	1,489 orang	1,496 orang	2,021 orang	2,027 orang	9.0	9.9	10.9	12.0	13.3	55.1	Dinas Administrasi Personil		
1505	Pembangunan Fasilitas dan Sarana prasarana Profesionalisme Matra Laut	- Tercukupinya fasilitas dan sarpras profesionalisme Matra Laut. 1. Jumlah pembangunan fasilitas pendidikan dan latihan matra laut 2. Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan latihan matra laut	56 paket	56 paket	56 paket	56 paket	56 paket	120.0	540.8	423.8	1,086.5	175.7	2,346.8	Dinas fasilitas pangkalan		
1506	Penyelenggaraan Latihan Operasi Matra Laut	- Peningkatan kemampuan personel dan satuan TNI AL dalam melaksanakan tugas operasi TNI AL. 1. Jumlah latihan matra laut 2. Jumlah geladi Tugass Tempur tingkat IV TNI AL 3. Jumlah latihan bersama dengan negara sahabat dan mubtabah KRI 4. Jumlah meeting dalam rangka penyiapan latihan bersama, seminar, simposium dan	22 giat	22 giat	22 giat	22 giat	22 giat	80.5	247.5	260.0	271.6	283.9	1,143.5	Staf Operasi		
1507	Dikana, Dikangum, Spesialisasi, Profesi dan Ketrampilan serta Dikruk Matra Laut	- Terselenggaranya pendidikan TNI AL pada semua strata yang sesuai standar. 1. Jumlah pendidikan pertama 2. Jumlah pendidikan pembentukan 3. Jumlah pendidikan pengembangan umum	4 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	129.0	157.8	282.5	310.7	341.8	1,221.8	Dinas Pendidikan		

	4.	Jumlah pendidikan spesialisasi/Rhusus	10 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket												
	5.	Jumlah pendidikan/kursus lainnya	3 paket	28 paket	28 paket	28 paket	28 paket	28 paket												
1508		Penyelenggaraan Psikologi Matra Laut																		
		- Meningkatkan kondisi psikologi personel dan satuan TNI AL sesuai standar serta kesiapan operasi psikologi TNI AL																		
		- Jumlah pelayanan psikologi Matra Laut	6 paket	9 paket	9 paket	9 paket	9 paket	9 paket												
25		Penyelenggaraan manajemen dan operasional Matra Laut	18%	17%	23%	21%	21%	21%	9,080.1	8,460.1	11,767.0	10,846.8	10,444.1	50,598.1						
		- Terwujudnya manajemen dan operasional Matra Laut yang terintegrasi dan akurat/berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan TNI AL																		
		- Persentase Satker yang menerapkan manajemen yang terintegrasi dan akurat/berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan TNI AL	100%	100%	100%	100%	100%	100%												
1509		Penyelenggaraan Administrasi Personel Matra Laut																		
		- Meningkatkan dukungan administrasi personel TNI AL																		
		1. Persentase data personel yang memenuhi syarat sesuai dengan klasifikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%												
		2. Jumlah penyelenggaraan administrasi pengelolaan personel	4 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket												
		3. Jumlah pembinaan personel terprogram matra laut	23 paket	23 paket	23 paket	23 paket	23 paket	23 paket												
1510		Pemeliharaan/Perawatan peralatan Fungsional, Fasilitas, Sarana Prasarana dan pengelolaan LTGA																		
		- Meningkatkan dukungan Perawatan Peralatan Fungsional, Fasilitas, dan Sarpras Pengelolaan LTGA																		
		1. Persentase pemakaian LTGA sesuai pagu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	983.8	474.6	1,029.9	1,231.4	950.8	4,670.5						
		2. Jumlah satker yang menerima pemeliharaan dan perawatan bangunan	88 satker	88 satker	88 satker	88 satker	88 satker	88 satker												
		3. Jumlah pemeliharaan dan perawatan kendaraan bermotor dan kendaraan khusus	9,719 unit	9,719 unit	9,719 unit	9,719 unit	9,719 unit	9,719 unit												
		4. Jumlah pemeliharaan lainnya	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket												
1511		Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan																		
		- Meningkatkan dukungan Pelayanan Kesehatan Matra Laut																		
		1. Persentase personel beserta keluarga yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	71.9	73.5	95.1	253.7	791.2	1,285.4						
		2. Jumlah layanan terentu, meliputi dukungan operasi, pemeriksaan kesehatan organik dan	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket												
		3. Jumlah pengadaan bekal kesehatan	3 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket												

			2.	Jumlah penyelenggaraan OMSP Matra Udara.	14 Paket	14 Paket	14 Paket	14 Paket	14 Paket	14 Paket												
			3.	Persentase jam terbang operasi yang sesuai dengan alokasi jam terbang	100%	100%	100%	100%	100%	100%												
			4.	Persentase operasional radar perhari yang sesuai standar	60%	60%	60%	60%	60%	60%												
1521	Pemeliharaan/Perawatan Pswt Udara, Senjata & Almatatus lainnya			Terwujudnya kesiapan pesawat udara, senjata dan Almatatus lainnya untuk mendukung operasi, latihan dan pendidikan							2.078,5	3.182,4	3.541,6	3.906,1	4.240,9	16.949,6						
				- Persentase kesiapan pesawat udara, senjata dan Almatatus lainnya untuk mendukung operasi, latihan dan pendidikan.	12% (PSWT)	19%	21%	23%	25%													
1522	Penyelenggaraan Dukungan Operasi Penerimaan			Terwujudnya kesiapan sarpras dukungan operasi penerimaan untuk kegiatan operasi, latihan dan pendidikan							14,7	242,1	266,4	293,0	322,3	1.138,4						
				- Jumlah Alpalatus yang dipelihara, dirawat dan diperbaiki	9 Paket	9 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket													
1523	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra Udara			Terwujudnya integrasi sistem informasi dan komunikasi yang siap digunakan untuk mendukung tugas							16,2	92,8	69,6	71,6	73,7	323,9						
			1.	Persentase perangkat keras yang tergejar.																		
			2.	Persentase perangkat keras yang tergejar yang siap digunakan																		
			3.	Tingkat kepuasan pengguna aplikasi yang telah dibangun.																		
			4.	Persentase perangkat keras dan aplikasi yang dapat diintegrasikan menjadi satu sistem																		
1524	Pemeliharaan/Perawatan Radar, PSU & Almatatus Komlek Lainnya			Terwujudnya kesiapan radar, PSU, dan Almatatus Komlek lainnya untuk mendukung operasi, latihan dan pendidikan							900,0	1.369,5	1.460,7	1.557,9	1.646,7	6.934,8						
				- Persentase kesiapan radar, PSU, dan Almatatus Komlek lainnya untuk mendukung operasi, latihan dan pendidikan	60% (RADAR)	70%	75%	75%	75%													
1525	Penyelenggaraan Uji Kelakuan Materil dan Fasilitas Matra Udara			Terwujudnya materil dan fasilitas Matra Udara yang laik operasional							19,0	28,9	33,0	36,3	39,7	156,9						
			1.	Persentase materil dan fasilitas Matra Udara yang mendapat sertifikasi laik operasi.																		
			2.	Jumlah penyelenggaraan uji kelakuan Matra Udara.	84 giat	84 giat	84 giat	84 giat	84 giat	84 giat												

1526	Libanghan MaTra Udara	- Terwujudnya hasil Libang (prototype) yang mendapat sertifikasi kelakuan udara										0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	3.7	Dinas Penelitian dan Pengembangan							
		1. Persentase hasil Libang (prototype) yang mendapat sertifikasi kelakuan udara																							
		2. Tingkat kepuasan calon pengguna materil terhadap prototype yang telah dibuat																							
		3. Jumlah produk Libanghan MaTra Udara																							
1527	Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan MaTra Udara	- Terwujudnya materil, kegiatan, dokumen, informasi dan personel yang aman dan intelijen yang update di TNI AU															29.0	116.9	116.9	116.9	116.9	116.9	496.7	Dinas Pengamanan dan Sandi	
		1. Persentase materil, kegiatan, dokumen, informasi dan personel yang dapat diamankan																							
		2. Persentase dokumen intelijen yang up date																							
		3. Jumlah produk intelijen yang dihasilkan untuk kegiatan pengamanan MaTra Udara	13 paket	13 paket	13 paket	13 paket	13 paket	13 paket	13 paket	13 paket	13 paket														
		4. Jumlah kegiatan penyediaan, pengamanan dan penggalangan	3 giat	3 giat	3 giat	3 giat	3 giat	3 giat	3 giat	3 giat	3 giat														
		5. Jumlah kegiatan pembinaan intelijen	2 giat	2 giat	2 giat	2 giat	2 giat	2 giat	2 giat	2 giat	2 giat														
1528	Penyelenggaraan Pemberdayaan Wilayah Perbatasan MaTra Udara	- Terwujudnya ruang alat dan kondisi juang dirgantara serta dukungan rakyat terhadap TNI AU															7.8	8.6	9.4	10.4	11.4	47.6	Dinas Potensi Kedingrintaraan		
		1. Persentase Tingkat minat dan keikutsertaan masyarakat pada kegiatan kedingrintaraan.																							
		2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan kedingrintaraan.																							
		3. Jumlah kegiatan pembinaan potensi dirgantara.	12 giat	12 giat	12 giat	12 giat	12 giat	12 giat	12 giat	12 giat	12 giat														
1529	Penyelenggaraan Surta	- Tersedianya informasi tentang situasi udara dan topografi kawasan lanud serta seluruh wilayah Indonesia yang lengkap dan update.															8.0	8.8	9.7	10.7	11.7	48.8	Dinas Survey dan Pemetaan Udara		
		1. Persentase ketersediaan informasi tentang situasi udara dan topografi kawasan lanud serta seluruh wilayah Indonesia yang lengkap dan update.																							
		2. Jumlah peta yang direvisi.	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket														
		3. Jumlah peta yang diterbitkan	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket														
		4. Jumlah peta yang direproduksi	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket														
		5. Jumlah pemotretan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket														

21. Modernisasi Alutsista/ Non Alutsista, Peningkatan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara	5%	14%	27%	30%	24%	4.195.1	10.356.5	20.769.4	22.689.8	18.370.3	76.381.1	UO TNI AU
<p>Terperluhnya kebutuhan alutsista, non-alutsista, fasilitas, dan sarpras TNI AU untuk siap melaksanakan operasi sesuai dengan kebutuhan yang tertuang dalam dokumen MEP</p> <p>Persentase alutsista, non-alutsista, fasilitas, dan sarpras TNI AU yang siap melaksanakan operasi sesuai dengan kebutuhan yang tertuang dalam dokumen MEP.</p>												
1530 Peningkatan Alutsista Strategis Matra Udara						392.2	660.0	11.294.0	12.388.0	9.978.0	34.712.2	Dinas Pengadaan/Pusada Kemhan
- Terperluhnya kebutuhan Alutsista sesuai dengan kebutuhan yang tertuang dalam dokumen MEP.												
1. Persentase kebutuhan Alutsista sesuai dengan kebutuhan yang tertuang dalam dokumen MEP yang dapat terpenuhi	1 paket	1 paket										
2. Lanjutan pembayaran F-16 EDA dan C-130 eks RAMP	1 paket	1 paket										
3. Pembayaran 5 pesawat C-130 H & simulator	1 paket											
1531 Peningkatan/ pengadaan Pesawat udara dan dukungan lainnya						1.780.0	4.349.0	4.420.5	4.709.1	2.817.3	18.075.8	Dinas Aeronautika
Tercapainya kesiapan dan kemampuan pesawat udara TNI AU.												
1. Persentase kesiapan pesawat udara												
2. Persentase kesiapan dukungan pemeliharaan												
3. Persentase kesiapan dukungan pemeliharaan pesawat udara di Lanud Oesza.												
4. Jumlah pesawat yang siap operasional.	150 pswt	150 pswt	150 pswt	150 pswt	150 pswt							
1532 Peningkatan/ Peningkatan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara						455.8	1.763.5	1.373.0	1.438.3	1.534.6	6.565.1	Dinas Fasilitas dan Konstruksi
- Terjaganya kesiapan dan fasilitas dan sarpras udara TNI AU.												
1. Persentase fasilitas dan sarpras udara yang siap digunakan TNI AU												
2. Jumlah sarpras dan fasilitas pangkalan TNI AU yang dibangun.	1.082.182 M ²	1.190.400 M ²	1.309.440 M ²	1.440.384 M ²	1.584.423 M ²							
3. Jumlah sarpras dan fasilitas pangkalan TNI AU yang dipelihara.	103.312 M ²	113.463 M ²	125.008 M ²	137.508 M ²	151.258 M ²							
1533 Peningkatan/ pengadaan Radar, PSU dan Alat Komlek Lainnya						890.0	2.035.5	2.200.8	2.374.3	2.572.4	10.073.0	Dinas Komunikasi dan Elektronika
- Terjaganya kesiapan dan kemampuan Radar, PSU, dan Alat Komlek Lainnya												
1. Persentase kesiapan Radar, PSU, dan Alat Komlek Lainnya												
2. Jumlah Radar yang siap operasional.	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit							
3. Jumlah PSU & Alkomlek yang siap operasional.	139 Paket	153 Paket	172 Paket	190 Paket	210Paket							

1534 /Pengadaan Senri/Serbat	- Terjaganya kesiapan dan terpenuhinya kebutuhan kemampuan Senri/Serbat TNI AU									341.4	1,042.8	1,245.1	1,442.3	1,199.6	5,271.2	Dinas Aeronautika
	1. Persentase ketertarikan senri/serbat															
	2. Persentase ketersediaan amunisi.															
	3. Jumlah pengadaan senjata ringan/berat	23 Paket	27 Paket	28 Paket	29 Paket	29 Paket	29 Paket									
	4. Jumlah pengadaan amunisi	17 Paket	19 Paket	20 Paket	21 Paket	23 Paket										
1535	Pengadaan peralatan Non Alutsista															
	- erpenuhnya kebutuhan peralatan non-alutsista TNI A															
	1. Persentase tersedianya peralatan non-alutsista TNI AU															
	2. Jumlah pengadaan non alutsista meliputi Rammor, peralatan pendukung pertahanan.	41 paket	44 paket	47 paket	49 paket	52 paket										
22. Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara		13%	15%	19%	23%	30%				405.0	480.7	583.0	724.7	931.4	3,124.7	UO TNI AU
	- Terwujudnya profesionalisme personel TNI AU sesuai Daftar Susunan Personel (DSP) untuk melaksanakan OMSP dan OMP															
	1. Persentase capaian profesionalisme personel TNI AU sesuai Daftar Susunan Personel (DSP) untuk melaksanakan OMSP dan OMP															
	2. Persentase personel yang berkualitas sesuai dengan tuntutan tugas.															
1536	Latihan Matra Udara															
	- Terjaganya kemampuan dasar yang diperlukan personel/penerbang untuk pengoperasian pesawat.															
	1. Persentase dari jumlah personel yang terbukti kemampuannya meningkat dalam enam bulan terakhir sebagai hasil dari latihan simulator.															
	2. Jumlah kegiatan latihan operasi	30 giat	30 giat	30 giat	30 giat	30 giat										
	3. Jumlah kegiatan latihan angkasa yudha	1 giat	1 giat	1 giat	1 giat	1 giat										
	4. Jumlah kegiatan latihan bersama dengan negara sahabat.	15 giat	15 giat	15 giat	15 giat	15 giat										
1537	Penyelenggaraan Pendidikan Matra Udara															
	1. Terpenuhinya personel yang memenuhi prasyarat pendidikan di lingkungan TNI AU.															
	2. Terpenuhinya kebutuhan minimal dari masing-masing sepuluh komponen pendidikan															
	1. Persentase personel yang lulus tes seleksi mengikuti pendidikan															
	2. Pembinaan masing-masing komponen pendidikan.															
	3. Tingkat kepuasan peserta seleksi dan peserta pendidikan.															
	4. Jumlah pendidikan pertama	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket										
	5. Jumlah pendidikan pembetulan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket										
	6. Jumlah pendidikan sarbab	9 paket	9 paket	9 paket	9 paket	9 paket										
	7. Jumlah pendidikan pengembangan umum	35 paket	35 paket	35 paket	35 paket	35 paket										
	8. Jumlah pendidikan pengembangan spesialisasi	180 paket	180 paket	180 paket	180 paket	180 paket										
										77.6	85.3	93.9	103.2	113.6	473.6	Dinas Pendidikan

	8.	Persentase personel yang mendapatkan pelayanan psikologi matra udara.	100%	100%	100%	100%	100%	100%											
26.		Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara																	
	-	Terwujudnya tatakelola sumber daya TNI AU secara efektif dan efisien agar siap melaksanakan OMSP dan OMP	30%	10%	15%	22%	23%	3,796.2	1,281.5	1,934.7	2,837.8	2,985.3	12,835.5	UO TNI AU					
	1.	Persentase sumber daya yang dapat dihemat dalam suatu kegiatan																	
	2.	Persentase Personel TNI AU yang disiplin dan profesional																	
1541		Penyelenggaraan Kepolisian Militer Matra Udara																	
	-	Terwujudnya ketaatan terhadap hukum dan disiplin militer di TNI AU.						8.0	8.8	9.7	10.7	11.7	48.8	Pusat Polisi Militer					
	1.	Persentase pelanggaran hukun dan disiplin militer yang dilaporkan kepada POM AU.																	
	2.	Persentase personel TNI AU yang taat hukum dan disiplin militer	100%	100%	100%	100%	100%												
1542		Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemertiksaan																	
	-	Terwujudnya tatakelola keuangan dan kinerja TNI AU yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien						2.9	4.8	5.3	6.6	6.9	26.5	Inspektorat Jenderal					
	1.	Persentase personel Ijen dengan fungsi pemeriksa yang mempunyai kompetensi dan kualifikasi auditor.																	
	2.	Persentase temuan pelaksanaan wasrik Ijenau yang tervalidasi untuk diteruskan kepada pimpinan																	
	3.	Opini auditor eksternal terhadap laporan keuangan (LK) Kemhan dan TNI (termasuk didalamnya bahan laporan keuangan yang telah mendapat pemeriksaan dan bimbingan teknis secara berkala dari Ijen TNI AU)																	
	4.	Hasil penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja (LAKIP) Kemhan dan TNI (termasuk didalamnya bahan laporan kinerja yang telah mendapat pemeriksaan dan bimbingan teknis dari Ijen TNI AU)																	
	5.	Jumlah satuan yang menjadi obyek pemeriksaan.	83 Satter	83 Satter	83 Satter	83 Satter	83 Satter												
	6.	Jumlah kegiatan review laporan keuangan	2 giat	2 giat	2 giat	2 giat	2 giat												
	7.	Jumlah kegiatan pemutakhiran data	25 giat	25 giat	25 giat	25 giat	25 giat												
1543		Har/Perawatan peralatan Fungsional, Pas & Sarpras serta LTGA																	
	1.	Terjaganya kesiapan peralatan fungsional, fasilitas dan sarpras untuk mendukung pelaksanaan tugas TNI AU secara efektif.						946.6	162.5	284.8	356.0	373.8	2,123.7	Dimas Fasilitas dan Kontruksi					
	2.	Terlaksananya efisiensi penggunaan LTGA.																	
	1.	Persentase dari penurunan jumlah kerusakan peralatan fungsional, fasilitas dan sarpras dalam kurun waktu 5 tahun.																	
	2.	Persentase kesiapan peralatan fungsional, fasilitas dan sarpras untuk mendukung pelaksanaan tugas TNI AU secara efektif																	
	3.	Persentase efisiensi pembiayaan LTGA dalam kurun waktu 5 tahun.																	
	4.	Persentase pemakaian LTGA sesuai pagu.	78%	78%	78%	78%	78%												

1544 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan															Dinas Kesehatan						
1.	Tercapainya ketersediaan obat dan alat kesehatan														17.5	19.3	21.2	23.3	25.6	106.8	
2.	Terwujudnya pelaksanaan standar pelayanan kesehatan bagi personel TNI AU																				
1.	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang layak bagi personel TNI AU dan keluarganya																				
2.	Persentase ketersediaan obat dan peralatan <small>layanan kesehatan</small>																				
3.	Persentase rumkit dan satkes yang telah melaksanakan standar layanan kesehatan personel																				
4.	Tingkat kepuasan personel yang menggunakan fasilitas dan layanan dalam melakukan rikes di Rumkit TNI AU																				
5.	Persentase personel TNI AU beserta keluarga yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
1545 Penyelenggaraan Adm Perencanaan, Penganggaran & Keuangan															Dinas Keuangan						
1.	Tercapainya laporan keuangan TNI AU yang tertib, tepat waktu, akurat dan akuntabel.														50.5	48.9	73.9	92.4	97.0	362.7	
2.	Terwujudnya tarakelola keuangan TNI AU yang tertib, tepat waktu, akurat dan akuntabel																				
1.	Persentase laporan keuangan yang tidak menjadi temuan APP.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
2.	Persentase jumlah dokumen pengeluaran keuangan yang tidak menjadi temuan APP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
1546 Penyelenggaraan Pembinaan Hukum															Dinas Hukum						
-	Terselesaikannya permasalahan hukum yang melibatkan institusi maupun personel TNI AU.														2.3	2.3	3.7	4.6	7.7	20.6	
1.	Persentase penyelesaian perkara hukum yang melibatkan institusi atau personel TNI AU.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
2.	Persentase perkara hukum yang menyangkut institusi atau personel TNI AU dimana pihak institusi atau personel TNI AU dinyatakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
1547 Penyelenggaraan Adm Kal Umum & Har Perawatan perkantoran															Dinas Materil						
1.	Terjaganya kesiapan dukungan operasional kendaraan dan sarana bantuan TNI AU.														2.737.8	997.1	1.493.4	2.293.9	2.408.6	9.930.8	
2.	Tersedianya bekal dan kesiapan fasilitas perkantoran																				

	1. Persentase ketersediaan BMP.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																	
	2. Persentase kesiapan kendaraan dan sarana bantuan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																	
	3. Persentase peralatan perkantoran yang masih berfungsi dan dapat digunakan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																	
	4. Tingkat kepuasan personel yang menggunakan kendaraan dan fasilitas perkantoran.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																	
1548	Penyelenggaraan Administrasi Personel Matra Udara								1.5	1.5	1.9	2.4	2.5	9.8											Dinas Administrasi Personel
	1. Tercapainya tertib administrasi personel yang baik.																								
	2. Terwujudnya dukungan administrasi bagi personel Matra Udara yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.																								
	1. Persentase kesalahan dalam melaksanakan kegiatan administrasi personel.																								
	2. Tingkat kepuasan personel terhadap pelaksanaan administrasi personel TNI AU.																								
	3. Persentase dokumen administrasi personel TNI AU yang diselesaikan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																	
1549	Penyelenggaraan Perpas dan Penun Matra Udara								6.5	7.2	7.9	8.7	9.5	39.7											Dinas Penerangan
	1. Tercapainya penyebaran informasi TNI AU kepada seluruh personel TNI AU																								
	2. Tersedianya informasi tentang TNI AU bagi masyarakat umum																								
	3. Terciptanya citra positif TNI AU di mata masyarakat.																								
	1. Tingkat kepuasan personel terhadap perolehan informasi tentang TNI AU																								
	2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap perolehan informasi tentang TNI AU																								
	3. Opini TNI AU di masyarakat umum																								
	4. Jumlah produk penerangan	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket																	
	5. Jumlah kegiatan pameran penerangan	1 giat	1 giat	1 giat	1 giat	1 giat	1 giat	1 giat																	
1550	Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Udara								11.0	12.1	13.3	14.6	16.1	67.0											Dinas Perawatan
	- Terwujudnya kesejahteraan prajurit dan ASN TNI AU																								
	1. Persentase keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan prajurit TNI AU																								
	2. Persentase jumlah ASN dan prajurit TNI AU yang menerima gaji dan hak dengan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																	
	3. Tingkat kepuasan personel TNI AU terhadap pemenuhan hak-hak prajurit TNI AU	2.5	2.6	2.8	2.9	3																			

